



**Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

***Consolidated Financial Statements
as of December 31, 2023
and for the year ended
with independent auditor's report***

***PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES***

Daftar Isi**Table of Content**

	Halaman / <u>Page</u>	
Surat pernyataan direksi		<i>Board of directors' statement</i>
Laporan auditor Independen		<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan konsolidasian	1	<i>Consolidated statements of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4	<i>Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan defisiensi modal konsolidasian	6	<i>Consolidated statements of changes in capital deficiency</i>
Laporan arus kas konsolidasian	7	<i>Consolidated statements of cash flows</i>
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian	8 - 113	<i>Notes to the consolidated financial statements</i>



btelgroup

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KOSOLIDASIAN
PT BAKRIE TELECOM DAN ENTITAS ANAK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023**

**STATEMENT OF DIRECTORS
ABOUT RESPONSIBILITY TO
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
PT BAKRIE TELECOM AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER
DECEMBER 31, 2023**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama :	H. Harya Mitra Hidayat	:	Name
Alamat Kantor :	Wisma Bakrie 2nd Floor	:	Office address
	Jl. HR Rasuna Said Kav. B-1		
	Jakarta Indonesia 12920		
Alamat Rumah :	Jl. Pejaten Barat II No. 5A	:	Residential address
	RT.004/RW. 008 Pejaten Barat		
	Pasar Minggu Jakarta Selatan		
Nomor Telepon :	(62 21) 52290264	:	Telephone
Jabatan :	Direktur Utama	:	Title
2. Nama :	Aditya Irawan	:	Name
Alamat Kantor :	Wisma Bakrie 2nd Floor	:	Office address
	Jl. HR Rasuna Said Kav. B-1		
	Jakarta Indonesia 12920		
Alamat Rumah :	Kav. Agraria No. 94 RT.002/RW.016	:	Residential address
	Duren Sawit Jakarta Timur		
Nomor Telepon :	(62 21) 52290264	:	Telephone
Jabatan :	Direktur	:	Title

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | |
|---|--|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bakrie Telecom Tbk ("Perusahaan") dan Entitas Anak | 1. Responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the PT Bakrie Telecom Tbk ("Company") and Subsidiaries |
| 2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2. The consolidated financial statements of the Company and Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. |
| 3. a. Semua Informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. All information in the consolidated financial statements the Company and Subsidiaries have been disclosed in a complete and truthful manner; |
| b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. | b. The consolidated financial statements of the Company and Subsidiaries do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts. |
| 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan Entitas Anak. | 4. We are responsible for the Company and Subsidiaries internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We certify the accuracy of this statement.

Jakarta, 24 Juni 2024 / Jakarta, June 24, 2024

Atas nama dan mewakili Direksi/ For and on behalf of the Board of Directors

 

H. Harya Mitra Hidayat **Aditya Irawan**

Direktur Utama / President Director Direktur / Director



PT. Bakrie Telecom Tbk.

A Technology and Communication Holding

Wisma Bakrie, 2nd Floor Jl. HR Rasuna Said Kav B-1, Jakarta Selatan 12920. Phone +6221-52290264

www.bakrietelecom.com

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

No : 00974/2.0459/AU.1/06/0166-1/1/VI/2024

No : 00974/2.0459/AU.1/06/0166-1/1/VI/2024

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris,
dan Direksi
PT Bakrie Telecom Tbk**

**The Stockholders, Board of Commissioners,
and Directors
PT Bakrie Telecom Tbk**

Opini

Opinion

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk dan entitas anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba-rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Bakrie Telecom Tbk and subsidiaries ("the Group"), which comprise of the consolidated statement of financial position as of December 31, 2023, and consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statements of cash flows for year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

Menurut opini kami, kecuali dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the accompanying consolidated statement of financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated statement of financial position of the Company as of December 31, 2023, and its consolidated financial statement of performance and consolidated statement of cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini Wajar dengan Pengecualian

Basis for Qualified Opinion

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 25b atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan belum melakukan akrual atas perpajakan yang timbul dari pengakuan kewajiban beban bunga atas wesel senior yang diterima dari luar negeri.

As disclosed in Note 25b to the consolidated financial statements, the Company has not yet accrued tax arising from the recognition of interest expense obligations received from foreign senior notes.



Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hasil audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut

Ketepatan pengakuan pendapatan jasa service dan pemakaian alat pemancar (multipleksing/MUX)

Grup memiliki pendapatan utama diantaranya atas jasa service dan pemakaian alat pemancar (multipleksing/MUX). Pada tanggal 31 Desember 2023 Grup mengakui pendapatan dari jasa service dan pemakaian alat pemancar (multipleksing/MUX) sebesar Rp 61,09 miliar, yang mencakup 76% dari total pendapatan Grup.

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit metter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Accurate recognition of service revenue and use of transmitter equipment (multiplexing/MUX)

The Group's main revenues include for service and use of transmitter equipment (multiplexing/MUX. For the year ended December 31, 2023, the Group recognized revenue from engineering and construction amounting to Rp61,09 million, which represents 76% of the Group's total revenue.



Karena signifikansi nilai pendapatan jasa service dan pemakaian alat pemancar (multiplexing/MUX) maka porsi signifikan audit kami mengarah kepada audit atas pendapatan yang dapat mempunyai dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian, sesuai yang diungkapkan pada Catatan 2.d dan 21 atas laporan keuangan konsolidasian.

Prosedur audit kami mencakup, antara lain:

- Kami memperoleh pemahaman atas pengendalian kunci yang relevan terhadap pengakuan pendapatan jasa service dan pemakaian alat pemancar (multiplexing/MUX) berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- Kami memperoleh rincian pendapatan jasa service dan pemakaian alat pemancar (multiplexing/MUX) dan mencocokkan nilainya dengan pendapatan yang telah tercatat pada laporan keuangan konsolidasian.
- Berdasarkan uji petik, kami membaca dan memahami persyaratan utama pada kontrak jasa service dan pemakaian alat pemancar (multiplexing/MUX) yang berlaku selama tahun berjalan untuk mengevaluasi ketepatan perlakuan akuntansi untuk pengakuan pendapatan tersebut.
- Berdasarkan uji petik, kami memeriksa pengakuan pendapatan yang telah tercatat pada laporan keuangan konsolidasian untuk memastikan bahwa pendapatan yang telah diakui didukung oleh bukti yang tepat.

Penekanan Suatu Hal

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 36 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Kelompok Usaha mencatat nilai aset sejumlah Rp60,27 miliar serta mengalami defisiensi modal sejumlah Rp5,88 triliun dan mencatat liabilitas sejumlah Rp5,94 triliun termasuk utang jangka pendek sejumlah Rp805 miliar.

Due to the significance amount of service revenue and use of transmitter equipment (multiplexing/MUX), resulting in significant portion of our audits directed towards the audit of revenue which may have impact on the consolidated financial statements, as disclosed in Note 2.d, and 21 to the consolidated financial statements.

Our audit procedures include, among others:

- *We obtained understanding and of tkey controls relevant to the revenue of service revenue and use of transmitting equipment (multiplexing/MUX) based on agreed agreement.*
- *We obtained the details of revenue from of service revenue and use of transmitting equipment (multiplexing/MUX) based on agreed contracts and compared the amount with the revenue recorded in the consolidated financial statements.*
- *Read and understand the requirements of the contract for service and use of transmitter equipment (multiplexing/MUX) which was in effect during the current year to evaluate the appropriateness of the accounting treatment for the recognition of the revenue.*
- *On a sample basis, we examined revenue recorded in the consolidated financial statements to assess that the revenue recognized is supported by appropriate evidence.*

Emphasis of matter

As disclosed in Note 36 to the consolidated financial statements, the Group recorded the asset balance of IDR 60.27 billion and is suffering a capital deficiency of IDR 5.88 trillion and recorded liabilities of IDR 5.94 trillion including short-term liabilities amounting to IDR 805 billion.

Manajemen Kelompok Usaha menyusun Laporan Keuangan konsolidasian terlampir dengan asumsi dan keyakinan untuk tetap mampu mempertahankan kelangsungan usaha, dengan diantaranya akan melaksanakan rencana aksi sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 36 serta masih memiliki Entitas Anak yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan mempertahankan kelangsungan usaha Kelompok Usaha sangat tergantung kepada hasil pelaksanaan rencana aksi manajemen Kelompok Usaha serta kinerja Entitas Anaknya

Kondisi tersebut, beserta hal-hal lainnya yang diungkapkan dalam Catatan 36 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan kelompok usaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Penyelesaian Wesel Senior

Kami membawa perhatian ke Catatan 16 dan 34 atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir Pada tanggal 31 Desember 2020, Kelompok Usaha tidak lagi mencatat kewajiban yang seharusnya sudah jatuh tempo kepada para pemegang wesel senior atas utang pokok dan akrual bunganya, masing-masing sejumlah USD 380 juta dan USD 334,30 juta (suku bunga 11,50% pertahun).

The Group's management prepares the accompanying consolidated financial statements with the assumption and their believe that it could maintain going concern, on the basis that they will carry out the action plan as described in Note 36 and still have the Subsidiaries that have the ability to generate revenue.

This condition indicates that the ability to maintain the going concern of the business Group is highly dependent on the results of the implementation of the Group management action plan and the performance of its Subsidiaries.

These condition along with other matters that are disclosed in Note 36 to the consolidated financial statements, indicated there are material uncertainty that may cast significant doubt on the Group ability to continue as a going concern. Our opinion is not modified related to the matter.

Senior Notes Settlement

We draw attention to Note 16 dan 34 to the accompanying Consolidated Financial Statements As of December 31, 2020, the Group did not record the due date obligations for senior note holders by principal debt and accrued interest, amounting to USO 380 million and USO 334.30 million, respectively (interest rate 11.50% per year).



Pada tanggal 31 Desember 2020, Kelompok Usaha mencatat kewajiban utang kepada BTPL dengan mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Desember 2014 dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"), dimana utang kepada BTPL tersebut merupakan pinjaman pihak berelasi PT Bakrie Telecom Tbk ("Perusahaan") kepada BTPL yang dananya diperoleh BTPL dari wesel senior dengan utang pokok sejumlah USD 380 juta atau setara Rp 4,612 triliun dan akrual bunga sejumlah USD 27,36 juta atau setara dengan Rp 332,10 miliar (suku bunga 4% per tahun dan kurs PKPU, USD 1=Rp 12.138).

Seperti dijelaskan dalam Catatan 16 dan 34 atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir, berdasarkan keterangan dari konsultan hukum Perusahaan di Amerika Serikat sehubungan dengan putusan atau court order tertanggal 6 Mei 2021 dari Pengadilan Kepailitan New York atas permohonan Chapter 15 yang diajukan Perusahaan, dinyatakan bahwa Pengadilan Kepailitan New York telah mengabulkan permohonan Chapter 15 BTEL dengan memberikan pengakuan atas keputusan PKPU BTEL sebagai foreign main proceeding berdasarkan Chapter 15 dari Undang - Undang Kepailitan Amerika Serikat. Lebih lanjut berdasarkan putusan tersebut BTEL mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum Amerika Serikat dimana pemegang Wesel Senior dan pihak manapun juga tidak dapat melakukan klaim atau tuntutan terhadap BTEL maupun terhadap aset-aset di Amerika Serikat milik BTEL.

Kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan adanya potensi perselisihan dimana para pemegang wesel senior akan mengklaim tagihan sebagaimana tercantum dalam perjanjian antara BTPL dengan para pemegang wesel senior.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

As of December 31, 2020, the Group recorded its obligations to BTPL with reference to the provisions contained in the Amicable Agreement dated December 8, 2014 in the Postponement of Debt Payment Obligations ("PKPU"), where the debt to BTPL is a loan from a related party of PT Bakrie Telecom Tbk ("the Company") to BTPL whose funds were obtained by BTPL from senior notes with principal debt of USD 380 million or equivalent to IDR 4.612 trillion and accrued interest amounting to USD 27.36 million or equivalent to /IDR 332.10 billion (interest rate 4% per year and PKPU exchange rate, USD 1 = IDR 12,138).

As described in Note 16 and 34 to the accompanying Consolidated Financial Statements, based on information from the Company's legal consultant in the United States regarding the decision or court order dated May 6, 2021 from the New York Bankruptcy Court on the application for Chapter 15 submitted by the Company, it is stated that the Bankruptcy Court of New York has granted the application for Chapter 15 of BTEL by granting acknowledgment of the PKPU decision. BTEL as a foreign main proceeding under Chapter 15 of the United States Bankruptcy Act. Furthermore, based on the decision, BTEL has legal protection under United States law wherein the holders of Senior Notes and any other party cannot make claims or demands against BTEL or against assets in the United States belonging to BTEL.

This condition does not preclude the possibility of a potential dispute in which the senior note holders that will claim their rights as declared in the agreement between BTPL and the senior note shareholders.

Our opinion is not modified in respect in this matters.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini Kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidak konsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan- bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat yang berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Hal lainnya

Laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar dengan pengecualian dengan penekanan suatu hal atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 28 Juni 2023.

Other Information

Management is responsible for the information. The other information comprises the information contained in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion there on.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards Auditing established by Institute of Certified Public Accountants.

Other Matter

The accompanying consolidated financial statements of PT Bakrie Telecom Tbk as of December 31, 2022 and for the year then ended were audited by other independent auditors who expressed their expressed a qualified opinion with an emphasis on th consolidated e financial statements as of June 28, 2023.



Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an Auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risk of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*



HELIANTONO & REKAN

Parker Russell International

Registered Public Accountants

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami dan jika relevan, pengamanan terkait.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial statements (continued)

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

KAP Heliantono & Rekan

Jansen Ak, BKP, CPA, CA, Asean CPA, CTC, CBV, M.Ak
Nomor Izin Akuntan Publik AP 0166/ License of Public Accountant No.AP 0166

24 Juni 2024 / June 24, 2024



**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
<u>ASET</u>				<u>ASSETS</u>
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2c,4	2.499	404	Cash and cash equivalents
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak ketiga (setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp73.533 dan Rp73.405 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)	2i,2p,5	3.492	975	Third parties (net allowances for impairment loss of Rp73,533 and Rp73,405 respectively, as of December 31, 2023 and 2022)
Pihak berelasi (setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp4.733 dan Rp2.711 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)	2d,2i,2p,5	24.671	5.357	Related parties (net allowances for impairment loss of Rp2,711 and Rp4.733 respectively, as of December 31, 2023 and 2022)
Persediaan	2e,6	1.338	2.006	Inventories
Pajak dibayar dimuka	25a	382	2.615	Prepaid taxes
Uang muka	7	1.796	2.572	Advances
Biaya dibayar dimuka	2f,8	167	111	Prepaid expenses
Total Aset Lancar		34.345	14.040	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap - bersih (Setelah dikurangi jumlah akumulasi penyusutan dan penurunan nilai Rp13.209.287 dan Rp13.209.181 masing-masing pada 31 Desember 2023 dan 2022)	2g,2h,2i	22.776	302	Fixed assets - net (Net with total accumulated depreciation and impairment loss amounting of Rp13,209,287 and Rp13,209,181 as of December 31, 2023 and 2022, respectively)
Piutang pihak berelasi	2d,9	2.620	5.640	Due from related parties
Aset dalam pengerjaan	2g,11	-	12.471	Assets in progress
Aset tidak lancar lainnya	12	529	822	Other non- current assets
Total Aset Tidak Lancar		25.925	19.235	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		60.270	33.275	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2023	2022	
<u>LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL</u>				<u>LIABILITIES AND CAPITAL DEFICIENCY</u>
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				Trade payables
pihak ketiga	2p,13	415.355	426.173	third parties
pihak berelasi	2d,2p,13	43.193	16.915	related parties
Utang lain-lain	2p,14	172.711	165.852	Other payables
Beban akrual	2n,15	139.332	247.088	Accrued expenses
Utang pajak	2q,25b	34.524	28.060	Tax payables
Total Liabilitas Jangka Pendek		805.115	884.088	Total Current Liabilities
Utang yang diselesaikan melalui PKPU	16,34	5.021.740	4.931.941	Settlement of payables through PKPU
Utang pihak berelasi	2d,2p,26	72.109	61.365	Due to related parties
Liabilitas imbalan kerja	2o,27	45.709	12.708	Employee benefit obligations
Total Liabilitas Jangka Panjang		5.139.558	5.006.014	Total Non-current Liabilities
Total Liabilitas		5.944.673	5.890.102	Total Liabilities

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>Catatan / Notes</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
DEFISIENSI MODAL				CAPITAL DEFICIENCY
Modal saham				Capital stock
Nilai nominal				Par value
Saham biasa				Common shares
seri A Rp 200				series A Rp200
seri B Rp 100				series B Rp100
(dalam satuan penuh)				(in full amount)
Modal dasar				Authorized shares
Saham biasa seri A				Common shares series A
10.000.000.000 saham pada				10,000,000,000 shares as of
tanggal 31 Desember 2023				December 31, 2023
dan 2022				and 2022
Saham biasa seri B				Common shares series B
87.111.652.195 saham pada				87,111,652,195 shares as of
tanggal 31 Desember 2023				December 31, 2023
dan 2022				and 2022
Modal ditempatkan dan				Issued and fully
disetor penuh				paid shares
Saham biasa seri A				Common shares series A
5.751.502.450 saham pada				5,751,502,450 shares as of
tanggal 31 Desember 2023				December 31, 2023
dan 2022				and 2022
Saham biasa seri B				Common shares series B
31.022.402.185 saham pada				31,022,402,185 shares as of
pada 31 Desember 2017 dan				December 31, 2017 and
24.833.088.205 saham pada				24,833,088,205 shares as of
tanggal 31 Desember 2023				December 31, 2023
dan 2022	17	4.252.541	4.252.541	and 2022
Tambahan modal disetor	18	2.488.871	2.488.871	Additional paid-in capital
Saham beredar yang				Treasury stock
diperoleh kembali	2m,19	(11.000)	(11.000)	Premium on
Agio saham beredar yang				Treasury stock
diperoleh kembali	2m,19	50.623	50.623	Premium on conversion stock
Agio konversi hutang menjadi saham	19	618.931	618.931	Mandatory convertible bonds
Obligasi wajib konversi	17	5.672.905	5.672.905	Deficit
Defisit	30	<u>(18.903.877)</u>	<u>(18.919.588)</u>	Capital deficiency
Defisiensi modal yang dapat				atributable to owners
diatribusikan kepada pemilik				of the parent entity
entitas induk		(5.831.006)	(5.846.717)	Non-controlling interest
Kepentingan non pengendali	2b,20	<u>(53.398)</u>	<u>(10.110)</u>	
Defisiensi Modal - Neto		<u>(5.884.403)</u>	<u>(5.856.827)</u>	Capital Deficiency - Net
TOTAL LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL		<u>60.270</u>	<u>33.275</u>	TOTAL LIABILITES AND CAPITAL DEFICIENCY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023**
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
AS OF DECEMBER 31, 2023**
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>Catatan / Notes</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
PENDAPATAN USAHA				OPERATING REVENUE
Pendapatan usaha	2d,2n,21	80.566	47.850	Operating revenues
Beban pokok pendapatan	2n,21	<u>(66.704)</u>	<u>(32.096)</u>	Cost of revenues
Laba bruto		<u>13.862</u>	<u>15.754</u>	Laba bruto
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Penyusutan	2g,2h,2n,10	107	110	Depreciation
Karyawan	2n,2o,23	20.996	13.497	Employee
Umum dan administrasi	2n,22	<u>19.454</u>	<u>18.870</u>	General and administrative
Total Beban Usaha		<u>40.556</u>	<u>32.478</u>	Total Operating Expenses
LABA (RUGI) USAHA		<u>(26.694)</u>	<u>(16.723)</u>	OPERATING INCOME (LOSS)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (CHARGES)
Beban keuangan	24b,16	(89.824)	(89.814)	Financing charges
Laba (rugi) selisih kurs - neto	2q,24a	2.096	(7.057)	Gain (loss) foreign exchange - net
Lain-lain - neto	24c	<u>122.352</u>	<u>(4.378)</u>	Others - net
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto		<u>34.624</u>	<u>(101.249)</u>	Other Income (Charges) - Net
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		7.930	(117.972)	INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2q	<u>111</u>	<u>46</u>	INCOME TAX EXPENSES
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		<u><u>7.819</u></u>	<u><u>(117.926)</u></u>	NET INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
AS OF DECEMBER 31, 2023**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2023	2022	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:				<i>Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:</i>
Pengkukuran kembali rugi atas liabilitas imbalan kerja		(35.394)	2.409	<i>Remeasurement again on employee benefit liability</i>
Penghasilan Komprehensif Lain - Neto setelah pajak		(35.394)	2.409	Other Comprehensive Income - Net Of Tax
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(27.576)	(115.517)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada				Net income (loss) for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		51.106	(112.851)	<i>Owner of the parent entity</i>
Kepentingan non-pengendali	2b,20	(43.287)	(5.074)	<i>Non-controlling interest</i>
Total		7.819	(117.926)	Total
Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive Income (loss) for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		15.711	(110.442)	<i>Owner of the parent entity</i>
Kepentingan non-pengendali	2b,20	(43.287)	(5.074)	<i>Non-controlling interest</i>
Total		(27.576)	(115.517)	Total
LABA (RUGI) NETO PER SAHAM DASAR DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (Angka penuh)				BASIC INCOME (LOSS) PER SHARE ATRIBUTABLE TO THE OWNER OF PARENT (Full amount)
Laba (rugi) bersih per saham	2r,30	0,16	(3,27)	<i>Net income (loss) per share</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BAKRIE TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN DEFISIENSI MODAL KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023

(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BAKRIE TELECOM Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN CAPITAL DEFICIENCY
AS OF DECEMBER 31, 2023

(Figure in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Defisiensi Modal yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ <i>Capital Deficiency Attributable to Owner of the Parent</i>											
	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor / <i>Issued and Paid Shares</i>	Tambahan Modal Disetor / <i>Additional Paid-in Capital</i>	Saham Beredar yang Diperoleh Kembali / <i>Treasury Stock</i>	Agio Saham Beredar yang Diperoleh Kembali / <i>Premium on Treasury Stock</i>	Agio Saham yang Dikonversi dari Hutang / <i>Premium on Conversion Stock</i>	Obligasi Wajib yang Dikonversi dari Hutang/ <i>Mandatory Conversion Bonds</i>	Cadangan Modal Lainnya / <i>Other Capital Reserves</i>	Defisit / <i>Deficit</i>	Total / <i>Total</i>	Kepentingan Non-pengendali / <i>Non-controlling Interest</i>		Defisiensi Modal - Neto / <i>Capital Deficiency - Net</i>
Saldo 1 Januari 2022	4.252.541	2.488.871	(11.000)	50.623	618.931	5.672.905	-	(18.804.071)	(5.731.200)	(4.686)	(5.735.886)	<i>Balance as of January 1, 2022</i>
Rugi neto tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	(117.926)	(117.926)	(5.424)	(123.350)	<i>Net loss for the year</i>
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:	-	-	-	-	-	-	-	2.409	2.409	-	2.409	<i>Other comprehensive income for the year</i>
Saldo 31 Desember 2022	4.252.541	2.488.871	(11.000)	50.623	618.931	5.672.905	-	(18.919.588)	(5.846.717)	(10.110)	(5.856.827)	<i>Balance as of December 31, 2022</i>
Saldo 1 Januari 2023	4.252.541	2.488.871	(11.000)	50.623	618.931	5.672.905	-	(18.919.588)	(5.846.717)	(10.110)	(5.856.827)	<i>Balance as of January 1, 2023</i>
Rugi neto tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	51.106	51.106	(43.287)	7.819	<i>Net loss for the year</i>
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:	-	-	-	-	-	-	-	(35.394)	(35.394)	-	(35.394)	<i>Other comprehensive income for the year:</i>
Saldo 31 Desember 2023	4.252.541	2.488.871	(11.000)	50.623	618.931	5.672.905	-	(18.903.877)	(5.831.006)	(53.398)	(5.884.403)	<i>Balance as of December 31, 2023</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023**
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
AS OF DECEMBER 31, 2023**
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	62.033	44.864	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok dan aktivitas operasional lainnya	(52.325)	(19.349)	Cash paid to suppliers and other operating activities
Pembayaran kepada karyawan	(20.327)	(29.794)	Cash paid to employees
Pembayaran beban keuangan (Pembayaran)/Penerimaan pajak	(50)	(15)	Payment of financing charges (Payment)/Receipt of taxes
Penerimaan bunga	2.178	783	Receipt of interest
(Pembayaran)Penerimaan lainnya	11	13	Others receipt
	<u>6.923</u>	<u>878</u>	
Kas Neto Diperoleh (Dibayarkan) dari/untuk Aktivitas Operasi	<u>(1.558)</u>	<u>(2.620)</u>	Net Cash Flows Received (Paid) from/for Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian aset tetap	(10.110)	(129)	Purchase fixed assets
Arus Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	<u>(10.110)</u>	<u>(129)</u>	Net cash Flows Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang hubungan istimewa	13.763	-	Due to related parties
Arus Kas Bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>13.763</u>	<u>-</u>	Net cash Flows received from financing activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	2.095	(2.749)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	<u>404</u>	<u>3.153</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	<u><u>2.499</u></u>	<u><u>404</u></u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Bakrie Telecom Tbk (dahulu PT Radio Telepon Indonesia) ("Perusahaan") didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 13 Agustus 1993 dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1970 berdasarkan Akta Notaris No. 94 oleh Muhani Salim, S.H., sebagaimana diperbaiki dengan Akta Notaris Pembetulan No. 13 tanggal 5 November 1993 dan diubah dengan Akta Notaris No. 129 tanggal 27 November 1993, keduanya dibuat oleh Abdurachman Kadir, S.H., Notaris pengganti dari Muhani Salim, S.H.

Status Perusahaan mengalami perubahan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana tertuang dalam resolusi para pemegang saham yang berkekuatan sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 6 tanggal 3 Februari 2006 yang dibuat oleh Agus Madjid, S.H. Dimana perubahan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana tertuang dalam surat No. C-03880 HT.01.04.TH.2006, tanggal 13 Februari 2006.

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi penyelenggaraan jasa telekomunikasi nasional dengan daerah operasi saat ini di Jakarta. Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat berlokasi di Wisma Bakrie, Lantai 3, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta Selatan. Perusahaan memulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 November 1995.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 Agustus 2008, ruang lingkup kegiatan Perusahaan telah diperluas yang meliputi; merencanakan, membangun dan menyewakan sarana / fasilitas telekomunikasi, melaksanakan kegiatan pemasaran dan penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi, melakukan pemeliharaan, penelitian dan pengembangan sarana telekomunikasi, serta memperdagangkan perangkat / produk telekomunikasi.

1. GENERAL

a. Company Establishment

PT Bakrie Telecom Tbk (previously PT Radio Telepon Indonesia) ("the Company") was established in the Republic of Indonesia on August 13, 1993 within the framework of the Domestic Investment Law No. 6 Year 1968, as amended by Law No. 12 Year 1970 based on Notarial Deed No. 94, of Muhani Salim, S.H., as amended by Amendment Notarial Deed No. 13 dated November 5, 1993 and amended by Notarial Deed No. 129 dated November 27, 1993, both made of Abdurachman Kadir, S.H., substitute of Notary Muhani Salim, S.H.

The Company's status was changed to that of a public company through the resolutions of the Company's shareholders as notarized by Deed No. 6 of Agus Madjid, S.H., dated February 3, 2006. This change was reported to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and was accepted and recorded by the Directorate General of General Law Administration per letter No. C-03880 HT.01.04.TH.2006 dated February 13, 2006.

The scope of activities of the Company comprises the provision of telecommunication national services. The Company's operational areas currently in Jakarta. The Company is domiciled in Jakarta with its head office located at Wisma Bakrie, 3rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1, South Jakarta. The Company started its commercial operations on November 1, 1995.

Based on the Extraordinary General Shareholders Meeting held on August 11, 2008, the scope of activities of the Company was modified to comprise; planning, development and lease of telecommunication equipment / facilities, marketing and sales activities of telecommunication network and/or services, maintenance, research and development of telecommunication facilities, and selling of telecommunication products / utilities.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sehubungan dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peningkatan modal dasar ditempatkan Perusahaan, yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 29 Mei 2015, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 dan No. 28 masing-masing tertanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H.

Perubahan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana tertuang dalam surat No.AHU-0940316.AH.01.02. TAHUN 2015 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 98 Tambahan No. 43892 tanggal 6 November 2015, tanggal 7 Agustus 2015.

Untuk saat ini Perusahaan memiliki ijin jasa koneksi internet (*Internet Service Provider/ISP*) dan ijin jasa teleponi dasar melalui jaringan bergerak seluler.

Pada tanggal 26 September 2014, Perusahaan memperoleh persetujuan pengalihan izin penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 800 MHz PT Bakrie Telecom Tbk kepada PT Smartfren Telecom Tbk, berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 932/KEP/M.KOMINFO/09/2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular.

Perusahaan tergabung dalam Kelompok Usaha Bakrie.

b. Penawaran Umum Saham Perdana

Pada tanggal 3 Februari 2006, Perusahaan mencatat sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Penawaran Umum Perdana Saham Seri B Atas Nama Tahun 2005 sebanyak lima miliar lima ratus juta (5.500.000.000) saham dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) per saham.

1. GENERAL (continued)

a. Company Establishment (continued)

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment in relation to the Company's Articles of Association that have been adapted to the Financial Services Authority (OJK) rules and the increase of authorized capital issued was based on Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 29, 2015, as stated in Deed of Resolution No. 27 and No. 28 which dated June 22, 2015 made before Lenny Janis Ishak, S.H., Notary.

This change was reported to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and was accepted and recorded by the Directorate General of General Law Administration per letter No. AHU-0940316.AH.01.02. TAHUN 2015 and was published in the State Gazette No. 98, Supplement No. 43892 dated November 6, 2015, dated August 7, 2015.

The Company's currently has internet service provider lisenca/ISP and basic telephony services true mobile seluler network.

On September 26, 2014, the Company obtained approval permits for transfer the radio frequency spectrum bandwidth 800 MHz of PT Bakrie Telecom Tbk to PT Smartfren Telecom Tbk, based on Decision Letter of the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia No. 932/KEP/M.KOMINFO/09/2014 in respect to Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 30 Year 2014 concerning Settlement 800 MHz Radio Frequency Band the Purpose of Implementation of Cellular Mobile Network.

The Company is part of the Bakrie Group.

b. Initial Public Offering

On February 3, 2006, the Company listed its shares on the Indonesia Stock Exchange (BEI) through an Initial Public Offering (IPO) of five billion five hundred million (5,500,000,000) registered Shares Series B in Year 2005 with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Perdana (lanjutan)

Dalam rangka penawaran umum perdana ini, Perusahaan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak satu miliar seratus juta (1.100.000.000) lembar Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma yang menyertai seluruh saham Seri B atas nama. Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Seri B atas nama dengan harga pelaksanaan sebesar seratus tiga puluh lima rupiah (Rp135) setiap saham yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 3 Agustus 2006 sampai 2 Februari 2009.

Pada bulan Maret 2009, semua waran telah selesai dilaksanakan.

Penawaran Umum Saham Perdana tersebut disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 23 September 2005 dan dituangkan dalam Akta Notaris No. 39 oleh Agus Madjid, S.H.

c. Penawaran Umum Terbatas (PUT)

Pada tanggal 14 Februari 2008, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari Ketua Otoritas Jasa keuangan melalui surat No. S-944/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008 atas Penawaran Umum Terbatas (PUT) sebanyak-banyaknya delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua (8.638.079.352) saham Seri B dengan nilai nominal sebesar seratus rupiah (Rp100) setiap saham yang ditawarkan dengan harga penawaran sebesar tiga ratus lima puluh rupiah (Rp350). PUT tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 15 Februari 2008 dengan Akta Notaris No. 38 oleh Agus Madjid, S.H., dan pada tanggal 29 Februari 2008, PUT tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

d. Pembelian kembali (buy-back) Saham Perusahaan

Pada tanggal 15 Oktober 2008, Direksi menyetujui pembelian kembali saham yang beredar Perusahaan sampai jumlah maksimum sebanyak satu koma satu triliun rupiah (Rp1,1 triliun) atau 20% dari modal disetor Perusahaan.

1. GENERAL (continued)

b. Initial Public Offering (continued)

For the purposes of this public offering, the Company also simultaneously issued one billion one hundred million (1,100,000,000) Series I Warrants that were issued at no cost (naked warrants) accompanying the registered Series B shares. Series I Warrants gave the right to their holders to purchase Series B shares at an exercise price of one hundred and thirty-five rupiah (Rp135) per share, which could be exercised within the period of August 3, 2006 to February 2, 2009.

In March 2009, all warrants had been accomplished.

The IPO was approved by the Extraordinary Shareholders' General Meeting held on September 23, 2005 and notarized by Deed No. 39 of Agus Madjid, S.H.

c. Rights Issue

On February 14, 2008, the Company obtained the notice of effectiveness from the Chairman of the Financial Services Authority per letter No. S-944/BL/2008 dated February 14, 2008 of its Rights Issue for a maximum of eight billion, six hundred thirty-eight million, seventy-nine thousand, three hundred fifty-two (8,638,079,352) Series B shares with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share which were offered at three hundred fifty rupiah (Rp350) per share. The Rights Issue, which was approved by the Extraordinary Shareholders' General Meeting held on February 15, 2008 and notarized by Deed No. 38 of Agus Madjid, S.H., was listed on the Indonesia Stock Exchange on February 29, 2008.

d. Buy-Back of the Company's Shares of Stock

On October 15, 2008, the Board of Directors approved the buy-back of the Company's shares up to a maximum of one point one trillion rupiah (Rp1.1 trillion) or 20% of the paid-in capital of the Company.

1. UMUM (lanjutan)

d. Pembelian kembali (buy-back) Saham Perusahaan (lanjutan)

Pembelian kembali saham tahap pertama akan dilakukan sebesar-besarnya seratus miliar rupiah (Rp100,0 miliar) dan pembelian kembali saham tahap kedua akan dilakukan sesuai dengan kemampuan, keperluan dan kondisi Perusahaan. Pembelian kembali dilaksanakan dalam periode Oktober dan November tahun 2008, dimana sebanyak enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus (689.425.500) lembar saham telah dibeli kembali, dan pada tahun 2009, sebanyak lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus (579.425.500) lembar saham telah dijual kembali (Catatan 17).

e. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD)

Pada tanggal 22 Juni 2012 dan 29 Agustus 2012, Perusahaan menerbitkan saham Seri B dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) per saham masing-masing sebesar lima ratus enam puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam (566.037.736) saham dan satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh (1.536.135.340) saham, untuk PT Bakrie Global Ventura, pihak berelasi melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD) dengan harga pelaksanaan dua ratus enam puluh lima rupiah (Rp265) per saham.

f. Struktur Entitas Anak

1. Kepemilikan Langsung

a. PT Bakrie Connectivity

Pada tanggal 11 Maret 2010, berdasarkan Akta Notaris No. 03 dibuat oleh Dheasy Suzanti, S.H., M.Kn., Perusahaan mendirikan Entitas Anak yang bernama PT Bakrie Connectivity.

Ruang lingkup kegiatan Entitas Anak meliputi usaha perdagangan produk dan/atau perangkat telekomunikasi, jasa teknologi informasi, jasa penyedia dan pemanfaatan multimedia dan jasa pengadaan sumber daya manusia, telekomunikasi serta media cetak.

1. GENERAL (continued)

d. Buy-Back of the Company's Shares of Stock (continued)

The buy-back of shares of stock in the first phase worth of up to one hundred billion rupiah (Rp100.0 billion) and the second phase of the balance will be carried out according to the availability, needs and condition of the Company. The buy-back was undertaken during the period of October and November 2008, during which time six hundred eighty-nine million, four hundred twenty-five thousand, five hundred (689,425,500) shares were bought back, and in 2009, five hundred seventy-nine million, four hundred twenty-five thousand, five hundred (579,425,500) shares were reissued (Note 17).

e. Capital Stock Issuance Through Non-Preemptive Right (PMT-HMETD)

On June 22, 2012 and August 29, 2012, the Company issued Series B shares with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share amounting to five hundred sixty-six million, thirty-seven thousand, seven hundred thirty-six (566,037,736) shares and one billion, five hundred thirty-six million, one hundred thirty-five thousand, three hundred forty (1,536,135,340) shares, respectively, to PT Bakrie Global Ventura, a related party through Capital Stock Issuance Without Preemptive Right (PMT-HMETD) at an exercise price of two hundred sixty-five rupiah (Rp265) per share.

f. Structure of the Subsidiaries

1. Direct Ownership

a. PT Bakrie Connectivity

On March 11, 2010, based on Notarial Deed No. 03, of Dheasy Suzanti, S.H., M.Kn., the Company established a Subsidiary, PT Bakrie Connectivity.

The scope of its Subsidiary activities consists of trading of products and/or telecommunications equipment, services as information technology service providers, and the use of multimedia and human resources services, telecommunications and media.

1. UMUM (lanjutan)

f. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

b. PT Anugerah Andalan Investama (AAI)

Pada tanggal 16 Juni 2016, berdasarkan Akta Notaris No. 09 dibuat oleh Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn., Perusahaan mendirikan Entitas Anak yang bernama PT Anugerah Andalan Investama (AAI).

Ruang lingkup kegiatan AAI adalah meliputi perdagangan produk dan jasa berbasis internet, *internet provider*, jasa penyediaan sumber daya manusia, jasa televisi berbayar, jasa multimedia, dan jasa media cetak dan elektronik.

c. PT Mitra Kreasi Komunika (MKK)

Pada tanggal 27 Desember 2016 berdasarkan Akta Notaris No. 22 yang kemudian ditegaskan kembali dengan Akta Notaris No. 15 tanggal 24 Januari 2017 yang keduanya dibuat oleh Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn., AAI telah mengambil alih saham-saham pada PT. Mitra Kreasi Komunika (MKK).

Ruang lingkup kegiatan MKK adalah meliputi perdagangan barang dan jasa antara lain perdagangan alat-alat telekomunikasi, elektronik, jasa pembangunan instalasi telekomunikasi, industri barang-barang elektronik, jasa penerbitan dan desain grafis, jasa teknologi informasi dan internet konten serta jasa multimedia.

2. Kepemilikan Tidak Langsung

a. PT Layanan Prima Digital (LPD)

MKK adalah selaku pemegang saham pada PT. Layanan Prima Digital (LPD) berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 31 Agustus 2016 yang kemudian ditegaskan kembali melalui Akta Notaris No. 2 tanggal 28 Oktober 2016 yang keduanya dibuat oleh Firdhonal S.H.

Ruang lingkup kegiatan LPD meliputi perdagangan barang-barang elektronik dan telekomunikasi serta peralatan jaringan, penyediaan jasa internet dan multimedia, jasa televisi berbayar, jasa telekomunikasi, jasa publikasi dan penyiaran, jasa *e-commerce* dan jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi dan jasa-jasa terkait lainnya.

1. GENERAL (continued)

f. Structure of the Subsidiaries (continued)

b. PT Anugerah Andalan Investama (AAI)

On June 16, 2016, based on Notarial Deed no. 09 of Ervina Christina Sembiring, S.H.,M.Kn. The Company established a Subsidiary, PT Anugerah Andalan Investama (AAI).

The scope of AAI consist of trading and services internet product, internet provider, human resources services, subscription television services, multimedia services, and printing and electronic media services.

c. PT Mitra Kreasi Komunika (MKK)

On December 27, 2016, based on Notarial Deed No. 22 reaffirmed with Notarial Deed No. 15 dated January 24, 2017 of Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn, both of them, AAI has taken over PT. Mitra Kreasi Komunika (MKK) shares.

The scope of MKK consist of trading goods and services such as telecommunication equipment, electronic, develop telecommunication instalation, electronic goods, services publications and graphic design, information technology services, and internet content with multimedia services.

2. Indirect Ownership

a. PT Layanan Prima Digital (LPD)

MKK as a shareholders at PT. Layanan Prima Digital (LPD) based on Notarial Deed No. 8 dated August 31, 2016 reaffirmed with Notarial Deed No.2 dated October 28, 2016 of Firdhonal S.H both of them.

The scope of LPD consist of trading electronic telecommunication goods with and network equipment, internet and multimedia services provider, subscription television services, telecommunication services, publication and broadcasting services, e-commerce services, and multimedia services and utilize through the telecommunication and others related services.

1. UMUM (lanjutan)

f. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

b. PT Inovasi Teknologi Nusantara (ITN)

MKK adalah pemegang saham pada PT. Inovasi Teknologi Nusantara (ITN) berdasarkan Akta Notaris No. 48 tanggal 30 November 2019 yang kemudian ditegaskan kembali melalui Akta Notaris No. 58 tanggal 27 Desember 2019 yang keduanya dibuat oleh Ervina Christina S, S.H., M.Kn.

Ruang lingkup kegiatan ITN dalam bidang perdagangan dan industri meliputi alat-alat telekomunikasi, informatika dan multimedia. Dalam bidang multimedia dan telekomunikasi meliputi pembangunan sarana-prasarana jaringan telekomunikasi dan multimedia. Dalam bidang jasa perawatan meliputi perbaikan dan pemeliharaan alat-alat komunikasi dan multimedia dan jasa pemeliharaan jaringan telekomunikasi.

Dalam bidang jasa teknologi informasi dan *internet content* meliputi jasa televisi berbayar, televisi berlangganan, jasa akses internet, dan jasa interkoneksi internet.

c. PT Viva Teknologi Integra (Vivat)

Pada tanggal 30 April 2021 berdasarkan Akta Notaris No 12 tanggal 30 April 2021 yang dibuat oleh Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn, AAI, ITN telah mengambil alih saham-saham pada PT. Cakra Andalas Fasilitas (CAF) yang bergerak antara lain dibidang layanan infrastruktur media. ITN menjadi pemegang saham pengendali dari CAF.

Pada tanggal 31 Maret 2023 dengan Akta No 89 di hadapan Notaris Notaris Ervina Christina S, S.H., M.Kn yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.09-0099988 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023, mengubah nama Perusahaannya yang semula PT Cakra Andalas Fasilitas menjadi PT Viva Teknologi Integra.

1. GENERAL (continued)

f. Structure of the Subsidiaries (continued)

b. PT Inovasi Teknologi Nusantara (ITN)

MKK as a shareholders at PT. Inovasi Teknologi Nusantara (ITN) based on Notarial Deed No. 48 dated November 30, 2019 reaffirmed with Notarial Deed No. 58 dated December 27, 2019 of Ervina Christina S, S.H., M.Kn both of them.

The scope of ITN in trading and industry consist of telecommunication goods, informatika and multimedia. In multimedia and telecommunication consists of telecommunications and multimedia network infrastructure construction. In maintenance services consist of repair and maintenance of communication and multimedia telecommunications network maintenance services.

In information technology services and internet content consist of pay television services, pay television, internet access services, and internet interconnection services.

c. PT Viva Teknologi Integra (Vivat)

On April 30, 2021, based on Notarial Deed no. 12 dated April 30, 2021 drawn up by Ervina Christina Sembiring, S.H.,M.Kn. ITN has acquried the shares of PT. Cakra Andalas Fasilitas (CAF) a company dealing in among others media infrastructure services. ITN is the controlling shareholder of CAF.

on March 31, 2023 with Deed No. 89 before Notary Ervina Christina S, S.H., M.Kn which has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No.AHU-AH.01.09-0099988 of 2023 dated March 13, 2023, its has changed the name of the company which was originally PT Cakra Andalas Fasilitas to PT Viva Teknologi Integra.

1. UMUM (lanjutan)

f. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

d. PT Sangads Digital Pariwara (SDP)

Pada tanggal 17 Juni 2021 berdasarkan Akta Notaris No 24 tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat oleh Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn, AAI , ITN bersama pemegang saham lainnya membentuk atau mendirikan perusahaan PT. Sangads Digital Pariwara (SDP) yang bergerak antara lain dibidang agensi periklanan digital. ITN menjadi pemegang saham pengendali dari SDP.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki Entitas Anak dengan kepemilikan sebagai berikut (selanjutnya secara bersama-sama dengan Perusahaan disebut sebagai "Kelompok Usaha"):

1. GENERAL (continued)

f. Structure of the Subsidiaries (continued)

d. PT Sangads Digital Pariwara (SDP)

On June 17, 2021, based on Notarial Deed no. 24 dated June 17, 2021 drawn up by Ervina Christina Sembiring, S.H.,M.Kn. ITN are with other shareholders formed or established PT. Sangads Digital Pariwara (SDP) a company dealing in among others digital advertising agency ITN is the controlling shareholder of SDP.

As of December 31, 2023, the Company had ownership interest in Subsidiaries as follows (together with the Company herein after referred to as the "Group"):

<u>Entitas Anak / Subsidiaries</u>	<u>Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership (%)</u>	<u>Bidang Usaha / Scope of Activities</u>	<u>Saat Dimulainya Kegiatan Usaha Komersial / Start of Commerial Operation</u>	<u>Domisili / Domicile</u>	<u>Total Aset Sebelum Eliminasi / Total Asset Before Elimination</u>
Kepemilikan Langsung / Direct Ownership :					
PT Bakrie Connectivity	99,99	Perdagangan Telekomunikasi / Telecommunication Trading	2010	Indonesia	21
PT Anugerah Andalan Investama	99,80	Perdagangan dan Jasa / Trading and Services	2016	Indonesia	15.660
Melalui / Through AAI PT Mitra Kreasi Komunika	70,00	Perdagangan dan Jasa / Trading and Services	2016	Indonesia	2.011
Melalui / Through MKK PT Layanan Prima Digital	75,07	Perdagangan dan Telekomunikasi / Trading and Telecommunicaton	2016	Indonesia	5.903
PT Inovasi Teknologi Nusantara	99,87	Perdagangan dan Jasa / Trading and Services	2016	Indonesia	37.240

1. UMUM (lanjutan)

f. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

Entitas Anak / Subsidiaries	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership (%)	Bidang Usaha / Scope of Activities	Saat Dimulainya Kegiatan Usaha Komersial / Start of Commercial Operation	Domisili / Domicile	Total Aset Sebelum Eliminasi / Total Asset Before Elimination
Kepemilikan Tidak Langsung / Indirect Ownership :					
Melalui / Through ITN					
PT Sangads Digital Pariwara	40,00	Agensi Periklanan Digital / Digital Advertising Agency	2021	Indonesia	2.078
PT Viva Teknologi Integra (d/h Cakra Andalas Fasilitas)	45,00	Layanan Infrastruktur Media / Media Infrastructure Services	2021	Indonesia	57.677

1. GENERAL (continued)

f. Structure of the Subsidiaries (continued)

g. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit serta
Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

g. Boards of Commissioners, Directors and Audit
Committee and Employees

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2023 and 2022 was as follows:

31 Desember / December 31, 2023		31 Desember / December 31, 2022	
Dewan Komisaris		Board of Commissioners	
Komisaris Utama	Taufan E.N Rotorasiko	Taufan E.N Rotorasiko	President Commissioner
Komisaris	Jastiro Abi	Jastiro Abi	Commissioner
Komisaris	Neil Ricardo Tobing	Neil Ricardo Tobing	Commissioner Independent
Komisaris Independen	John Pieter Nazar	John Pieter Nazar	Commissioner
Dewan Direksi		Board of Directors	
Direktur Utama	Harya Mitra Hidayat	Harya Mitra Hidayat	President Director
Wakil Direktur Utama	Andi Pravidia Saliman	Andi Pravidia Saliman	Vice President Director
Direktur	Aditya Irawan	Aditya Irawan	Director
Direktur	Agustinus Harimurti	Agustinus Harimurti	Director

Susunan Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee and the sole Corporate Secretary as of December 31, 2023 and 2022 was as follows:

1. UMUM (lanjutan)

g. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit serta Karyawan (lanjutan)

**31 Desember / December 31,
2023**

Komite Audit

Ketua

John Pieter Nazar

Anggota

Arydhian B Djamin

Anggota

Dwi Winarno

Sekretaris Perusahaan

Purwoko Suatmadji

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah karyawan Kelompok Usaha masing-masing adalah 689 dan 204 karyawan (tidak diaudit).

h. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2024.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tertanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kecuali untuk penerapan pernyataan dan interpretasi baru dan revisi yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024 seperti yang diungkapkan dalam kebijakan akuntansi terkait.

1. GENERAL (continued)

g. Boards of Commissioners, Directors and Audit Committee and Employees (continued)

**31 Desember / December 31,
2022**

Audit Committee

Chairman

Member

Member

Corporate Secretary

As of December 31, 2023 and 2022, the Group had 689 and 204 employees, respectively (unaudited).

h. Completion of the Consolidated Financial Statements

The management of the Company is responsible for the preparation of these consolidated financial statements which have been authorized for issue by the Board of Directors on June 24, 2024.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements and Statement of

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants, and the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies issued by the Financial Services Authority (OJK).

The accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are consistent with the accounting policies in the preparation of the Company's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2023, except for the adoption of new and revised statements and interpretations effective January 1, 2024 as described in the related accounting policies.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Standar akuntansi revisian berikut, yang relevan untuk kelompok usaha, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan tidak memiliki pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian kelompok usaha:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap"
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan relevan untuk kelompok usaha berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 dan belum diterapkan secara dini oleh kelompok usaha:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amendemen PSAK 73 "Sewa"
- Amendemen PSAK 2 "Laporan arus kas" dan Amendemen PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan: Pengaturan Pembiayaan Pemasok"

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025:

- PSAK 74 Kontrak Asuransi
- PSAK 74 (amendemen) Kontrak Asuransi: Penerapan awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif
- PSAK 10 (amandemen) Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing : Kekurangan Ketertukaran

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar-standar tersebut, terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements and Statement of Compliance (continued)

The following revised accounting standards, which are relevant to the Group, are effective from 1 January 2023 and do not result in material impact to the Group's consolidated financial statements:

- Amendment to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements"
- Amendment to PSAK 16 "Fixed Assets"
- Amendment to PSAK 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"
- Amendment to PSAK 46 "Income Tax"

The following revised accounting standards issued and relevant to the Group are effective from 1 January 2024 and have not been early adopted by the Group:

- Amendment to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements"
- Amendment to PSAK 73 "Leases"
- Amendment to PSAK 2 "Statement of cash flows" and Amendment to PSAK 60 "Financial Instruments: Disclosures: Supplier Finance Arrangements"

Effective for periods beginning on or after January 1, 2025:

- PSAK 74 Insurance Contracts
- PSAK 74 (amendment) Insurance Contracts: Initial application of PSAK 74 and PSAK 71 - Comparative Information
- PSAK 10 (amendment) The effects of changes in foreign exchange rates: Lack of Exchangeability

As at the authorization date of these consolidated financial statements, the Company is assessing the implication of the above standards, to the Company's consolidated financial statements.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang dicatat berdasarkan basis lain seperti yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dan dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Ketika Kelompok Usaha menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika Kelompok Usaha mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya maka laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif disajikan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian". Dengan diterbitkannya PSAK tersebut, PSAK No. 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri" diubah namanya menjadi PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri", dan juga menggantikan ISAK No. 7, "Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus".

Penerapan PSAK No. 65 tidak berdampak dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

Perusahaan (entitas induk) yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain (entitas anak) menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Investor, terlepas dari sifat keterlibatannya dengan entitas (*investee*) menentukan apakah investor merupakan entitas induk dengan menilai apakah investor tersebut mengendalikan *investee*.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements and Statement of Compliance (continued)

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on an accrual basis of accounting using the historical cost concept, except for certain accounts that are measured on the other basis described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method, and classified into operating, investing, and financing activities.

When the Group adopts accounting policy retrospectively or restates items in its financial statements or the Group reclassified the items in its financial statements, the statements of financial position at the beginning of comparative period are presented.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah ("Rp"), which is also the functional currency of the Company and its Subsidiaries.

b. Principles of Consolidation

Effective January 1, 2015, the Group applied PSAK No. 65, "Consolidated Financial Statements." With the issuance of such PSAK, PSAK No. 4 (Revised 2009), "Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements" was renamed to PSAK No. 4 (Revised 2013), "Separate Financial Statements," and ISAK No. 7, "Consolidation - Special Purpose Entities" was superseded.

The adoption of PSAK No. 65 has no impact in the Group's consolidated financial statements.

The Company (the parent) that controls one or more other entities (subsidiaries) were present consolidated financial statements. Investors, apart of the nature of its involvement with an entity (investee), determine whether the investor is a parent by assessing whether the investor controls the investee.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Investor mengendalikan *investee* ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

- (a) kekuasaan atas *investee*,
- (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- (c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Investor menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga (3) elemen pengendalian.

Konsolidasi atas *investee* dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas *investee* dan berakhir ketika investor kehilangan pengendalian atas *investee*.

Entitas induk menentukan apakah entitas induk adalah entitas investasi. Entitas investasi adalah entitas yang:

- (a) memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi;
- (b) menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya; dan
- (c) mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya berdasarkan nilai wajar.

Entitas induk yang adalah entitas investasi mengukur investasi dalam entitas anak pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Principles of Consolidation (continued)

An investor controls an investee when it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.

Therefore, the investor controls the investee if and only if the investor has all of the following:

- (a) power over the investee,
- (b) exposure or rights to variable returns from its involvement with the investee, and
- (c) the ability to use its power over the investee to affect the amount of the investor's returns.

Investors reassess whether the investor controls the investee if facts and circumstances indicate that one or more of the three (3) control elements have changed.

Investee is consolidated from the date of the investor obtains control of investee and continues to be consolidated until the date that such control ceases.

A parent determines whether the parent entity is an investment entity. An investment entity is an entity that:

- (a) obtains funds from one or more investors for the purpose of providing investment management services;
- (b) its business purpose is to invest funds solely for returns from capital appreciation, investment income, or both; and
- (c) measures and evaluates the performance of its investments on a fair value basis.

A parent that is an investment entity measures its investments in particular subsidiaries at fair value through profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Kepentingan non-pengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto yang tidak diatribusikan kepada entitas induk dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dipisahkan dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk.

Seluruh penghasilan komprehensif diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan non-pengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non-pengendali mempunyai saldo defisit.

Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi.

Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk:

- (a) menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian.
- (b) mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian, dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu. Nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan atau (jika sesuai) biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.
- (c) mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga (3) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Principles of Consolidation (continued)

Non-controlling interest represents a portion of the profit or loss and net assets not attributable to the parent and is presented separately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, and within equity in the consolidated statements of financial position, separately from equity attributable to the parent.

Total comprehensive income is attributed to the owners of the parent and to the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

All significant intercompany transactions and balances have been eliminated.

If a parent loses control of a subsidiary, the parent:

- (a) derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the former subsidiary from the consolidated statements of financial position.*
- (b) recognizes any investment retained in the former subsidiary at its fair value at the date when control is lost, and subsequently accounts for it and for any amounts owed by or to the former subsidiary. That fair value shall be regarded as the fair value on initial recognition of a financial asset or, when appropriate, the cost on initial recognition of an investment in an associate or joint venture.*
- (c) recognizes the gain or loss associated with the loss of control attributable to the former controlling interest.*

c. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, and time deposits with original maturities within three (3) months or less and not pledged as collateral nor restricted in use.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Kelompok Usaha mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga ataupun tidak, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

e. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*lower of cost or net realizable value*), dimana biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan atas keadaan persediaan pada akhir tahun.

f. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

g. Aset Tetap

Kelompok Usaha telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus selama umur manfaat aset. Taksiran masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Transaction with Related Parties

The Group discloses transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures."

The transactions are made based on terms agreed by the parties, whereas such terms may not be the same as those transactions with unrelated parties.

All significant transactions with related parties whether or not conducted under the same terms and conditions as those with third parties, are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

e. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value (NRV), whereby cost is determined by the weighted-average method. Allowance for inventory obsolescence is provided based on a review of the condition of inventories at the end of the year.

f. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

g. Fixed Asset

The Group has chosen the cost model as the accounting policy for its fixed assets measurement.

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the useful lives of the assets. Estimated useful lives of the assets are as follows:

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(continued)

g. Aset Tetap (lanjutan)

g. Fixed Asset (continued)

	<u>Tahun / Years</u>	
Bangunan	20	Building
Peralatan telekomunikasi	5	Telecommunication equipment
Fasilitas telekomunikasi	5	Telecommunication facilities
Peralatan pengangkutan	5	Transportation equipment
Peralatan dan perabot kantor	4-5	Office equipment and fixtures
Aset sewaan	10	Leased assets

Masa manfaat ekonomis aset tetap dan metode depresiasi ditelaah, dan disesuaikan jika sesuai keadaan, pada setiap akhir periode pelaporan.

The fixed assets' useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted if appropriate, at each end of the reporting period.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Kelompok Usaha mengestimasi taksiran sisa manfaat ekonomis peralatan dan fasilitas telekomunikasi menjadi lima (5) tahun. Sebelum tahun 2014, masa manfaat aset tersebut adalah 10 (sepuluh) tahun.

As of December 31, 2015 and 2014, the Group estimated the remaining useful life of telecommunication equipment and facilities to be five (5) years. Prior 2014, the useful lives of those assets were 10 (ten) years.

Tanah dinyatakan sebesar nilai perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and is not depreciated.

Aset dalam pengerjaan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Assets under construction are stated at cost and presented as part of "Fixed Assets" in the consolidated statements of financial position. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account when construction is completed and the assets are ready for their intended use.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya; biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Kelompok Usaha, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred; replacement or major inspection costs are capitalized when incurred if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be reliably measured. An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset is included in profit or loss in the period the asset is derecognized.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

h. Sewa

Kelompok Usaha telah menerapkan PSAK 73 “Sewa” sejak tanggal 1 Januari 2020.

PSAK 73 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi *lessee* dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak-guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali:

- sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- sewa atas aset dengan nilai rendah.

Berbeda dengan akuntansi *lessee*, persyaratan untuk akuntansi *lessor* sebagian besar tidak berubah. Dampak dari adopsi PSAK 73 pada laporan keuangan konsolidasian dijelaskan di bawah ini.

Tanggal penerapan awal PSAK 73 untuk Kelompok Usaha adalah 1 Januari 2020. Kelompok Usaha telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui dampak kumulatif dari awal penerapan PSAK 73.

a. Dampak definisi baru dari sewa

Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep pengendalian. PSAK 73 menentukan apakah kontrak mengandung sewa atas dasar jika terdapat aset identifikasi dan *lessee* memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal tersebut merupakan perbedaan penentuan kontrak merupakan, atau mengandung sewa berdasarkan PSAK 30 yaitu dengan konsep risiko dan manfaat.

b. Dampak pada akuntansi *lessee*

Kelompok Usaha menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Kelompok Usaha mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Lease

The Group has applied PSAK 73 “Lease” since 1 January, 2020.

PSAK 73 introduces new or amended requirements with respect to lease accounting. This standard introduces significant changes to lessee accounting by removing the distinction between operating and finance lease, and requiring the recognition of a right-of-use asset and a lease liability at commencement for all leases, except for:

- Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option;
- Leases of low value assets.

In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting have remained largely unchanged. The impact of the adoption of PSAK No. 73 on the consolidated financial statements is described below.

The date of initial application of PSAK 73 for the Group is January 1, 2020. The Group has applied PSAK 73 using the modified retrospective approach by recognizing the cumulative impact of the initial application of PSAK 73.

a. Impact of the new definition of a lease

The major change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. PSAK 73 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether identified asset and lessee has the right to control the use of an asset for a period of time in exchange for consideration. This is in contrast to the focus or contain lease based on ‘risks and rewards’ concept in PSAK 30.

b. Impact on lessee accounting

The Group applies a single recognition and measurement approach to all leases, except for short-term leases and lowvalue asset leases. The Group recognized a lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets that represent the right to use the underlying asset.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

h. Sewa (lanjutan)

Kelompok Usaha mengakui liabilitas sewa sebesar jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Sedangkan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Kelompok Usaha pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak-guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK 48, "Penurunan Nilai Aset".

Sewa jangka pendek (dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan) dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK 30. Kelompok Usaha akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Beban ini dicatat pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

Penerapan pencatatan PSAK 73 berlaku untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelumnya), yaitu sebagai berikut:

- (a) Menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa disajikan sebagai bagian dari liabilitas lain-lain dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;
- (b) Mencatat penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian; dan

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Lease (continued)

The Group recognized lease liabilities at the amount of lease payments accrued to the end of the lease term which were discounted using the incremental borrowing rate.

While, the right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, restoration costs and lease payments on or before the start date of the lease, less lease incentives received. Right-of-use are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset.

If the ownership of lease asset is transferred to the Group at the end of the lease term or the lease payments reflect the exercise of the purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the assets. Right-of-use assets are tested for impairment in accordance with PSAK 48, "Impairment of Assets".

Short-term leases (with term of less or equal to 12 months) and leases of low-value assets, and elements of those leases, partially or entirely not applying the recognition principles stipulated by PSAK 73 will be treated the same as operating leases in PSAK 30. The Group will recognized these lease payments on a straight-line basis during the lease period in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. This expense is recorded under general and administrative expenses in profit or loss.

The recording of implementation of PSAK 73 is applied for all leases (except as stated earlier), as follows:

- (a) Presents right-of-use assets as part of fixed assets and lease liabilities presented as part of other liabilities in the consolidated statement of financial position which are measured at the present value of the future lease payments;*
- (b) Records depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income; and*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

h. Sewa (lanjutan)

(c) Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas konsolidasian.

i. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset".

PSAK No. 48 (Revisi 2014) menitikberatkan pada pengungkapan atas nilai terpulihkan untuk aset non-keuangan. Pernyataan yang direvisi mensyaratkan pengungkapan informasi tambahan jika jumlah terpulihkan merupakan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan.

Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Kelompok Usaha mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan.

Pemulihan rugi penurunan nilai untuk aset non-keuangan selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

Biaya pinjaman, baik yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai suatu proses pembangunan aset tertentu yang memenuhi syarat ("aset kualifikasian"), dikapitalisasi hingga saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Lease (continued)

(c) Separates the total amount of cash paid into principal (within financing activities) and interest (within operating activities) in the consolidated statement of cash flows.

i. Impairment of Non-Financial Assets

Effective January 1, 2015, the Group applied PSAK No. 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets".

PSAK No. 48 (Revised 2014) focuses on the recoverable amount disclosures for non-financial assets. The revised statement requires additional disclosure of information if the recoverable amount represents the fair value less costs of disposal.

The Group evaluates at each reporting date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group estimates the recoverable amount of the asset. The recoverable amount of an asset or a cash-generating unit is the higher of its fair value less costs of disposal and its value in use. Whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

Reversal on impairment loss for non-financial assets other than goodwill would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognized on profit or loss, except for assets that presented using the revaluation model in accordance with other PSAK. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

Borrowing costs, either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when construction is complete. For borrowings that are specific to the acquisition of a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the period, less any income earned from the temporary investment of such borrowings.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

j. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman, baik yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai suatu proses pembangunan aset tertentu yang memenuhi syarat ("aset kualifikasian"), dikapitalisasi hingga saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi tertentu terhadap pengeluaran untuk aset kualifikasian tersebut.

k. Jaminan

Jaminan merupakan uang jaminan yang dibayarkan untuk sewa lokasi untuk perangkat, sewa gedung kantor dan apartemen sesuai dengan perjanjian dan akan dikembalikan pada saat berakhirnya periode sewa.

l. Segmen Operasi

Pembuat keputusan operasional adalah Direksi. Direksi melakukan penelaahan terhadap pelaporan internal Perusahaan untuk menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Manajemen menentukan operasi segmen berdasarkan laporan ini. Direksi mempertimbangkan bisnis dari sudut pandang imbal hasil dari modal yang diinvestasikan.

Total aset dikelola secara tersentralisasi dan tidak dialokasikan. Perusahaan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu segmen yang menyediakan jaringan telekomunikasi kepada para pelanggan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Borrowing Costs

Borrowing costs, either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when construction is complete. For borrowings that are specific to the acquisition of a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the period, less any income earned from the temporary investment of such borrowings.

For borrowings that are not specific to the acquisition of a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expensed on the qualifying asset.

k. Security Deposits

Security deposits represent guarantee for site rental for equipment placement, office building rent and apartment rent in accordance with the agreements, which will be returned at the end of the rental period.

l. Operating Segment

The chief operating decision-maker is the Board of Directors. The Board of Directors reviews the Company's internal reporting in order to assess performance and allocate resources. Management has determined the operating segment based on these reports. The Board of Directors considers the business from the return of invested capital perspective.

Total assets are managed on a central basis and are not allocated. The Company operates and manages the business in a single segment that telecommunications network services to its customers

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

m. Saham Beredar Yang Diperoleh Kembali

Saham beredar yang diperoleh kembali (*treasury stock*) untuk dikeluarkan lagi di kemudian hari dicatat dengan metode nilai nominal atau *par value method*. Berdasarkan metode ini, saham beredar yang diperoleh kembali dicatat sebesar nilai nominalnya dan disajikan sebagai pengurang akun modal saham. Apabila saham beredar yang diperoleh kembali tersebut semula dikeluarkan dengan harga di atas nilai nominal, akun tambahan modal disetor akan disesuaikan. Selisih lebih harga perolehan dari harga penerbitannya akan dikoreksi ke saldo laba.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat, dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").

Beban diakui pada saat terjadinya.

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

PSAK 72 menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Standar ini menyediakan model lima langkah tunggal untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan. Standar ini juga memberikan panduan spesifik yang mensyaratkan jenis biaya tertentu untuk memperoleh dan/atau memenuhi kontrak yang akan dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan barang atau jasa yang terkait dengan biaya yang dikapitalisasi.

Kelompok Usaha mempertimbangkan apakah ada janji lain dalam kontrak yang merupakan kewajiban kinerja terpisah yang perlu dialokasikan sebagian dari harga transaksi (misalnya, jaminan, poin loyalitas pelanggan). Dalam menentukan harga transaksi untuk penjualan, Kelompok Usaha mempertimbangkan pengaruh pertimbangan variabel, keberadaan komponen pembiayaan yang signifikan, imbalan non tunai, dan imbalan yang harus dibayarkan kepada pelanggan (jika ada).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Treasury Stock

Re-acquisition of capital stock to be held as treasury stocks for future reissuance is accounted for under the par value method. Under this method, treasury stock is presented at par value as a reduction from the capital stock account. If the treasury stock had been originally issued at a price above par value, the related additional paid-in capital account is adjusted. Any excess of the reacquisition cost over the original issuance price is treated as an adjustment to retained earnings.

n. Revenue and Expense Recognition

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates, and Value Added Taxes ("VAT").

Expenses are recognized when they are incurred.

Revenue from contracts with customers

PSAK 72 establishes a comprehensive framework for determining how, when and how much income should be recognized. This standard provides for a single five-step model for the determination and recognition of revenue to apply to all contracts with customers. This standard also provides specific guidance requiring certain types of costs to acquire and/or fulfill contracts to be capitalized and amortized in a systematic manner consistent with transfers to customers of goods or services related to the costs being capitalized.

The Group considers whether there are other promises in the contract that are separate performance obligations to which a portion of the transaction price needs to be allocated (e.g., warranties, customer loyalty points). In determining the transaction price for the sales, the Group considers the effects of variable consideration, existence of a significant financing component, noncash consideration, and consideration payable to the customer (if any).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)

(i) **Konsiderasi variabel**

Jika imbalan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Kelompok Usaha mengestimasi jumlah imbalan yang menjadi haknya sebagai imbalan atas pengalihan barang kepada pelanggan.

Pertimbangan variabel diestimasi pada awal kontrak dan dibatasi hingga kemungkinan besar bahwa pembalikan pendapatan yang signifikan dalam jumlah pendapatan kumulatif yang diakui tidak akan terjadi ketika ketidakpastian terkait dengan pertimbangan variabel kemudian diselesaikan. Beberapa kontrak untuk penjualan memberi pelanggan hak untuk mengembalikan barang dalam jangka waktu tertentu.

Kelompok Usaha juga memberikan potongan volume retrospektif kepada pelanggan tertentu setelah jumlah yang dibeli selama periode tersebut melebihi ambang batas yang ditentukan dalam kontrak. Hak pengembalian dan rabat volume menimbulkan pertimbangan variabel.

Kelompok Usaha menerapkan metode jumlah yang paling mungkin atau metode nilai yang diharapkan untuk mengestimasi imbalan variabel dalam kontrak. Metode terpilih yang paling baik memprediksi jumlah pertimbangan variabel terutama didorong oleh jumlah ambang volume yang terkandung dalam kontrak. Jumlah yang paling mungkin digunakan untuk kontrak-kontrak dengan batasan volume tunggal, sedangkan metode nilai yang diharapkan digunakan untuk kontrak-kontrak dengan lebih dari satu batasan volume.

Kelompok Usaha kemudian menerapkan persyaratan tentang estimasi batasan atas pertimbangan variabel untuk menentukan jumlah pertimbangan variabel yang dapat dimasukkan dalam harga transaksi dan diakui sebagai pendapatan. Kewajiban pengembalian dana diakui untuk potongan harga di masa depan yang diharapkan (yaitu, jumlah yang tidak termasuk dalam harga transaksi).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(continued)

n. Revenue and Expense Recognition
(continued)

(i) **Variable consideration**

If the consideration in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it will be entitled in exchange for transferring the goods to the customer.

The variable consideration is estimated at contract inception and constrained until it is highly probable that a significant revenue reversal in the amount of cumulative revenue recognised will not occur when the associated uncertainty with the variable consideration is subsequently resolved. Some contracts for the sales provide customers with a right to return the goods within a specified period.

The Group also provides retrospective volume rebates to certain customers once the quantity purchased during the period exceeds the threshold specified in the contract. The rights of return and volume rebates give rise to variable consideration.

The Group applies either the most likely amount method or the expected value method to estimate the variable consideration in the contract. The selected method that best predicts the amount of variable consideration is primarily driven by the number of volume thresholds contained in the contract. The most likely amount is used for those contracts with a single volume threshold, while the expected value method is used for those with more than one volume threshold.

The Group then applies the requirements on constraining estimates of variable consideration in order to determine the amount of variable consideration that can be included in the transaction price and recognised as revenue. A refund liability is recognised for the expected future rebates (i.e., the amount not included in the transaction price).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)

(ii) Komponen biaya signifikan

Terdapat komponen pembiayaan yang signifikan untuk kontrak-kontrak ini mengingat lamanya waktu antara pembayaran pelanggan dan pemindahan peralatan, serta tingkat bunga yang berlaku di pasar. Dengan demikian, harga transaksi untuk kontrak-kontrak ini didiskontokan, menggunakan tingkat suku bunga yang tersirat dalam kontrak (yaitu, tingkat bunga yang mendiskontokan harga jual tunai dari peralatan tersebut ke jumlah yang dibayarkan di muka). Tarif ini sepadan dengan tarif yang akan tercermin dalam transaksi pembiayaan terpisah antara Kelompok Usaha dan pelanggan pada awal kontrak.

Kelompok Usaha menerapkan cara praktis untuk uang muka jangka pendek yang diterima dari pelanggan. Artinya, jumlah imbalan yang dijanjikan tidak disesuaikan dengan pengaruh komponen pembiayaan yang signifikan jika jangka waktu antara pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan dan pembayarannya satu tahun atau kurang.

o. Imbalan Kerja

Kelompok Usaha menentukan liabilitas imbalan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.11/2020 ("Undang-Undang") tanggal 2 November 2020. PSAK No. 24 (Revisi 2013; Penyesuaian 2018) mensyaratkan entitas menggunakan metode "Projected Unit Credit" untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu.

Ketika entitas memiliki surplus dalam program imbalan pasti, maka entitas mengukur aset imbalan pasti pada jumlah yang lebih rendah antara surplus program imbalan pasti dan batas atas aset yang ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto.

Entitas mengakui komponen biaya imbalan pasti, kecuali SAK mensyaratkan atau mengizinkan biaya tersebut sebagai biaya perolehan aset, sebagai berikut:

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(continued)

n. Revenue and Expense Recognition
(continued)

(ii) Significant financing component

There is a significant financing component for these contracts considering the length of time between the customers' payment and the transfer of the equipment, as well as the prevailing interest rate in the market. As such, the transaction price for these contracts is discounted, using the interest rate implicit in the contract (i.e., the interest rate that discounts the cash selling price of the equipment to the amount paid in advance). This rate is commensurate with the rate that would be reflected in a separate financing transaction between the Group and the customer at contract inception.

The Group applies the practical expedient for short-term advances received from customers. That is, the promised amount of consideration is not adjusted for the effects of a significant financing component if the period between the transfer of the promised good or service and the payment is one year or less.

o. Employee Benefits

The Group determines its employee benefits liabilities under the Labor Law No. 11/2020 dated November 2, 2020 ("the Law"). PSAK No. 24 (Revised 2013; Adjustment 2018) requires the present value of the defined benefit obligation, the related current service cost, and past service cost to be determined using the "Projected Unit Credit" method.

When an entity has a surplus in a defined benefit plan, an entity measures the defined benefit asset at the lower amount between the surplus of defined benefit plan and the upper limit on assets that determined using a discount rate.

An entity recognizes the components of defined benefit cost, except SAKs require or permit such costs as the acquisition cost of the asset, as follows:

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

o. Imbalan Kerja (lanjutan)

- (a) biaya jasa dalam laba rugi;
- (b) bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam laba rugi; dan
- (c) pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam penghasilan komprehensif lain.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Akan tetapi, entitas dapat mengalihkan jumlah yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tersebut pada pos lain dalam ekuitas.

Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto terdiri atas:

- (a) keuntungan dan kerugian aktuarial;
- (b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto; dan
- (c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Perusahaan mengakui biaya jasa lalu sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon.

Kelompok Usaha mengakui keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan pasti pada saat penyelesaian terjadi. Kurtailmen terjadi ketika entitas mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau mengubah ketentuan program imbalan pasti sehingga unsur yang signifikan dari jasa masa depan karyawan saat ini tidak lagi memenuhi syarat atas imbalan, atau akan memenuhi syarat hanya untuk imbalan yang dikurangi. Kurtailmen dapat terjadi karena suatu peristiwa yang berdiri sendiri, seperti penutupan pabrik, penghentian operasi, atau terminasi atau penghentian program.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Employee Benefits (continued)

- (a) service cost in profit or loss;
- (b) net interest on net liability (asset) of defined benefits in profit or loss; and
- (c) remeasurement of the net liability (asset) of defined benefit in other comprehensive income.

Remeasurement on net liability (asset) of defined benefits that is recognized in other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in subsequent periods. However, the entity may transfer the amounts recognized as other comprehensive income in another account in equity.

Remeasurement the net liability (asset) of defined benefits consists of:

- (a) actuarial gains and losses;
- (b) return on plan assets, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset); and
- (c) any change in the effect of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset).

The Company recognizes past service cost as an expense in an earlier of when the amendments or curtailment of program occurs and when the entity recognizes related restructuring costs or severances.

The Group recognizes gains or losses on the settlement of defined benefit plan when it occurs. A curtailment occurs when an entity make a material reduction in the number of employees covered by a plan; or amending the terms of a defined benefit plan so a significant element of future service by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits. A curtailment may arise from an isolated event, such as the closing of a plant, discontinuance of an operation or termination or suspension of a plan.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

o. Imbalan Kerja (lanjutan)

Sebelum menentukan biaya jasa lalu, atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian, Kelompok Usaha mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto menggunakan nilai wajar kini dari aset program dan asumsi aktuarial kini (termasuk suku bunga pasar dan harga pasar kini yang lain) yang mencerminkan imbalan yang ditawarkan dalam program sebelum amandemen, kurtailmen, atau penyelesaian program.

p. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penyesuaian kurs maupun penyelesaian aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing tersebut dikreditkan atau dibebankan sebagai laba rugi periode berjalan.

Pembukuan Entitas Anak tertentu diselenggarakan dalam mata uang asing. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas Entitas Anak pada tanggal pelaporan dijabarkan ke dalam Rupiah, yang merupakan mata uang pelaporan, dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan penghasilan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Kurs penutup yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2023
Dolar AS	15.416
Dolar Singapura	10.565

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Employee Benefits (continued)

Before determining the past service cost, gains or losses on the settlement, the Group shall remeasure the net liability (asset) of defined benefits using current fair value of plan assets and current actuarial assumptions (including current market interest rates and other current market prices) which reflects the rewards offered in the program prior to amendment, curtailment or settlement program.

p. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions in foreign currencies are translated into functional currency at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the end of reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to functional currency to reflect the middle exchange rate published by Bank Indonesia at the last banking transaction date of the period. Gains or losses resulted from such adjustment or settlement of each monetary asset and liability denominated in foreign currencies are credited or charged as current period profit or loss.

The books of accounts of certain Subsidiaries are maintained in foreign currencies. For consolidation purposes, assets and liabilities of the Subsidiaries at the reporting date are translated into Rupiah, which is the presentation currency, using the exchange rates at that date, while income and expenses are translated at the transaction rates of exchange.

The closing exchange rates used as of December 31, 2023 and 2022 were as follows:

	31 Desember / December 31, 2022	
	15.731	US Dollar
	11.659	Singapore Dollar

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

q. Pajak Penghasilan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan". Penerapan PSAK revisi ini tidak berdampak dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak periode berjalan.

Pajak penghasilan dalam laba rugi periode berjalan terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Pajak penghasilan diakui dalam laba rugi, kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi yang diakui langsung dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain, dalam hal ini diakui dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada akhir periode pelaporan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

q. Income Taxes

Effective January 1, 2015, the Group applied PSAK No. 46 (Revised 2014), "Income Taxes." The adoption of this revised PSAK has no impact in the Group's consolidated financial statements.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the period.

Income tax in profit or loss for the period comprises current and deferred tax. Income tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized directly in equity or other comprehensive income in which case it is recognized in equity or other comprehensive income.

Current tax assets and current tax liabilities are offset if, and only if, the entity has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that sufficient future taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized. Future tax benefits, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

q. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan atas entitas kena pajak, yang sama atau entitas kena pajak berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan yang mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan atau dipulihkan.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima dan/atau, jika Kelompok Usaha mengajukan keberatan dan/atau banding, pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding telah ditetapkan.

r. Laba atau Rugi per Saham

Laba atau rugi per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

s. Provisi dan Kontinjensi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

q. Income Taxes (continued)

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if, and only if, the entity has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity, or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received and/or, if objected to and/or appealed against by the Group, when the result of the objection and/or appeal is determined.

r. Earnings or Losses per Share

Basic earnings or losses per share are calculated by dividing profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

s. Provisions and Contingencies

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each end of reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

s. Provisi dan Kontinjensi (lanjutan)

Aset dan liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh.

t. Instrumen Keuangan

Kelompok Usaha mengklasifikasi instrumen keuangan dalam bentuk aset dan liabilitas keuangan.

(i) Klasifikasi

Kelompok Usaha mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Provisions and Contingencies (continued)

Contingent assets and liabilities are not recognized in the consolidated financial statements. Contingent liabilities are disclosed in the consolidated financial statements, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are disclosed in the consolidated financial statements where an inflow of economic benefits is probable.

t. Financial Instruments

Group classifies financial instruments to financial assets and liabilities.

(i) Classification

The Group classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:

- *Financial assets measured at fair value through profit or loss;*
- *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;*
- *Financial assets measured at amortized cost.*

Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions:

- *financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flow; and*
- *the contractual terms of the financial asset provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and interest (SPPI) on the principal amount owed.*

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:

- *Financial assets are managed in a business model that aims to obtain contractual cash flow and sell financial assets; and*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Kelompok Usaha;
- Apakah risiko yang mempengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya pinjaman standar, dan juga margin laba.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Financial Instruments (continued)

- The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.

Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at fair value through profit or loss.

Valuation of business models

The business model is determined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve certain business objectives.

The evaluation of the business model is carried out by considering, but not limited to, the following:

- How the performance of the business model and financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Group's key management personnel;
- What risks affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how the financial assets are managed; and
- How to evaluate the performance of managers of financial assets (for example, whether performance appraisals are based on the fair value of the assets being managed or the contractual cash flows obtained).

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest

For the purpose of this valuation, principal is defined as the fair value of financial assets at initial recognition. Interest is defined as compensation for the time value of money and credit risk in relation to the principal amount owed over a certain period of time and also the risk and standard borrowing costs, as well as profit margins.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Kelompok Usaha mempertimbangkan:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
 - Liabilitas keuangan lain.
Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.
- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Kelompok Usaha berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. *Financial Instruments* (continued)

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest (continued)

An assessment of contractual cash flows obtained solely from principal and interest payments is made by considering contractual terms, including whether financial assets contain contractual terms that can change the timing or amount of contractual cash flows. In assessing, the Group considers:

- *Contingency events that will change the timing or amount of contractual cash flow;*
- *Leverage feature;*
- *Terms of advance payment and contractual extension;*
- *Requirements regarding limited claims for cash flows from specific assets; and*
- *Features that can change the time value of the money element.*

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;*
 - *Other financial liabilities.*
Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.
- a. *Purchase or sale of financial assets that requires delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market (regular purchases) is recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the assets.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Kelompok Usaha, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. *Financial Instruments* (continued)

(ii) *Initial recognition* (continued)

- b. *Financial assets and financial liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets or financial liabilities not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added/deducted with directly attributable transaction costs to the issuance of financial assets or liabilities.*

The Group, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

- *the application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or*
- *the financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or*
- *the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated, but are unable to measure the embedded derivative separately.*

(iii) *Subsequent measurement*

Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value.

Financial assets classified as amortized cost and other financial liabilities measured at amortized cost using the effective interest rate method.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan

- a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - Kelompok Usaha telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Kelompok Usaha telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Kelompok Usaha tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

Ketika Kelompok Usaha telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Kelompok Usaha yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Kelompok Usaha dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

- b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Financial Instruments (continued)

(iv) Derecognition

- a. Financial assets are derecognized when:

- the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or
- the Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a passthrough arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

Loans are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Group and the borrowers have ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses.

- b. Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Financial Instruments (continued)

(iv) Derecognition (continued)

Where an existing financial liability is replaced by another liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

(v) Income and expense recognition

- a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang dikasifikasikan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Kelompok Usaha mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Financial Instruments (continued)

For financial assets that have deteriorated at initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

- b. Gains and losses arising from changes in the fair value of fair value through other comprehensive income financial assets other than foreign exchange gains or losses on debt instrument are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchanges rate for debt instrument.*

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

(vi) Reclassification of financial assets

The Group reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(vi) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada wajar.

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Kelompok Usaha memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Financial Instruments (continued)

(vi) Reclassification of financial assets (continued)

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to fair value classification through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value classifications through other comprehensive income to the amortized cost classification is recorded at carrying value. Unrealized gains or losses is removed from equity and is adjusted against the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value classification through profit or loss to fair value classification through other comprehensive income are recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value classification through profit or loss to amortized cost classification is recorded at fair value.

(vii) Offsetting

Financial assets and liabilities are set off and the net amount is presented in the consolidated statement of financial position when, and only when, the Group has a legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(vii) Pengukuran biaya amortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Kelompok Usaha mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Nilai wajar dapat diperoleh dari *Interdealer Market Association* (IDMA) atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh *broker* (*quoted price*) dari Bloomberg atau Reuters pada tanggal pengukuran.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Kelompok Usaha menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

- Kelompok Usaha mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Financial Instruments (continued)

(vii) Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of and difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

(ix) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at measurement date.

When available, the Group measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The fair value can be obtained from IDMA's (Interdealer Market Association) quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg or Reuters on the measurement date.

If a market for a financial instrument is not active, the Group establishes fair value using a valuation technique.

(x) Allowance for impairment losses on financial assets

- *The Group recognizes the allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

- Kelompok Usaha mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Kelompok Usaha mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
- instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan.

Kelompok Usaha menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Kelompok Usaha sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Kelompok Usaha);

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. *Financial Instruments* (continued)

(x) *Allowance for impairment losses on financial assets (continued)*

- *There is no allowance for expected credit losses on investment in equity instruments.*
- *The Group measure the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following, which are measured according to 12 months expected credit losses;*
- *debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and*
- *other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.*

The Group considers debt instruments to have low credit risk when the credit risk rating is at par with the globally understood definition of investment grade.

The 12-month expected credit loss is part of the expected credit loss throughout its lifetime that represents an expected credit loss arising from a default on financial instruments that might occur 12 months after reporting date.

Measurement of Expected Credit Losses

Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:

- *financial assets that do not deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the present value of all cash shortages (i.e. the difference between the cash flows owed to the Group in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Group);*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Kelompok Usaha;
- kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Financial Instruments (continued)

Measurement of Expected Credit Losses (continued)

- financial assets that deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;
- for undisbursed loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the amount of cash flow if the commitments is withdrawn and the cash flow expected to be received by the Group;
- for financial guarantee contracts, expected credit losses are measured at the difference between the estimated payments to replace the holder for the credit losses incurred less the amount estimated to be recoverable.

Presentation of Allowance for Expected Credit Losses in Statements of Financial Position

Allowance for expected credit losses is presented in the statement of financial positions as follows:

- for financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;
- for loan commitments and financial guarantee contracts, allowance for expected credit losses is presented as a provision;
- for debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognized in the statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

u. Akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak

PSAK 70 "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak" memberikan pengaturan akuntansi atas aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak, dimana entitas dapat memilih menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan SAK lain yang relevan dalam mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan Aset dan liabilitas pengampunan pajak atau menerapkan kebijakan akuntansi sesuai PSAK 70.

Kelompok Usaha telah menerapkan PSAK ini dan telah melengkapi persyaratan mengenai informasi akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

Aset pengampunan pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang masuk harus dibayarkan oleh Kelompok Usaha sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan Aset Pengampunan Pajak.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Financial Instruments (continued)

Recoveries of written-off financial assets

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

At each consolidated statement of financial position date, the Group assesses whether there is objective evidence that financial assets not carried at fair value through profit or loss are impaired. Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition of the asset, and that the loss event has an impact on the future cash flows on the asset that can be estimated reliably.

u. Accounting for tax amnesty assets and liabilities

PSAK 70 "Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities" sets the accounting treatment for assets and liabilities arising from tax amnesty, in which entity is allowed to choose between accounting policy as prescribed by other relevant SAK's in recognition, measurement, presentation, and disclosure of tax amnesty assets and liabilities, or apply accounting policies in accordance with PSAK 70.

The Group had adopting this PSAK and had completed the requirement regarding accounting for Tax Amnesty and Liabilities information.

Tax amnesty assets are initially recognized at the value stated in SKPP.

Tax Amnesty Liabilities are initially measured at the amount of cash or cash equivalents to be settled by the Group according to the contractual obligation with respect to the acquisition of respective Tax Amnesty Assets.

**INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

u. Akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak
(lanjutan)

Uang tebusan yang dibayarkan oleh Kelompok Usaha untuk memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai beban pada periode dimana SKPP diterima oleh Perusahaan.

Setelah pengakuan awal, Aset dan liabilitas pengampunan pajak diukur sesuai dengan SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan liabilitas pengampunan pajak.

Sehubungan dengan aset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui, Kelompok Usaha mengungkapkan dalam laporan keuangannya:

- (a) Tanggal SKPP;
- (b) Jumlah yang diakui sebagai Aset pengampunan pajak sesuai SKPP;
- (c) Jumlah yang diakui sebagai Liabilitas pengampunan pajak, (jika ada).

v. Kombinasi bisnis entitas sependangali

Pengalihan aset, liabilitas, saham, dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sependangali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Kelompok Usaha atau entitas individual yang berada dalam Kelompok Usaha yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sependangali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham, atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling-of-interest*).

Dalam metode penyatuan kepentingan, unsur-unsur laporan keuangan konsolidasian dari entitas yang bergabung pada periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sependangali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sependangalian. Seluruh saldo "Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependangali" dicatat pada akun "Tambahkan Modal Disetor - Neto" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(continued)

u. Accounting for tax amnesty assets and liabilities
(continued)

The redemption money paid by the Group to obtain the tax amnesty is recognized as expense in the period in which the Company receives SKPP.

After initial recognition, Tax amnesty assets and liabilities are measured in accordance with respective relevant SAKs according to the classifications of each Tax amnesty assets and liabilities.

With respect to tax amnesty assets and liabilities recognized, the Group disclose the following in its financial statements:

- (a) The date of SKPP;*
- (b) Amount recognized as tax amnesty assets in accordance with SKPP;*
- (c) Amount recognized as tax amnesty liabilities, (if any).*

v. Business combination of entities under

The transfer of asset, liability, shares, and other ownership instruments among entities under common control does not result in any gain or loss to the Group or individual entity within the same Group. Since the restructuring transaction among entities under common control does not change the economic substances of the ownerships of the asset, liability, shares, or other ownership instruments which are being transferred, the transferred asset or liability should be recorded based on book value using the pooling-of-interests method.

Under the pooling-of-interests method, the consolidated financial statement items of the restructured entity for the period of which the restructuring occurs and for any comparative periods presented should be presented as if the restructuring had occurred since the restructured entity is under common control. The balance of "Difference arising from restructuring transactions of entities under common control" recorded under "Additional Paid-in Capital - Net" in the consolidated statement of financial position.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Menentukan mata uang fungsional

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional Perusahaan dan masing-masing Entitas Anak termasuk, antara lain, mata uang:

- yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa;
- dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas;
- yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang
- yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan; dan
- yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan.

Berdasarkan substansi ekonomis dari kondisi yang sesuai dengan Kelompok Usaha, mata uang fungsional telah ditentukan berupa Rupiah (Rp), karena hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas bisnis Kelompok Usaha dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi utama dimana Kelompok Usaha beroperasi dan harga jual barang dalam mata uang Rupiah.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

The preparation of consolidated financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make judgments, estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to the inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.

The Group based their assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

The following judgments, estimates and assumptions made by management in the process of applying the Group's accounting policies have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Determining functional currency

The factors considered in determining the functional currency of the Company and each of its Subsidiary include, among others, the currency:

- *that mainly influences sales prices for goods and services;*
- *of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services;*
- *that mainly influences labor, material, and other costs of providing goods or services;*
- *in which funds from financing activities are generated; and*
- *in which receipts from operating activities are usually retained.*

Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Group, the functional currency has been determined to be Rupiah (Rp), as this reflected the fact that majority of the Group's businesses are influenced by primary economic environment in which the Group operates and sales prices for goods in Rupiah currency.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Menentukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti diungkapkan pada (Catatan 2).

Menentukan nilai wajar dan perhitungan amortisasi biaya perolehan dari instrumen keuangan

Kelompok Usaha mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan yang diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Kelompok Usaha menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda.

Perubahan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba rugi Kelompok Usaha. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 30).

Menilai jumlah terpulihkan dari aset keuangan

Kelompok Usaha mengevaluasi akun piutang tertentu yang diketahui bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 6).

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Determining classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in (Note 2).

Determining fair value and calculation of cost amortization of financial instruments

The Group records certain financial assets and liabilities at fair values and at amortized costs, which require the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement and assumptions used in the calculation of cost amortization were determined using verifiable objective evidence, the fair value or amortization amount would differ if the Group utilized different valuation methodology or assumption.

Such changes would directly affect the Group's profit or loss. Further details are disclosed in (Note 30).

Assessing recoverable amounts of financial assets

The Group evaluates specific accounts receivable where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgment, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of their relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce their receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the provision for impairment. Further details are disclosed in (Note 6).

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Menilai jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Jumlah terpulihkan aset tetap didasarkan pada estimasi dan asumsi khususnya mengenai prospek pasar dan arus kas terkait dengan aset. Estimasi arus kas masa depan mencakup perkiraan mengenai pendapatan masa depan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini mungkin memiliki dampak material terhadap pengukuran jumlah terpulihkan dan bisa mengakibatkan penyesuaian penyisihan penurunan nilai yang sudah dibukukan (Catatan 10).

Menentukan metode penyusutan dan estimasi umur manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara empat (4) sampai dengan dua puluh (20) tahun. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 2h dan 10).

Pada tanggal 31 Desember 2014, Kelompok Usaha mengestimasi taksiran sisa manfaat ekonomis peralatan dan fasilitas telekomunikasi menjadi lima (5) tahun.

Menentukan pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Assessing recoverable amounts of non-financial assets

Allowance for decline in market value and obsolescence of inventories is estimated based on available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories own physical condition, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated.

The recoverable amounts of fixed assets is based on estimates and assumptions regarding in particular the expected market outlook and future cash flows associated with the assets. Estimated future cash flows include estimates of future revenues. Any changes in these assumptions may have a material impact on the measurement of the recoverable amount and could result in adjustments to the provision of impairment already booked (Note 10).

Determining depreciation method and estimated useful lives of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets to be within four (4) to twenty (20) years. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in (Notes 2h and 10).

As of December 31, 2014, the Group estimated that the remaining useful life of telecommunication equipment and facilities to be five (5) years.

Determining income taxes

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates as to whether additional corporate income tax will be due.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Estimasi beban pensiun dan imbalan kerja

Penentuan liabilitas dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun, dan tingkat kematian.

Sementara Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan kerja. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 27).

Mengevaluasi perjanjian sewa

Kelompok Usaha menandatangani perjanjian sewa sebagai lessee. Manajemen melakukan penilaian dalam menentukan apakah semua risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan dialihkan kepada Kelompok Usaha. Sewa guna usaha dimana Kelompok Usaha memperoleh seluruh risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika sebaliknya maka diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Mengevaluasi provisi dan kontinjensi

Kelompok Usaha terlibat dalam berbagai proses hukum dan pajak. Manajemen melakukan penilaian untuk membedakan antara provisi dan kontinjensi terutama melalui konsultasi dengan penasehat hukum Kelompok Usaha yang menangani proses hukum dan pajak tersebut. Kelompok Usaha mempersiapkan provisi yang sesuai untuk proses hukum saat ini atau kewajiban konstruktif, jika ada.

Dalam situasi tertentu, Kelompok Usaha tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks serta jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Estimate of pension cost and employee benefits

The determination of the Group's liabilities and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on their selection of certain assumptions used in calculating such amounts. These assumptions include among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age, and mortality rate.

While the Group believes that their assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual results or significant changes in the Group's assumptions may materially affect their employee benefits liability and expense. Further details are discussed in (Note 27).

Evaluating lease agreements

The Group has entered into lease agreements as lessee. The management exercises judgment in determining whether all significant risk and rewards of ownership of the leased property are transferred to the Group. Lease wherein the Group acquires all significant risks and rewards of ownership of the leased property is accounted for as finance lease, otherwise it is accounted for as operating lease.

Evaluating provisions and contingencies

The Group involved in various legal and tax proceedings. The management exercises its judgment to distinguish between provisions and contingencies mainly through consultation with the Group's legal counsel handling those proceedings. The Group sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations, if any.

In certain circumstances, the Group may not be able to determine the exact amount of their current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi".

Kelompok Usaha membuat analisa untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Kelompok Usaha tidak yakin bahwa proses-proses tersebut akan berpengaruh secara signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 27).

4. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember / December 31, 2023
Kas	
Rupiah	19
Dolar AS	-
Jumlah Kas	19
Kas di bank	
<u>Rupiah</u>	
PT Bank Permata Tbk	110
PT Bank Mandiri Persero) Tbk	2.238
PT Bank Central Asia Tbk	79
Lain - lain (masing -masing dibawah Rp 10 juta)	12
Sub - jumlah	2.439
<u>Dolar AS</u>	
PT Bank Permata Tbk	14
Lain - lain (masing -masing dibawah Rp 20 juta)	27
Sub - jumlah	41
Jumlah Kas di Bank	2.480
Total	2.499

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Group applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK No. 57 (Revised 2009), "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset."

The Group makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized tax benefit should be recognized.

As of December 31, 2022 , the Group did not believe that those proceedings will have a significant adverse effect on the consolidated financial statements. Further details are discussed in (Notes 27).

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember / December 31, 2022	
		Cash on hand
	13	Rupiah
	10	US Dollar
	23	Total Cash on Hand
		Cash in banks
		<u>Rupiah</u>
	199	PT Bank Permata Tbk
	91	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	38	PT Bank Central Asia Tbk
	12	Others (each below Rp 10 million)
	340	Sub - total
		<u>US Dollar</u>
	14	PT Bank Permata Tbk
	27	Others (each below Rp 20 million)
	41	Sub - total
	381	Total Cash in Banks
	404	Total

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLES

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Pihak ketiga			Thrid parties
<u>Jasa pemakaian dan interkoneksi</u>			<u>Usage and interconnection service</u>
Pelanggan individual dan bisnis	54.919	56.458	Individual and business subscribers
Penyelenggara jasa telekomunikasi	18.194	16.508	Telecommunication service provider
Jumlah	73.113	72.966	Total
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(73.094)	(72.966)	Less allowance for impairment loss
Neto	19	(0)	Net
	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
<u>Jasa lainnya</u>			<u>Other service</u>
PT Ecart Webportal Indonesia	541	700	PT Ecart Webportal Indonesia
PT NTT Indonesia Solusions	501	434	PT NTT Indonesia Solusions
PT VKTR Teknologi Mobilitas	245	-	PT VKTR Teknologi Mobilitas
PT Visual Indomedia Produksi	164	-	PT Visual Indomedia Produksi
PT Indonesia Entertainmen Produksi	254	-	PT Indonesia Entertainmen Produksi
Lain - lain (masing -masing dibawah Rp 100 juta)	2.207	280	Others (each below Rp 100 million)
Jumlah	3.913	1.414	Total
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(439)	(439)	Less allowance for impairment loss
Neto	3.473	975	Net
Pihak ketiga-neto	3.492	975	Thrid parties-net
Pihak berelasi			Related parties
PT Digi Bintang Sinergi	5.639	5.421	PT Digi Bintang Sinergi
PT Lativi Media Karya	7.082	2.610	PT Lativi Media Karya
PT Cakrawala			PT Cakrawala
Andalas Televisi	16.516	37	Andalas Televisi
PT Bakrie Autopart	34	37	PT Bakrie Autopart
Yayasan Bakrie Centre	133	-	Yayasan Bakrie Centre
Jumlah	29.404	8.069	Total
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(4.733)	(2.711)	Less allowance for impairment loss
Pihak berelasi - neto	24.671	5.357	Related parties - net

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2023
Rupiah	88.890
Dolar AS	17.540
Jumlah	106.430
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(78.266)
Neto	28.164

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2023
Sampai dengan 30 hari	1.540
Lebih dari 30 hari - 60 hari	11.648
Lebih dari 60 hari - 90 hari	1.320
Lebih dari 90 hari	13.655
Jumlah	28.163

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha yang seluruhnya berdasarkan penilaian secara individual adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2023
Saldo awal tahun	76.116
Penyisihan selama tahun berjalan	2.149
Saldo Akhir Tahun	78.265

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutup kerugian penurunan nilai atas tidak tertagihnya piutang usaha.

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

Trade receivables based on currencies are as follows:

	31 Desember / December 31, 2022	
	65.994	<i>Rupiah</i>
	16.454	<i>US Dollar</i>
Total	82.448	Total
	(76.116)	<i>Less allowance for impairment loss</i>
Neto	6.332	Net

The aging schedule of trade receivables are as

	31 Desember / December 31, 2022	
	324	<i>Up to 30 days</i>
	15	<i>Over 30 days - 60 days</i>
	693	<i>Over 60 days - 90 days</i>
	5.300	<i>Over 90 days</i>
Total	6.332	Total

Movements in the allowance for impairment loss of trade receivables which were wholly based on individual assessments were as follows:

	31 Desember / December 31, 2022	
	73.188	<i>Beginning balance for the year</i>
	2.928	<i>Provision during the year</i>
Ending Balance for the Year	76.116	Ending Balance for the Year

The management believed that allowance for impairment loss of receivables was adequate to cover impairment losses on uncollectible trade receivables.

6. PERSEDIAAN

	31 Desember / December 31, 2023
Set Top Box TV	1.338
Jumlah	1.338

6. INVENTORIES

	31 Desember / December 31, 2022	
	644	Set Top Box TV
Jumlah	644	Total

7. UANG MUKA

Uang muka operasional departemen merupakan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan oleh departemen yang bersangkutan. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 saldo atas akun ini masing-masing sebesar Rp1,796 miliar dan Rp 2,572 miliar. Uang muka tersebut merupakan uang muka atas pengadaan *modification transmitter* yang sampai tanggal neraca jasa yang dipesan belum diterima oleh Vivat (dahulu CAF) dan dana talangan operasional kepada karyawan.

7. ADVANCES

Operational department advances represents advances that have not yet been settled by the related departments. In December 31, 2023 and 2022 the amount of this account is Rp1.796 billion and Rp2.572 billion, respectively. The advances represent advances for the procurement of modification transmitters which until the balance sheet date for services ordered have not been received by Vivat (CAF) and operational bailout funds to employees.

8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember / December 31, 2023
Asuransi	153
Lainnya	14
Jumlah	167

8. PREPAID EXPENSES

	31 Desember / December 31, 2022	
	111	Insurance
	-	Other
Jumlah	111	Total

9. PIUTANG PIHAK BERELASI

	31 Desember / December 31, 2023
PT Cakrawala Andalas Televisi	-
PT Lativi Media Karya	2.620
Jumlah	2.620

9. DUE FROM RELATED PARTIES

	31 Desember / December 31, 2022	
	2.820	PT Cakrawala
	2.820	Andalas Televisi
Jumlah	5.640	PT Lativi Media Karya
		Total

Saldo piutang pihak berelasi sejumlah Rp2,62 miliar merupakan piutang setoran modal dari pihak berelasi tersebut di atas kepada Vivat (CAF) (Entitas Anak)

The balance of receivables from related parties amounting to Rp2.62 billion represents receivables for paid up capital from related parties mentioned above to Vivat (CAF) (Subsidiary).

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

The details of fixed assets are as follows:

31 Desember 2023 / December 31, 2023					
Saldo 1 Jan/ <i>Balance</i> <i>as of</i> <i>Jan 1, 2023</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi / <i>Reclassi- fications</i>	Saldo 31 Des/ <i>Balance</i> <i>as of</i> <i>Dec 31, 2023</i>	
					Historical Cost
					<i>Direct</i>
					<i>Ownership</i>
Pemilikan Langsung					
Tanah	276	-	-	276	<i>Land</i>
Bangunan	12.674	-	-	12.674	<i>Building</i>
Peralatan dan fasilitas telekomunikasi	13.044.662	10.060	-	13.067.192	<i>Telecommunication equipment and facilities</i>
Peralatan pengangkutan	13.725	-	-	13.725	<i>Transportation equipment</i>
Peralatan dan perabot kantor	138.146	50	-	138.196	<i>Office equipment and fixtures</i>
Jumlah Biaya Perolehan	13.209.483	10.110	-	13.232.063	Total Acquisition Costs
					Accumulated Depreciation
					<i>Direct</i>
					<i>Ownership</i>
					<i>Building</i>
Pemilikan Langsung					
Bangunan	12.582	-	-	12.582	<i>Building</i>
Peralatan dan fasilitas telekomunikasi	9.207.332	-	-	9.207.332	<i>Telecommunication equipment and facilities</i>
Peralatan pengangkutan	13.712	-	-	13.712	<i>Transportation equipment</i>
Peralatan dan perabot kantor	137.759	106	-	137.865	<i>Office equipment and fixtures</i>
Jumlah Akumulasi Penyusutan	9.371.386	106	-	9.371.491	Total Accumulated Depreciation

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2023 / December 31, 2023						
	Saldo 1 Jan/ <i>Balance</i> <i>as of</i> <i>Jan 1, 2023</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi / <i>Reclassi- fications</i>	Saldo 31 Des/ <i>Balance</i> <i>as of</i> <i>Dec 31, 2023</i>	
Penurunan Nilai Aset Tetap						Impairment of Fixed Assets
Tanah	276	-	-	-	276	Land
Bangunan	92	-	-	-	92	Building
Peralatan dan fasilitas telekomunikasi	3.837.405	-	-	-	3.837.405	Telecommunication equipment and facilities
Peralatan pengangkutan	13	-	-	-	13	Transportation equipment
Peralatan dan perabot kantor	10	-	-	-	10	Office equipment and fixtures
Jumlah Penurunan Nilai Aset	3.837.796	-	-	-	3.837.796	Total Impairment of Fixed Assets
Jumlah Tercatat	302				22.776	Carrying Amounts
31 Desember 2022 / December 31, 2022						
	Saldo 1 Jan/ <i>Balance</i> <i>as of</i> <i>Jan 1, 2022</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi / <i>Reclassi- fications</i>	Saldo 31 Des/ <i>Balance</i> <i>as of</i> <i>Dec 31, 2022</i>	
Biaya Perolehan						Historical Cost
Pemilikan Langsung						Direct Ownership
Tanah	276	-	-	-	276	Land
Bangunan	12.674	-	-	-	12.674	Building
Peralatan dan fasilitas telekomunikasi	13.044.662	-	-	-	13.044.662	Telecommunication equipment and facilities
Peralatan pengangkutan	13.725	-	-	-	13.725	Transportation equipment
Peralatan dan perabot kantor	138.017	129	-	-	138.146	Office equipment and fixtures
Jumlah Biaya Perolehan	13.209.354	129	-	-	13.209.483	Total Acquisition Costs

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2022 / December 31, 2022						
	Saldo 1 Jan/ <i>Balance</i> <i>as of</i> <i>Jan 1, 2022</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi / <i>Reclassi- fications</i>	Saldo 31 Des/ <i>Balance</i> <i>as of</i> <i>Dec 31, 2022</i>	
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Pemilikan langsung						Direct Ownership
Bangunan	12.582	-	-	-	12.582	Building
Peralatan dan fasilitas telekomunikasi	9.207.332	-	-	-	9.207.332	Telecommunication equipment and facilities
Peralatan pengangkutan	13.712	-	-	-	13.712	Transportation equipment
Peralatan dan perabot kantor	137.649	110	-	-	137.759	Office equipment and fixtures
Jumlah Akumulasi Penyusutan	9.371.275	110	-	-	9.371.385	Total Accumulated Depreciation
Penurunan Nilai Aset Tetap						Impairment of Fixed Assets
Tanah	276	-	-	-	276	Land
Bangunan	92	-	-	-	92	Building
Peralatan dan fasilitas telekomunikasi	3.837.405	-	-	-	3.837.405	Telecommunication equipment and facilities
Peralatan pengangkutan	13	-	-	-	13	Transportation equipment
Peralatan dan perabot kantor	10	-	-	-	10	Office equipment and fixtures
Jumlah Penurunan Nilai Aset	3.837.796	-	-	-	3.837.796	Total Impairment of Fixed Assets
Jumlah Tercatat	283				302	Carrying Amounts

Beban penyusutan untuk periode dan tahun yang masing-masing berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian masing-masing sebesar Rp106 juta dan Rp110 juta.

Depreciation expense for period and year ended as of December 31, 2023 and 2022 was charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income amounting to Rp106 million and Rp110 million, respectively.

11. ASET DALAM Pengerjaan

11. ASSETS IN PROGRESS

Aset dalam pengerjaan untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meliputi pembelian perangkat *transmitter*, *Integrated Receiver/Decoder* (IRD), dan monitoring yang masih dalam proses penyelesaian sebesar Rp12,47 miliar telah di reklasifikasi menjadi aset tetap sehubungan dengan telah dimanfaatkan dan digunakan

Assets in progress for the period and year ended December 31, 2022 include purchases of transmitter, Integrated Receiver/Decoder (IRD), and monitoring equipment which are still in the process of being completed amounting to Rp12.47 billion which have been reclassified into fixed asset in connection with them being utilized and used.

12. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Aset tidak lancar lainnya untuk periode dan tahun yang masing-masing berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 meliputi Lisensi, Goodwill dan lain-lain sebesar Rp 529 dan Rp822 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2023 Aset tidak lancar lain - lain sebesar Rp 529 juta berasal dari tax amnesty dari Entitas Anak Perseroan

12. OTHER NON-CURRENT ASSETS

Other non current asset for period and year ended as of December 31, 2023 and 2022 represent License, Goodwill and others amounted Rp 529 and Rp822 million.

On December 31, 2023, other non-current assets amounting to IDR 529 million came from tax amnesty from the Company's Subsidiaries

13. UTANG USAHA

13. ACCOUNT PAYABLE

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Pihak ketiga			Third parties
<u>Mata uang asing</u>			<u>Foreign currencies</u>
Blackberry Singapore Pte. Ltd	8.306	8.477	Blackberry Singapore Pte. Ltd
Lain - lain (masing -masing dibawah Rp4 miliar)	79.362	81.123	Others (each below Rp4 billion)
Sub - Jumlah	87.668	89.600	Sub - total
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Smartfren Telecom Tbk	148.094	172.138	PT Smartfren Telecom Tbk
Kementerian Komunikasi dan Informasi	54.819	54.819	Ministry of Communication and Information
Lain - lain (masing -masing dibawah Rp4 miliar)	75.661	60.503	Others (each below Rp4 billion)
Sub -Jumlah	278.574	287.460	Sub - total
Beban Interkoneksi	49.113	49.113	Interconnection expense
Jumlah pihak ketiga	415.355	426.173	Total third parties
Pihak berelasi			Related parties
PT Bakrie Swasakti Utama	13.627	13.627	PT Bakrie Swasakti Utama
PT Multi Kontrol Nusantara	2.851	2.851	PT Multi Kontrol Nusantara
Lain - lain (masing -masing dibawah Rp4 miliar)	26.715	437	Others (each below Rp4 billion)
Jumlah pihak berelasi	43.193	16.915	Total related parties
Jumlah utang usaha	458.548	443.088	Total Trade Payable
Persentase utang usaha pihak berelasi terhadap			Percentage of related parties trade payables to
Jumlah liabilitas konsolidasian	0,7266%	0,2872%	Total consolidated liabilities

13. UTANG USAHA (lanjutan)

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember / December 31, 2023</u>
Sampai dengan 30 hari	1.824
Lebih dari 30 hari - 60 hari	1.565
Lebih dari 60 hari - 90 hari	2.552
Lebih dari 90 hari	452.607
Jumlah	<u>458.548</u>

Utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember / December 31, 2023</u>
Rupiah	370.882
Dolar AS	87.393
Dolar Singapura	270
Euro	3
Neto	<u>458.548</u>

14. UTANG LAIN-LAIN

	<u>31 Desember / December 31, 2023</u>
Dalam mata uang Rupiah	172.443
Dalam mata uang asing	268
Jumlah	<u>172.711</u>

15. BEBAN AKRUAL

	<u>31 Desember / December 31, 2023</u>
Kewajiban kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi - Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi	-
Gaji dan pensiun	73.784
Jasa profesional	17.617
Sewa	13.549
Lain-lain (masing - masing dibawah Rp20 miliar)	34.382
Jumlah	<u>139.332</u>

13. ACCOUNT PAYABLE (continued)

The aging schedule of trade payables was as follows:

	<u>31 Desember / December 31, 2022</u>	
	3.401	Up to 30 days
	1.068	Over 30 days - 60 days
	643	Over 60 days - 90 days
	437.976	Over 90 days
Total	<u>443.088</u>	Total

Trade payables based on currencies are as follows:

	<u>31 Desember / December 31, 2022</u>	
	353.488	Rupiah
	89.327	US Dollar
	270	Singapore Dollar
	3	Euro
Net	<u>482.592</u>	Net

14. OTHER PAYABLES

	<u>31 Desember / December 31, 2022</u>	
	165.555	In Rupiah currency
	297	In foreign currencies
Total	<u>165.852</u>	Total

15. ACCRUED EXPENSES

	<u>31 Desember / December 31, 2022</u>	
	77.902	Obligation to the Ministry of Communication and Information - the Directorate General of Post and Telecommunication
	50.475	Salaries and pension
	17.617	Professional fees
	13.549	Rent
	87.545	Others (each below Rp20 billion)
Total	<u>247.088</u>	Total

15. BEBAN AKRUAL (lanjutan)

Kewajiban kepada Departemen Komunikasi dan Informatika - Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi merupakan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) telekomunikasi dengan tarif sebesar 0,5% dari pendapatan neto setelah dikurangi penghapusan piutang ragu-ragu, ditambah dengan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) atau Universal Service Obligation (USO) sebesar 1,25% dari pendapatan neto setelah dikurangi penghapusan piutang ragu-ragu. Selain itu, ada juga kewajiban BHP Pita dan Terrestrial.

Berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta telah ditetapkan jumlah piutang yang harus dilunasi oleh Perusahaan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah dengan rincian sebagai berikut:

Nomor / Number	Keterangan / Description	Hutang Pokok / Principle debt	Denda / Fines	Biaya Admi- nistrasi 10% / Admi- nistration fee 10%	Jumlah / Total
PJPN-43/PUPNC.10.05/2017	KPU USO 2014	15.661	9.070	2.473	27.205
	KPU USO 2015	6.568	1.599	817	8.983
PJPN-79/PUPNC.10.05/2017	BHP TEL 2014	5.395	1.580	697	7.672
	BHP TEL 2015	2.637	783	342	3.762
PJPN-165/PUPNC.10.05/2017	BHP ISR 2015	6.785	-	679	7.464
100/DJPPI.1/KU.03.02/1/2020	BHP TEL 2016	649	396	105	1.150
4/KOMINFO/BAKTI.31/KU.03.02/1/2020	KPU USO 2016	1.659	1.011	267	2.938
					<u>4.140</u>
				Neto / Net	<u>55.034</u>

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan telah melakukan penyesuaian terhadap pengakuan kelebihan pencatatan beban akrual kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi sebesar Rp 77,90 milyar yang terdiri dari Beban Hak penyelenggaraan (BHP) sebesar Rp 55,99 milyar dan Universal Service Service (USO) Rp 21,92 milyar. Perusahaan telah melakukan pembayaran atas utang tersebut sejumlah Rp4,140 juta.

Pembayaran harus dilakukan oleh Perusahaan guna menghindari tindakan hukum lebih lanjut, antara lain:

- Pencegahan ke luar wilayah Republik Indonesia terhadap pengurus/ penanggungjawab Perusahaan,
- Paksa badan terhadap pengurus/ penanggungjawab Perusahaan, dan
- Penyitaan atas harta kekayaan penanggung utang dan/atau penjamin utang.

15. ACCRUED EXPENSES (continued)

Obligation to the Department of Communication and Information - the Directorate General of Post and Telecommunication represents the Cost of Frequency Utilization Providing Right telecommunications at a rate of 0.5% of net revenues after the deduction of allowance for bad debts written-off, plus an additional Universal Service Obligation (USO) of 1.25% of net revenues after the deduction of allowance for bad debts written-off. Also, included BHP Band and Terrestrial obligations.

Based on the Decree of the DKI Jakarta Branch Committee for State Receivable Affairs, the amount of receivables that must be paid by the Company to the Ministry of Communication and Information Technology is as follows:

As of the completion date of this consolidated financial report, the Company has made adjustments to the recognition of excess recorded accrued expenses to the Ministry of Communication and Information amounting to IDR 77.90 billion, consisting of Maintenance Rights Expenses (BHP) amounting to IDR 55.99 billion and Universal Service Expenses (USO) IDR 21.92 billion. The company has made payments on the debt amounting to IDR 4,140 million

Payments must be made by the Company to avoid further legal action, among others:

- Prevention outside the territory of the Republic of Indonesia towards the management/responsible of the Company,
- Forced the body of the Company's management/responsibility, and
- Confiscation of the assets of the debt guarantor and/or debt guarantor.

16. UTANG YANG DISELESAIKAN MELALUI PKPU

	31 Desember / December 31, 2023
Utang atas penerbitan wesel senior	1.383.732
Utang penyedia menara	769.897
Utang usaha	1.171.039
Utang dengan jaminan	485.520
Utang biaya hak penggunaan dan <i>universal service obligation</i>	326.734
Utang akibat derivatif	54.508
Utang afiliasi	22.122
	<u>4.213.552</u>
Akruwal bunga	808.188
Jumlah	<u>5.021.740</u>

Saldo utang yang diselesaikan melalui PKPU per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.021 triliun dan Rp4.932 triliun. Penyelesaian utang PKPU termasuk dengan penerbitan obligasi wajib konversi senilai Rp 5.673 triliun.

Akruwal bunga sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp808 miliar dan Rp718 miliar adalah merupakan pengakuan bunga berdasarkan PKPU antara Perusahaan dengan para kreditornya (Catatan 34).

Utang kepada kreditor dalam mata uang asing dikonversikan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditentukan dalam PKPU (Catatan 34).

Pada tanggal 9 Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan PKPU oleh Netwave terhadap Perusahaan telah mengeluarkan keputusan yang mengesahkan (Homologasi) Perjanjian Perdamaian dalam PKPU antara Perusahaan dan para kreditornya (Catatan 34).

Sesuai dengan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU, kreditor atas Utang Tower Provider dapat menghentikan layanan penggunaan tower yang disewa oleh Perusahaan akhir bulan Juni 2015, kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan dan kreditor atas Utang Tower Provider terkait.

16. SETTLEMENT OF PAYABLES THROUGH PKPU

	31 Desember / December 31, 2022	
	1.383.732	<i>Due to from issuance senior bonds</i>
	769.897	<i>Tower provider payables</i>
	1.171.039	<i>Trade payables</i>
	485.520	<i>Payables with collateral</i>
	326.734	<i>Payables on fee of rights to use and the universal service obligation</i>
	54.508	<i>Derivatives payables</i>
	22.122	<i>Affiliate payables</i>
	<u>4.213.552</u>	
	718.389	<i>Accrued interest</i>
	<u>4.931.941</u>	Total

The debt balances that were settled through PKPU as of December 31, 2023 and 2022 were Rp5,021 trillion and Rp4,932 trillion, respectively. PKPU debt settlement including the issuance of mandatory convertible bonds worth Rp5,673 trillion.

Accrued interest up to December 31, 2023 and 2022, amounting to Rp808 billion and Rp718 billion, respectively, represents interest recognition based on the PKPU, between the Company and its creditors (Note 34).

Debt to creditors in foreign currency is converted into rupiah currency using the exchange rate determined in PKPU (Note 34).

On December 9, 2014, the judges of the Commercial Court in Central Jakarta District Court and the PKPU adjudicators of Netwave petition against the Company issued a decision officially approving in PKPU, the Amicable Settlement Agreement between the Company and its creditors (Note 34).

Based on the Amicable Settlement Agreement, creditors of Tower Provider Payables may terminate the usage service of leased tower by the Company by at the latest June 2015, unless otherwise determined by the Company and its creditors in relation to Tower Provider Payables.

16. UTANG YANG DISELESAIKAN MELALUI PKPU
(lanjutan)

Pada bulan Juni 2015, Perusahaan menghentikan layanan penggunaan tower yang disewa. Sesuai dengan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU maka 100% dari nilai sisa masa sewa akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB-A).

Pada tanggal 26 Juni 2016, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang menyetujui penambahan modal Perusahaan atau penerbitan saham baru Perusahaan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan mekanisme penerbitan Obligasi Wajib Konversi terlebih dahulu. Saham baru Perusahaan tersebut diterbitkan sebagai pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

Berdasarkan keterangan dari konsultan hukum Perusahaan di Amerika Serikat sehubungan dengan putusan atau *court order* tertanggal 6 Mei 2021 dari Pengadilan Kepailitan New York atas permohonan Bab 15 yang diajukan Perusahaan, dinyatakan bahwa Pengadilan Kepailitan New York telah mengabulkan permohonan Bab 15 BTEL sebagai berikut:

- a. Memberikan pengakuan atas keputusan PKPU BTEL sebagai *foreign main proceeding*.
- b. Memberikan perlindungan kepada BTEL atas setiap klaim terhadap BTEL dan aset-aset milik BTEL di Amerika Serikat.
- c. Memberikan hak kepada BTEL untuk mengajukan permohonan perlindungan atau bantuan lainnya kepada Pengadilan New York.

Berdasarkan putusan Pengadilan Kepailitan New York tersebut yang memberikan pengakuan putusan PKPU BTEL sebagai *foreign main proceeding*, BTEL mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum Amerika Serikat dimana pemegang Wesel Senior dan pihak manapun juga tidak dapat melakukan klaim atau tuntutan terhadap BTEL maupun terhadap aset-aset di Amerika Serikat milik BTEL.

16. SETTLEMENT OF PAYABLES THROUGH PKPU
(continued)

In June 2015, the Company discontinued the use of the leased service tower. Based on the Amicable Settlement Agreement, 100% of the residual value of the lease will be exchanged with the Mandatory Convertible Bond (MCB-A).

On June 26, 2016, Company obtained approval from the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) which approved the issuance of new shares by way of non-preemptive rights by issuing Mandatory Convertible Bonds before hand. The new shares to be issued as the implementation of conversion of Mandatory Convertible Bonds as governed under the Amicable Settlement Agreement.

Based on information from the Company's legal consultant in the United States regarding the decision or court order dated May 6, 2021 from the Bankruptcy Court of New York on the application for Chapter 15 submitted by the Company, it is stated that the Bankruptcy Court of New York has granted the application for Chapter 15 of BTEL as follows:

- a. *Giving recognition to BTEL's PKPU decision as a foreign main proceeding.*
- b. *Provide protection to BTEL for any claims against BTEL and BTEL's assets in the United States.*
- c. *Granting the right to BTEL to apply for protection or other assistance to the New York Court.*

Based on the New York Bankruptcy Court decision which recognized BTEL's PKPU decision as a foreign main proceeding, BTEL received legal protection under United States law where Senior Note holders and any other party could not make claims or demands against BTEL or assets in the United States. owned by BTEL.

16. UTANG YANG DISELESAIKAN MELALUI PKPU
(lanjutan)

Di samping itu Pengadilan Kepailitan New York juga menegaskan hak bagi BTEL untuk mengajukan permohonan lainnya kepada Pengadilan Kepailitan New York untuk memberlakukan atau implementasi Keputusan PKPU di Amerika Serikat.

Keputusan tersebut di atas merupakan keputusan terakhir yang diterima sampai oleh BTEL sampai dengan tanggal laporan ini.

Dengan keputusan PKPU yang sudah dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta memperoleh pengakuan (*recognition*) sebagai *foreign main proceeding* berdasarkan Bab 15 dari Pengadilan Kepailitan New York, yang mana BTEL mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum Amerika Serikat dimana pemegang wesel senior dan pihak manapun juga tidak dapat melakukan klaim atau tuntutan terhadap BTEL maupun terhadap aset-aset di Amerika Serikat milik BTEL, maka diyakini bahwa BTEL dapat melakukan kegiatan bisnis seperti yang direncanakan bersamaan dengan implementasi PKPU tanpa ada kekhawatiran adanya klaim diluar yang sudah disepakati dalam keputusan PKPU.

BTEL sendiri pada tahun 2016 telah melaksanakan keputusan PKPU yaitu menerbitkan dan menyerahkan OWK para kreditur termasuk kepada BTPL dan selanjutnya OWK akan diserahkan oleh BTPL kepada pemegang Wesel Senior.

Keputusan tersebut ataupun jika ada putusan lain dari badan peradilan manapun, tidak mempengaruhi keberlakuan putusan PKPU BTEL yang telah mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan hukum Indonesia.

Jika pemegang wesel senior akan melakukan klaim terhadap BTEL, maka klaim tersebut hanya dapat dilakukan memakai yuridiksi Indonesia, dimana terhadap klaim tersebut sudah diatur penyelesaiannya dalam putusan PKPU.

16. SETTLEMENT OF PAYABLES THROUGH PKPU
(continued)

Aside from the above, the New York Bankruptcy Court asserts the rights for BTEL to submit other request to the New York Bankruptcy Court in order for the PKPU decision to be implemented and enforced in United States of America.

The above-mentioned decisions are the latest decision received by BTEL to date.

Given the PKPU decision has been reinforced by the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and acquired a recognition as a foreign main proceeding pursuant to the Chapter 15 from the New York Bankruptcy Court in which BTEL is granted a legal protection based on the laws of United States of America where the note holders or any other party shall not make any claim and lawsuit against BTEL and or any asset in United States of America owned by BTEL, it is believed that BTEL is able to carry out its business activities as planned simultaneously with the implementation of PKPU without any concern of claims made outside the agreed-PKPU decision.

BTEL, in 2016, has carried out its obligation under the PKPU Decision by issuing and handing over the MCB to creditors including BTPL and thereafter the MCB to be handed over by BTPL to the note holders.

This decision or if there is another decision from any judicial body, does not affect the validity of the BTEL PKPU decision which is binding and has permanent legal force based on Indonesian law.

17. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan catatan yang dibuat oleh PT Ficomindo Buana Registrar adalah sebagai berikut:

17. CAPITAL STOCK

The composition of shareholders as of December 31, 2023 and 2022 based on registration by PT Ficomindo Buana Registrar, was as follows:

Pemegang Saham	31 Desember / December 31, 2023		Shareholders
	Jumlah saham / Ditempatkan dan disetor penuh (dalam satuan penuh) / Number of shares issued and fully paid (in full amount)	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	
Total saham biasa seri A dan B			Total common shares series A and B
PT Huawei Tech Investment	6.189.313.980	16,81%	PT Huawei Tech Investment
PT Mahindo Agung Sentosa	5.000.439.000	13,58%	PT Mahindo Agung Sentosa
PT Bakrie Global Ventura	2.639.582.576	7,17%	PT Bakrie Global Ventura
Raiffeisen Bank International s/a Best Quality Global Limited	2.213.279.000	6,01%	Raiffeisen Bank International s/a Best Quality Global Limited
PT Biofuel Indo Sumatra	1.980.000.000	5,38%	PT Biofuel Indo Sumatra
Masyarakat	18.800.051.199	51,06%	Public
Jumlah	36.822.665.755	100,00%	Total
Pemegang Saham	31 Desember / December 31, 2022		Shareholders
	Jumlah saham / Ditempatkan dan disetor penuh (dalam satuan penuh) / Number of shares issued and fully paid (in full amount)	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	
Total saham biasa seri A dan B			Total common shares series A and B
PT Huawei Tech Investment	6.189.313.980	16,81%	PT Huawei Tech Investment
PT Mahindo Agung Sentosa	5.000.439.000	13,58%	PT Mahindo Agung Sentosa
PT Bakrie Global Ventura	2.639.582.576	7,17%	PT Bakrie Global Ventura
Raiffeisen Bank International s/a Best Quality Global Limited	2.213.279.000	6,01%	Raiffeisen Bank International s/a Best Quality Global Limited
Credit Suisse AG Singapore Branch S/A Bright Ventures Pte Ltd	1.980.000.000	5,38%	Credit Suisse AG Singapore Branch S/A Bright Ventures Pte Ltd
PT Bakrie Brothers Tbk	43.043.142	0,12%	PT Bakrie Brothers Tbk
Masyarakat	18.757.008.057	50,94%	Public
Jumlah	36.822.665.755	100,00%	Total

17. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pada tanggal 3 Februari 2006, perusahaan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 1 Maret 2017, PT Huawei Tech Investment telah mengkonversi Obligasi Wajib Konversi yang dimiliki sebesar Rp1.237.862.796.141 menjadi saham Perusahaan sebanyak 6.189.313.980 lembar saham.

Jumlah saham modal dasar pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan anggaran dasar Perusahaan adalah sebagai berikut:

<u>Jenis saham</u>	<u>Jumlah saham modal dasar (dalam satuan penuh)/ Number of authorized shares (in full amount)</u>	<u>Nominal/ Nominal (Rp)</u>	<u>Total dalam jutaan rupiah/ Total in million rupiah</u>	<u>Shares</u>
Saham biasa seri A	10.000.000.000	200	2.000.000	Common shares series A
Saham biasa seri B	<u>87.111.652.195</u>	100	<u>8.711.165</u>	Common shares series B
Total	<u>97.111.652.195</u>		<u>10.711.165</u>	Total

Sesuai dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2015 sebagaimana tertuang dalam akta notaris No. 28 tanggal 10 Juli 2015 oleh Lenny Janis Ishak, SH; modal dasar Perusahaan ditingkatkan menjadi Rp10.711.165.219.500 (dalam satuan penuh) dengan komposisi saham seri A sejumlah sepuluh miliar (10.000.000.000) saham dengan nilai nominal dua ratus rupiah Rp200 setiap saham dan saham seri B sejumlah delapan puluh tujuh miliar seratus sebelas juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima (87.111.652.195) saham dengan nilai nominal seratus rupiah Rp100 setiap saham.

17. CAPITAL STOCK (continued)

On February 3, 2006, the Company listed its shares on the Indonesia Stock Exchange.

On March 1, 2017, Mandatory Convertible Bond owned by PT Huawei Tech Investment amounting to Rp1,237,862,796,141 has converted to shares of the Company of 6,189,313,980 shares.

The number of authorized shares as of December 31, 2023 and 2022 based on the Company's articles of association, was as follows:

Based on the result of the Extraordinary General Shareholders' Meeting held on June 22, 2015 as stated in the notarial deed No. 28 dated July 10, 2015 of Lenny Janis Ishak, SH; the authorized capital of the Company has increased to be of Rp10,711,165,219,500 (in full amount) consist of common stock series A of ten billion (10,000,000,000) share with nominal value of two hundred rupiah Rp200 per share and common stock series B of eighty seven billion, one hundred eleven million, six hundred fifty two thousand, one hundred ninety five (87,111,652,195) share with nominal value of one hundred rupiah Rp100 per share.

18. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Melalui Penawaran Umum Perdana pada tanggal 3 Februari 2006, Perusahaan telah menerima sebesar Rp605 miliar untuk penawaran lima miliar lima ratus juta (5.500.000.000) saham seri B atas nama dengan nilai nominal seratus rupiah Rp100 dengan harga penawaran seratus sepuluh rupiah Rp110.

18. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Through the Initial Public Offering on February 3, 2006, the Company received the amount of Rp605 billion for the offering of five billion five hundred million (5,500,000,000) share series B with nominal value of one hundred rupiah Rp100 at an offering price of one hundred and ten rupiah Rp110.

18. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Melalui Penawaran Umum Terbatas I pada tanggal 29 Februari 2008, Perusahaan menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua (8.638.079.352) saham dengan nilai nominal seratus rupiah Rp100 setiap saham yang ditawarkan dengan harga tiga ratus lima puluh rupiah Rp350 setiap saham dengan nilai keseluruhan sebanyak-banyaknya sebesar Rp3 triliun dan dengan selisih harga yang ditawarkan dengan harga nominal sebesar Rp2,2 triliun.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I, Perusahaan telah melakukan penyesuaian harga pelaksanaan sebesar seratus dua puluh tujuh rupiah Rp127 setiap sahamnya dan menerbitkan sebanyak tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu (38.549.131) lembar Waran Seri I yang berlaku efektif mulai tanggal 27 Maret 2008. Waran Seri I merupakan lanjutan dari Penawaran Umum Saham Perdana.

Selisih neto antara harga penawaran dengan harga nominal diakui sebagai tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

18. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Through the Rights Issue I on February 29, 2008, the Company issued a maximum of eight billion, six hundred thirty-eight million, seventy-nine thousand, three hundred fifty-two (8,638,079,352) shares with nominal value of one hundred rupiah Rp100 per share, which were offered at three hundred fifty rupiah Rp350 per share in the total maximum amount of Rp3 trillion and with an excess offering price over nominal price amounting to Rp2.2 trillion.

In accordance with Rights Issue I, the Company adjusted the exercise price to one hundred twenty-seven rupiah Rp127 per share and issued thirty-eight million, five hundred forty-nine thousand, one hundred thirty-one (38,549,131) Series I Warrants effective March 27, 2008. Series I Warrants were an extension of the Initial Public Offering.

Net excess of price over par value of shares between nominal price and offering price was recognized as additional paid-in capital as of December 31, 2023 and 2022 as follows:

	31 Desember 2022 dan 2022 December 31, 2023 and 2022			
	Sisa Lebih Harga Atas Nilai Nominal	Biaya Penerbitan	Selisih Lebih Harga Atas Nilai	
(Satuan penuh)				<i>(Full amount)</i>
Penerbitan 5.500.000.000 saham melalui penawaran umum (Catatan 1b)	55.000	27.229	27.771	<i>Issuance of 5,500,000,000 through initial public offering (Note 1b)</i>
Penerbitan 566.037.736 saham seri B melalui PMTHMETD (Catatan 1e)	93.396	-	93.396	<i>Issuance of 566,037,736 shares series B through PMTHMETD (Note 1e)</i>
Penerbitan 1.536.135.340 saham seri B melalui PMTHMETD (Catatan 1e)	253.462	11	253.451	<i>Issuance of 1,536,135,340 shares series B through PMTHMETD (Note 1e)</i>
Penerbitan 8.626.486.836 saham melalui PUT (Catatan 1c)	2.156.622	80.881	2.075.741	<i>Issuance of 8,626,486,836 shares through right issue (Note 1c)</i>
Penerbitan 1.076.515.248 saham melalui pelaksanaan waran	37.655	-	37.655	<i>Issuance of 1,076,515,248 shares through exercise of warrants</i>
Pengampunan pajak	857	-	857	<i>Tax amnesty</i>
Jumlah	2.596.992	108.121	2.488.871	Total

19. SAHAM BEREDAR YANG DIPEROLEH KEMBALI

Transaksi saham beredar yang diperoleh kembali adalah sebagai berikut:

Keterangan	Perio Perio	31 Desember 2023 dan 2022/ December 31, 2023 and 2022			Description
		Jumlah saham (Dalam satuan penuh)/ Number of Shares (in full amount)	Realisasi/ Realization (%)	Harga Nominal/ Par Value Shares	
Disetujui dalam rapat Direksi (Catatan 1d)	2008	11.000.000.000	-	-	Approved in Board of Directors Meeting (Note 1d)
Pembelian kembali	2008	689.000.000	6,27%	68.900	Buy back
Penerbitan kembali	2009	(579.000.000)		(57.900)	Re issuance
Jumlah		110.000.000		11.000	Total

Selisih neto antara harga perolehan dengan harga nominal per lembar saham diakui sebagai "Agi Saham Beredar yang Diperoleh Kembali" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Net excess of price over par value of shares between nominal price and acquisition price was recognized as "Premium on Treasury Stock" in the consolidated statements of financial position.

20. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

a. Kepentingan non-pengendali atas aset neto Entitas Anak

	31 Desember / December 31, 2023
PT Bakrie Connectivity	16
PT Anugerah Andalan Investama	(53.413)
Jumlah	(53.398)

b. Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali

	31 Desember / December 31, 2023
PT Anugerah Andalan Investama	43.287
Jumlah	43.287

19. TREASURY STOCK

Transactions regarding treasury stock were as follows:

20. NON-CONTROLLING INTEREST

a. Non-controlling interest in net assets of Subsidiaries

	31 Desember / December 31, 2022	
	(21)	PT Bakrie Connectivity
	(10.089)	PT Anugerah Andalan Investama
Total	(10.110)	Total

b. Income (loss) attributable to non-controlling interest

	31 Desember / December 31, 2022	
	5.074	PT Anugerah Andalan Investama
Total	5.074	Total

21. PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 meliputi pendapatan yang berasal dari jasa telekomunikasi dan teknologi informasi, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember / December 31,		
	2023	2022	
Pendapatan layanan infrastruktur media	61.120	26.414	Media infrastructure services
Pendapatan jasa telekomunikasi	8.688	9.451	Telecommunication services revenue
Pendapatan jasa periklanan digital	7.829	7.162	Digital advertising agency
Pendapatan jasa teknologi informasi	2.929	4.823	Information technology services
Jumlah pendapatan usaha	80.566	47.850	Total revenues
Beban pokok pendapatan	(66.704)	(32.096)	Cost of revenues
Laba Bruto	13.862	15.754	Gross income

Transaksi pendapatan yang berasal dari pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp68,95 miliar dan Rp38,24 miliar (Catatan 28).

21. REVENUE

Operating revenues for the year ended December 31, 2023 and 2022 represent revenues from telecommunication services and information technology, with details as follows:

Revenue transactions from related parties for the years ended December 31, 2023 and 2022, amounted to Rp68,95 billion and Rp38,24 billion, respectively (Note 28).

22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	31 Desember / December 31,		
	2023	2022	
Jasa profesional	7.260	9.102	Professional fees
Perbaikan dan pemeliharaan	923	1.904	Repair and maintenance
Penelitian dan pengembangan	38	1.800	Research and development
Beban imbalan kerja	3.540	1.674	Employee benefit expenses
Asuransi	625	1.142	Insurance
Transportasi	881	570	Transportation
Telepon, listrik dan air	541	439	Telephone, electricity and water
Perizinan, lisensi dan bea masuk	-	435	Permits, licenses and customs clearance
Beban pajak	1.407		Tax expenses
Biaya kantor	74	434	Office expenses
Iklan, promosi dan pameran	151	236	Advertising, promotion and exhibition
Sewa	758	104	Rent
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100 juta)	3.256	1.028	Others (each below Rp100 million)
Jumlah	19.454	18.870	Total

22. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)

Beban jasa profesional pada tahun buku 2023 dan 2022 terutama ditimbulkan dari jasa konsultan hukum terkait dengan penanganan perkara litigasi dimana Perusahaan mengajukan permohonan Bab 15 kepada Pengadilan Kepailitan New York berdasarkan Undang-undang Kepailitan Amerika Serikat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum berdasarkan hukum Amerika Serikat atas putusan PKPU Perusahaan. (Catatan 16)

22. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
(continued)

Professional fees in year 2023 and 2022 are mainly incurred from legal consulting services related to the handling of litigation cases where the Company submitted a Chapter 15 application to the New York Bankruptcy Court under the United States Bankruptcy Law to obtain legal recognition and protection under United States law for the Company's PKPU decision. (Notes 16)

23. BEBAN KARYAWAN

23. EMPLOYEES EXPENSES

	31 Desember / December 31,		
	2023	2022	
Gaji dan upah	19.665	13.169	Salaries and wages
Transportasi	150	178	Transportation
Tunjangan kesehatan	326	86	Medical allowance
Tunjangan uang makan	34	41	Meal allowance
Tunjangan PPh 21	765	23	Tax article 21 allowance
Beban PHK	56	-	Severance
Jumlah	20.996	13.497	Total

24. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

24. OTHER INCOME (CHARGES)

a. Selisih kurs

a. Foreign exchange

	31 Desember / December 31,		
	2023	2022	
Laba selisih kurs	9.520	31.961	Gain on foreign exchange
Rugi selisih kurs	(7.424)	(39.018)	Loss on foreign exchange
Jumlah	2.096	(7.057)	Total

b. Beban keuangan

b. Financing charges

	31 Desember / December 31,		
	2023	2022	
Beban bunga dan beban keuangan lainnya (Catatan 17)	89.799	89.799	Interest charges and other financial charges (Notes 17)
Administrasi bank	25	15	Bank charges
Jumlah	89.824	89.814	Total

c. Lain-lain

c. Others

	31 Desember / December 31,		
	2023	2022	
Penghasilan bunga	11	891	Interest income
Penurunan nilai aset	-	-	Impairment of assets
Lain-lain	122.341	(5.269)	Others
Jumlah	122.351	(4.378)	Total

24. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN (lanjutan)

Pendapatan lain-lain meningkat sehubungan dengan Perusahaan telah melakukan penyesuaian terhadap Kelebihan pengakuan pencatatan beban akrual kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi sebesar Rp 77,90 milyar yang terdiri dari Beban Hak penyelenggaraan (BHP) sebesar Rp 55,99 milyar dan Universal Service Obligation (USO) Rp 21,92 milyar. Selain itu Perusahaan juga telah melakukan penyesuaian atas pengakuan pencatatan hutang PT Smartfren Telecom Tbk sebesar Rp 24,04 milyar.

24. OTHER INCOME (CHARGES) (continued)

Other income increased in connection with the Company having made adjustments to the excess recognition of accrued expense recording to the Ministry of Communication and Information amounting to IDR 77.90 billion, consisting of Maintenance Rights Expense (BHP) amounting to IDR 55.99 billion and Universal Service Obligation (USO) IDR 21.92 billion. Apart from that, the Company has also made adjustments to the recorded debt recognition of PT Smartfren Telecom Tbk amounting to IDR 24.04 billion.

25. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

	31 Desember / December 31, 2023
Pajak Pertambahan Nilai	-
Pajak Penghasilan Pasal 23	-
Jumlah	-

25. TAXATION

a. Prepaid taxes

	31 Desember / December 31, 2022	
	2.615	Value-Added Tax
	-	Income taxes Article 23
	2.615	Total

b. Utang pajak

	31 Desember / December 31, 2023
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	19.828
Pasal 23	4.643
Pasal 26	2.215
Pasal 29	298
Pasal 4 (2)	103
SKPKB Pajak Pertambahan N	1.202
Pajak Pertambahan Nilai	6.234
Jumlah	34.524

b. Taxes payable

	31 Desember / December 31, 2022	
	15.268	Income taxes
	1.766	Article 21
	3.933	Article 23
	363	Article 26
	38	Article 29
	-	Article 4 (2)
	-	Tax assesment Lettet-VAT out
	6.692	Value-Added Tax
	28.060	Total

Pada tanggal 11 Oktober 2023, Entitas anak (PT Vivat) menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dengan nomor 00040/207/21/011/23, atas PPN untuk Desember 2021 sebesar Rp 1.251.688.143.

On October 11, 2023, the Subsidiary(PT Vivat) received an Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB") with number 00040/207/21/011/23 for VAT December 2021 amounting to Rp 1.251.688.143.

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

25. TAXATION (continued)

c. Pajak Kini

c. Current Tax

Rekonsiliasi antara rugi sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran rugi fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between loss before income tax expense as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the estimated fiscal loss for the years ended December 31, 2023 and 2022 was as follows:

		31 Desember / December 31,		
		2023	2022	
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	7.930		(117.972)	Profit (loss) before income tax expenses per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba (rugi) Entitas Anak sebelum beban pajak penghasilan	(36.455)		10.043	Income (loss) of Subsidiaries before income tax expenses
Rugi sebelum beban pajak yang dapat diatribusikan kepada Perusahaan	(28.525)		(107.929)	Loss before income tax expense attributable to the Company
Beda temporer				Temporary differences
Depresiasi	107		24	Depreciation
Penyisihan imbalan kerja	288		209	Provision for employee benefits
Jumlah	395		234	Total
		31 Desember / December 31,		
		2023	2022	
Beda tetap				Permanent differences
Beban bunga	89.799		89.799	Interest expenses
Jumlah	89.799		89.799	Total
Taksiran rugi fiskal	61.669		(17.895)	Estimated fiscal loss
		31 Desember / December 31,		
		2023	2022	
2018	(119.415)		(119.415)	2018
2019	7.858		7.858	2019
2020	(5.284)		(5.284)	2020
2021	(7.082)		(7.082)	2021
2022	(17.895)		(17.895)	2022
2023	61.669		-	2023
Total rugi fiskal	(80.149)		(141.818)	Total fiscal loss
Jumlah Akumulasi Rugi Fiskal	(80.149)		(141.818)	Estimated Cumulative Fiscal Loss

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

Perusahaan tidak melakukan penyisihan beban pajak penghasilan kini karena Perusahaan masih mengalami rugi fiskal.

d. Pajak tangguhan

Manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan karena besar kemungkinan aset pajak tangguhan tidak dapat terealisasi di masa yang akan datang.

25. TAXATION (continued)

No provision for current income tax expense was made due to the Company still being in a fiscal loss position.

d. Deferred Tax

The management believed that the Company did not recognize deferred tax assets because it is probable that deferred tax assets can not be realized in the future.

26. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha yang normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

26. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Group entered into transactions with related parties.

	31 Desember / December 31,		
	2023	2022	
Penjualan kepada:			Revenue to:
PT Cakrawala Andalas Televisi	12.761	17.400	PT Cakrawala Andalas Televisi
PT Lativi Media Karya	18.425	11.342	PT Lativi Media Karya
PT Digi Bintang Sinergi	196	4.867	PT Digi Bintang Sinergi
PT Viva Media Baru	-	14	PT Viva Media Baru
Jumlah	31.382	33.623	Total
Persentase terhadap Jumlah Penjualan Konsolidasian	38,9520%	70,2682%	Percentage to Total Consolidated Revenues

Sifat dan hubungan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Nature of relationships and transactions with related parties were as follows:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Related Parties
PT Bakrie Swasakti Utama	Afiliasi / Affiliate	PT Bakrie Swasakti Utama
PT Provinces Indonesia	Afiliasi / Affiliate	PT Provinces Indonesia
PT Multi Kontrol Nusantara	Afiliasi / Affiliate	PT Multi Kontrol Nusantara
PT Viva Media Baru	Afiliasi / Affiliate	PT Viva Media Baru
PT Asia Global Media	Afiliasi / Affiliate	PT Asia Global Media
Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika	Afiliasi / Affiliate	Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika
PT Bakrie Global Ventura	Afiliasi / Affiliate	PT Bakrie Global Ventura
PT Cakrawala Andalas Televisi	Afiliasi / Affiliate	PT Cakrawala Andalas Televisi

26. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

26. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Related Parties
PT Lativi Media Karya	Afiliasi / Affiliate	PT Lativi Media Karya
PT Digi Bintang Sinergi	Afiliasi / Affiliate	PT Digi Bintang Sinergi
PT Viva Media Baru	Afiliasi / Affiliate	PT Viva Media Baru
Piutang Pihak Berelasi		Due From Related Parties
	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022
Piutang jangka panjang		Non current receivable
PT Cakrawala Andalas Televisi	-	2.820
PT Lativi Media Karya	2.620	2.820
Jumlah	2.620	5.640
Persentase terhadap Jumlah Piutang Konsolidasian	8,5111%	47,1104%
		Total
		Percentage to Total Consolidated Receivables
Utang Pihak Berelasi		Due To Related Parties
	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022
Liabilitas jangka panjang		Non current liabilities
Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika	35.186	35.186
PT Bakrie Global Ventura	12.086	12.086
PT Multi Kontrol Nusantara	2.851	2.851
PT Viva Media Baru	146	146
PT Cakrawala Andalas Televisi	21.839	11.096
Jumlah	72.108	61.365
Persentase terhadap Jumlah Liabilitas Konsolidasian	1,2130%	1,0418%
		Total
		Percentage to Total Consolidated Liabilities

Utang pihak berelasi yang diperoleh PT Bakrie Connectivity (BCON), Entitas Anak, dari Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika (Komunika) merupakan utang usaha yang pembayarannya ditunda sejak tanggal 23 Desember 2014.

Due to a related party obtained by PT Bakrie Connectivity (BCON), a Subsidiary, from Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika (Komunika) represents trade payable, which payment was deferred starting from December 23, 2014.

Utang pihak berelasi yang diperoleh Perusahaan dari PT Bakrie Global Ventura merupakan utang yang pembayarannya ditunda sejak tanggal 24 Maret 2015.

Due to a related party obtained by the Company from PT Bakrie Global Ventura represents payable, which payment was starting from March 24, 2015.

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang masing-masing dihitung oleh aktuaris independen KKA Nurichwan dan PT Sigma Prima Solusindo dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

Tingkat diskonto	6,79% pada 31 Desember 2023 dan 7,01% pada 31 Desember 2022
Tingkat kenaikan gaji	6,5% per tahun / per annum
Tingkat mortalitas	TMI-IV tahun 2019 / TMI-IV year 2019
Tingkat kemungkinan	5% dari tingkat mortalitas / 5% of mortality rate
Usia pensiun normal	55 tahun / 55 years
Tingkat Pengunduran diri	1% - 5%

Analisa sensitivitas kuantitatif liabilitas imbalan kerja terhadap perubahan asumsi utama tertimbang pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	Peningkatan (Penurunan) / Increase (Decrease)
Tingkat diskonto	1,00%
Tingkat kenaikan gaji	1,00%

Kelompok Usaha tidak menghadapi risiko signifikan terkait program imbalan kerja, atas perubahan asumsi di atas.

Tabel berikut ini merangkum komponen-komponen atas beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan total yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai liabilitas imbalan kerja untuk Perusahaan.

Liabilitas imbalan kerja karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023
Nilai kini liabilitas kewajiban kerja	45.709
Liabilitas imbalan kerja	45.709

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

27. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

The employee benefits liability of the Group as of December 31, 2023 and 2022 as determined by an independent firm of actuaries KKA Nurichwan and PT Sigma Prima Solusindo respectively using the "Projected Unit Credit" method and considering the following assumptions:

Discount rate
Salary increment rate
Mortality rate
Disability rate
Normal retirement age
Resignation rate

The quantitative sensitivity analysis of the employee benefits liability to the changes in the weighted principal assumptions as of December 31, 2023 was as follows:

	liabilitas imbalan pasti/ Present value of defined benefits obligation	
	2.368	Discount rate
	2.666	Salary increment rate

The Group was not exposed to a number of significant risks related to its employee benefit plans, from the changes assumptions above.

The following tables summarize the components of employee benefits expense recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and amounts recognized in the consolidated statement of financial position as employee benefits liability for the Company.

Employee benefits liability for the years ended December 31, 2023 and 2022 as follow:

	31 Desember/ December 31, 2022	
	12.708	Present value of benefits liability
	12.708	Employee benefits liability

Movements of employee benefits liability were as follows:

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

27. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal	12.708	14.160	<i>Beginning balance</i>
Beban imbalan kerja karyawan	3.994	1.674	<i>Employee benefits expense</i>
Rugi (penghasilan)			<i>Other comprehensive</i>
komprehensif lain	35.394	(2.409)	<i>loss (income)</i>
Realisasi pembayaran			
manfaat	(6.387)	(717)	<i>Actual benefits payments</i>
Saldo Akhir	45.709	12.708	<i>Ending Balance</i>

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Movements of the present value of the employee benefits liability were as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Nilai kini liabilitas imbalan			<i>Present value of employee</i>
kerja pada awal tahun	12.708	14.160	<i>benefits liability at beginning</i>
Biaya jasa kini	3.101	746	<i>of the year</i>
Biaya bunga	893	952	<i>Current-service cost</i>
Dampak kurtailmen atau			<i>Interest cost</i>
penyelesaian program			<i>Cutailment effect or</i>
Pengukuran kembali dari :			<i>program settlement</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial			<i>Remeasurements from :</i>
yang timbul dari :			<i>Actuarial gain (losses)</i>
Perubahan dalam asumsi			<i>arisig from:</i>
aktuaris	-	(24)	<i>changes in actuary</i>
Beban komprehensif lain	35.394	(2.409)	<i>assumption</i>
Imbalan yang dibayar	(6.387)	(717)	<i>Other comprehensive loss</i>
			<i>Benefit paid</i>
Nilai Kini Liabilitas Imbalan			<i>Present Value of Employee</i>
 Kerja Pada Akhir Tahun	45.709	12.708	<i>Benefits Liability</i>
			<i>at End of Year</i>

Perbandingan nilai kini liabilitas imbalan kerja, dan penyesuaian yang timbul akibat perbedaan antara asumsi aktuarial dan kenyataan selama lima (5) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Comparison of the present value of employee benefits liability, and the experience adjustments (the effects of differences between the previous actuarial assumptions and what has actually occurred) over the last five (5)

	2023	2022	2021	2020	2019	
Nilai kini liabilitas						<i>Present value of employee</i>
kewajiban kerja	(45.709)	(12.708)	(14.160)	(385)	(206)	<i>benefit liability</i>
Penyesuaian dalam						<i>Adjustment on</i>
liabilitas	(36.963)	39	(246)	(246)	(952)	<i>liability</i>

28. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan yang dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 :

28. FINANCIAL INSTRUMENTS

The following table presents the carrying amounts and the estimated fair values: of the financial instruments carried in the consolidated statements of financial position as of December 31, 2023 and 2022 :

31 Desember 2023 / December 31, 2023			
Akun	Nilai Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	Accounts Financial Assets
Aset Keuangan			
<i>Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi</i>			
Kas	19	19	<i>Measured at amortized Cost</i> Cash on hand
<i>Pinjaman yang diberikan dan piutang</i>			
Kas di bank	2.480	2.480	<i>Loans and receivables</i> Cash in bank
Piutang usaha	28.183	28.183	Trade receivables
Jumlah Aset Keuangan	30.682	30.681	Total Financial Assets
31 Desember 2023 / December 31, 2023			
Akun	Nilai Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	Accounts Financial Liabilities
Liabilitas Keuangan			
<i>Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi</i>			
Utang usaha	458.548	458.548	<i>Measured at amortized Cost</i> Trade payables
Utang lain-lain	172.711	172.711	Other payables
Beban akrual	139.332	139.332	Accrued expenses
Utang pihak berelasi	72.108	72.108	Due to related parties
Utang yang diselesaikan melalui PKPU	5.021.740	5.021.740	Settlement of payables through PKPU
Jumlah Liabilitas Keuangan	5.864.438	5.864.438	Total Financial Liabilities
31 Desember 2022/ December 31, 2022			
Akun	Nilai Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	Accounts Financial Assets
Aset Keuangan			
<i>Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi</i>			
Kas	23	23	<i>Measured at amortized Cost</i> Cash on hand
<i>Pinjaman yang diberikan dan piutang</i>			
Kas di bank	381	381	<i>Loans and receivables</i> Cash in bank
Piutang usaha	5.357	5.357	Trade receivables
Jumlah Aset Keuangan	5.761	5.761	Total Financial Assets

28. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

28. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Akun	31 Desember 2022/ December 31, 2022		Accounts Financial Liabilities
	Nilai Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
<u>Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi</u>			<u>Measured at amortized Cost</u>
Utang usaha	443.088	443.088	Trade payables
Utang lain-lain	165.852	165.852	Other payables
Beban akrual	247.088	247.088	Accrued expenses
Utang pihak berelasi	61.365	61.365	Due to related parties
Utang yang diselesaikan melalui PKPU	4.931.941	4.931.941	Settlement of payables through PKPU
Jumlah Liabilitas Keuangan	5.849.334	5.849.334	Total Financial Liabilities

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instrument for which it is practicable to estimate such value:

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek :

Short-term financial assets and liabilities :

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu (1) tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, kas yang dibatasi penggunaannya, investasi jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual).

Short-term financial instruments with remaining maturities of one (1) year or less (cash and cash equivalents, trade receivables, restricted cash., short-term investments, trade payables, other payables and accrued expenses).

Instrumen keuangan ini sangat mendekati nilai tercatat mereka karena jatuh tempo mereka dalam jangka pendek (Level 2).

These financial instruments approximate to their carrying amounts largely due to their short-term maturities (Level 2).

Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang :

Long-term financial assets and liabilities :

a) Liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga tetap dan variabel yang tidak dikuotasikan (pinjaman jangka panjang dan utang sewa pembiayaan).

a) Unquoted long-term fixed-rate and variable-rate financial liabilities (long-term loan and finance lease payables).

Nilai wajar dari liabilitas keuangan ini ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama (Level 2).

The fair values of these financial liabilities are determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities (Level 2).

28. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

- b) Liabilitas keuangan yang dikuotasikan dalam pasar aktif (aset keuangan tersedia untuk dijual dan wesel senior).

Nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual ditentukan dengan mengacu pada harga pasar terakhir.

Nilai wajar dari Wesel Senior yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang berlaku (Level 1).

- c) Aset keuangan jangka panjang

Untuk aset keuangan tidak lancar lainnya yang tidak dikuotasi di harga pasar dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal tanpa menimbulkan biaya yang berlebihan, dicatat berdasarkan nilai nominal dikurangi penurunan nilai.

Tabel di atas ini menganalisis instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan penilaian. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- a) harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1);
- b) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung (Level 2); dan
- c) input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Kelompok Usaha dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko Kelompok Usaha secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan mereka tahun-tahun sebelumnya.

28. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

- b) *Financial instruments quoted on an active market (available-for-sale financial asset and senior notes).*

The fair value of available-for-sale financial asset is determined based on the latest published quoted price.

The fair value of the Senior Notes issued by the Group that are traded on an active market is determined with reference to their quoted market prices (Level 1).

- c) *Long-term financial assets*

Other non-current financial assets that are not stated at quoted market price and whose fair value cannot be reliably measured without incurring excessive costs are carried at their nominal amounts less any impairment losses.

The table above analyzes the financial instruments measured at fair value by level of valuation method. The different levels of valuation methods have been defined as follows:

- a) *quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- b) *inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (Level 2); and*
- c) *inputs are unobservable inputs for the asset or liability (Level 3).*

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group is affected by various financial risks, including credit risk, foreign currency risk, interest rate risk and liquidity risk. The Group's overall risk management objectives are to effectively manage these risks and minimize potential adverse effects on its previous years of financial performance.

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen risiko keuangan berada dibawah pengawasan langsung oleh Direksi dan terutama oleh *Chief Financial Officer* (CFO). CFO memiliki pusat departemen keuangan berikut kebijakan yang telah disetujui oleh Divisi Manajemen Risiko dan Direksi. Departemen ini mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keuangan dalam kerjasama yang erat dengan unit-unit operasi Perusahaan. Divisi Manajemen Risiko dan Direksi menentukan prinsip manajemen risiko keuangan secara keseluruhan, serta kebijakan pada area tertentu, seperti risiko mata uang asing, risiko tingkat suku bunga, risiko kredit, penggunaan instrumen keuangan derivatif dan non-derivatif, dan investasi atas kelebihan likuiditas.

a. Risiko kredit

Eksposur Kelompok Usaha terhadap risiko kredit timbul dari wanprestasi pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar nilai tercatat aset keuangan Kelompok Usaha, sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2023
Kas dan setara kas (kecuali kas)	2.480
Piutang usaha	
Pihak ketiga	3.492
Pihak berelasi	24.671
Jumlah	30.643

Kelompok Usaha mempunyai kebijakan dan prosedur kredit untuk memastikan evaluasi kredit yang berkesinambungan dan pemantauan saldo secara aktif. Kelompok Usaha mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dan aset derivatif dengan memonitor reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan terkait dengan piutang usaha, hal ini disebabkan keragaman pelanggan.

Analisis umur aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan yang lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan tetapi tidak mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Financial risk management is under the direct supervision of the Board of Directors and especially the Chief Financial Officer (CFO). The CFO has a central treasury department that follows policies approved by the Risk Management Division and Board of Directors. The department identifies and evaluates financial risks in close cooperation with the Company's operating units. The Risk Management Division and Board of Directors determine the principles for overall financial risk management, as well as policies covering specific areas, such as foreign currency risk, interest rate risk, credit risk, use of derivative and non-derivative financial instruments, and investment in excess of liquidity.

a. Credit risk

The Group's exposure to credit risk arises from the default of other parties, with maximum exposure equal the carrying amount of its financial assets, as follows:

	31 Desember / December 31, 2022	
	381	Cash and cash equivalents (except cash on hand)
		Trade receivables
	975	Third parties
	5.357	Related parties
Jumlah	6.713	Total

The Group has in place credit policies and procedures to ensure the ongoing credit evaluation and active account monitoring. The Group manages credit risk exposed from their deposits with banks and derivative assets by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counterparty. There are no significant concentration of credit risk with respect to trade receivables due to its diverse customer base.

The analysis of the age of financial assets that were not yet due or not impaired and past due as at the end of the reporting period but not impaired was as follows:

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

a. Risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk (continued)

		31 Desember 2023 / December 31, 2023					
		Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai / Past Due but Not Impaired					
	Belum Jatuh Tempo ataupun Menga-lami Penuru-nan Nilai/ <i>Neither Past Due nor Impai- red</i>	Kurang dari 3 bulan/ <i>Less than 3 months</i>	3 bulan- 6 bulan/ 3 <i>months - 6 months</i>	6 bulan - 1 tahun/6 <i>months - 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun <i>/over 1 year</i>	Total / <i>Total</i>	
Kas dan setara kas (kecuali kas)	2.480	-	-	-	-	2.480	Cash and cash equivalents (except cash on hand)
Piutang usaha	-	1.540	11.648	1.320	13.655	28.163	Trade receivables
Jumlah	2.480	1.540	11.648	1.320	13.655	30.643	Total

		31 Desember 2022 / December 31, 2022					
		Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai / Past Due but Not Impaired					
	Belum Jatuh Tempo ataupun Menga-lami Penuru-nan Nilai/ <i>Neither Past Due nor Impai- red</i>	Kurang dari 3 bulan/ <i>Less than 3 months</i>	3 bulan- 6 bulan/ 3 <i>months - 6 months</i>	6 bulan - 1 tahun/6 <i>months - 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun <i>/over 1 year</i>	Total / <i>Total</i>	
Kas dan setara kas (kecuali kas)	381	-	-	-	-	381	Cash and cash equivalents (except cash on hand)
Piutang usaha	-	-	324	15	5.300	5.639	Trade receivables
Jumlah	381	-	324	15	5.300	6.020	Total

Manajemen melakukan penilaian atas kualitas kredit *counterparties* karena tidak ada peringkat kredit eksternal yang tersedia dan terpenuhi, dimana tidak terdapat risiko signifikan yang terkait dengan mereka.

The management assessed the credit quality of the *counterparties* for which no external credit rating is available and is satisfied, that there is no significant risk associated with them.

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko mata uang asing

Kelompok Usaha terekspos risiko perubahan nilai tukar mata uang asing terutama dari transaksi, aset dan liabilitas tertentu dalam Dolar AS yang timbul karena aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional sehari-hari.

Kelompok Usaha memonitor dan mengelola risiko ini dengan menyepadankan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dengan aset keuangan dalam mata uang asing terkait dan melakukan pembelian atau penjualan mata uang asing saat diperlukan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Kelompok usaha memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2023
Aset	
Kas	
Dolar AS	41
Jumlah Aset	41
Liabilitas	
Utang usaha	
Dolar AS dan mata uang lain	87.666
Utang lain-lain	
Dolar AS	268
Utang pihak berelasi	
Dolar AS	12.086
Utang yang diselesaikan melalui PKPU	
Dolar AS dan mata uang lain	6.725.637
Jumlah Liabilitas	6.825.657
Liabilitas Neto	(6.825.616)

Berdasarkan estimasi manajemen, sampai dengan tanggal pelaporan Kelompok Usaha berikutnya, kurs Rupiah terhadap Dolar AS dapat melemah/menguat 5% dibandingkan kurs pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Foreign currency risk

The Group is exposed to changes in foreign currency exchange rates primarily from certain transactions, assets and liabilities in US Dollar which arise from financing activities and daily operations.

The Group monitors and manages the risk by matching the foreign currency financial liabilities with relevant foreign currency assets and buying or selling foreign currencies at spot rate when necessary.

As of December 31, 2023 and 2022, the Group had monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows:

	31 Desember / December 31, 2022	
		Assets
		Cash
	51	US Dollar
	51	Total Assets
		Liabilities
		Trade payables
	89.600	US Dollar and other
		currencies
		Other payables
	297	US Dollar
		Due to related party
	12.086	US Dollar
		Settlement payables
		through PKPU
	6.725.637	US Dollar and other
		currencies
	6.827.620	Total Liabilities
	(6.827.569)	Liabilities-Net

Based on management's estimate, until the Group's next reporting date, the exchange rate of Rupiah against US Dollar may weaken/strengthen by 5%, compared to the exchange rate as of December 31, 2023 and 2022.

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko mata uang asing (lanjutan)

Jika nilai tukar mata uang Rupiah Indonesia berlanjut melemah/menguat 5% terhadap mata uang Dolar AS yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2023 dengan seluruh variabel lain tetap, maka rugi sebelum pajak penghasilan pada tahun 31 Desember 2023 masing-masing akan berupa peningkatan/penurunan sekitar Rp. 391 juta.

c. Risiko tingkat suku bunga

Eksposur Kelompok Usaha terhadap risiko tingkat suku bunga terutama sehubungan dengan pinjaman serta aset dan liabilitas berbunga. Kebijakan Kelompok Usaha adalah mendapatkan tingkat suku bunga yang paling menguntungkan.

d. Risiko likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati termasuk mengatur kas dan setara kas yang cukup untuk menunjang aktivitas usaha secara tepat waktu. Kelompok Usaha mengatur keseimbangan antara kesinambungan kolektibilitas dan fleksibilitas piutang melalui penggunaan utang bank dan pinjaman lainnya.

Tabel di bawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif yang diperlukan dalam pemahaman jatuh tempo kebutuhan arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (yang terdiri dari saldo pokok terutang). Utang yang diselesaikan melalui PKPU sebagian akan diselesaikan melalui penerbitan *Mandatory Convertible Bond*.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Foreign currency risk (continued)

If the extent the Indonesian Rupiah had weakened/strengthened by 5% against US Dollar at December 31, 2023 with all other variables held constant, at December 31, 2023 loss before income tax would have been an increase/a decrease of approximately Rp391 million, respectively.

c. Interest rate risk

The Group's exposure to interest rate risk relates primarily to its borrowing obligations and interest-bearing assets and liabilities. The Group's policies are to obtain the most favorable interest rates available.

d. Liquidity risk

Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents to support business activities on a timely basis. The Group maintains a balance between continuity of accounts receivable collectability and flexibility through the use of bank loans and other borrowings.

The following table analyzes the Group's financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all non-derivative financial liabilities which are essential in understanding the timing of cash flows requirements. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (consisting of outstanding principal balance). Settlement of payables through PKPU will be settled partially by issuing Mandatory Convertible Bonds.

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

d. Liquidity risk (continued)

31 Desember 2023 / December 31, 2023						
Nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto/ Contractual undiscounted cash flow amounts						
	Nilai tercatat/ Carrying amounts	Total/ Total	S/d 1 tah - un/ With - in 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
Utang usaha dan utang lain-lain	631.259	631.259		631.259	-	Trade and other payables
Beban akrual	139.332	139.332	-	-	139.332	Accrued expenses
Utang pihak berelasi	72.109	72.109	-	72.109	-	Due to related parties
Utang yang diselesaikan melalui PKPU	5.021.740	5.021.740	-	-	5.021.740	Settlements of payables through PKPU
Jumlah	5.864.440	5.864.440	-	703.368	5.161.072	Total

December 31, 2022 / December 31, 2022						
Nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto/ Contractual undiscounted cash flow amounts						
	Nilai tercatat/ Carrying amounts	Total/ Total	S/d 1 tah - un/ With - in 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
Utang usaha dan utang lain-lain	623.033	623.033	-	623.033	-	Trade and other payables
Beban akrual	247.088	247.088	-	-	247.088	Accrued expenses
Utang pihak berelasi	61.365	61.365	-	61.365	-	Due to related parties
Utang yang diselesaikan melalui PKPU	4.931.941	4.931.941	-	-	4.931.941	Settlements of payables through PKPU
Jumlah	5.863.427	5.863.427	-	684.398	5.179.029	Total

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Pengelolaan Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan permodalan Kelompok Usaha adalah untuk memastikan bahwa dipertahankannya peringkat kredit yang kuat dan rasio modal yang sehat agar dapat mendukung kelancaran usahanya dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Kelompok Usaha mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya. Agar dapat menjaga dan menyesuaikan struktur modalnya, Kelompok Usaha akan menyesuaikan jumlah dari pembayaran dividen kepada para pemegang saham atau tingkat pengembalian modal atau menerbitkan surat saham. Tidak ada perubahan dalam tujuan, kebijakan dan proses dan sama seperti penerapan tahun-tahun sebelumnya.

Kelompok Usaha memonitor struktur modalnya dengan menggunakan rasio utang terhadap modal dimana total utang dibagi dengan total modal. Total utang ini adalah utang pokok dari pinjaman yang berbunga dan total modal adalah total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

30. LABA (RUGI NETO PER SAHAM DASAR DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

	31 Desember / December 31, 2023
Laba (rugi) neto diatribusikan kepada pemilik entitas induk	15.711
Jumlah rata-rata tertimbang saham per saham dasar (angka penuh)	36.773.904.635
Laba (rugi) per saham dasar (dalam satuan penuh)	0,16

31. INFORMASI SEGMENT

a. Segmen usaha

Kelompok Usaha mempunyai segmen usaha dibidang jasa telekomunikasi, jasa teknologi informasi, jasa layanan infrastruktur media dan jasa periklanan digital.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Capital Management

The main objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Group manages its capital structure and makes adjustments with respect to changes in economic conditions and the characteristics of its business risks. In order to maintain and adjust its capital structure, the Group may adjust the amount of dividend payments to shareholders, return capital structure or issue shares certificates. No changes have been made in the objectives, policies and processes as they have been applied in previous years.

The Group monitors its use of capital structure using a debt-to-equity ratio which is total debt divided by total equity. Total debt represents interest bearing borrowings, while equity represents total equity attributable to owners of the parent.

30. INCOME (LOSS) PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS OF PARENTS

	31 Desember / December 31, 2022	
	(110.442)	Net income (loss) attributable to the owners of parents
	36.773.904.635	Weighted average number of ordinary shares (full amount)
	(3,27)	Basic income (loss) per share (in full amount)

31. SEGMENT INFORMATION

a. Business Segment

The Group has business segments in the fields of telecommunications services, information technology services, media infrastructure services and digital advertising services.

31. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

31. SEGMENT INFORMATION (continued)

Rincian pendapatan jasa telekomunikasi dan teknologi informasi berdasarkan jenis jasa layanan adalah sebagai berikut:

The details of telecommunication and information technology service revenues by service type are as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023					
	Jasa Telekomunikasi	Jasa Teknologi Informasi	Layanan Infrastruktur Media	Jasa Periklanan Digital	Eliminasi	Total
Pendapatan/ Revenues	8.688	3.052	61.120	7.829	(123)	80.566
Beban pokok/ Cost of revenue	(5.766)	(2.106)	(57.754)	(1.201)	123	(66.704)
Rugi bruto/ Gross loss	2.922	945	3.366	6.628	-	13.862
Beban usaha/ Operating expenses	(2.667)	981	22.205	6.093	-	26.611
Laba usaha/ Operating profit	5.589	(35)	(18.838)	535	-	(12.749)
Pendapatan (beban) - net/ Income (expense) - net	20.070	21.955	(5.804)	5	(70.850)	(34.624)
Pajak/tax	66	17	-	28	-	111
Laba/(Rugi) bersih						
Income/(loss) net	(14.546)	(22.007)	(13.034)	502	70.850	21.764
Penghasilan/(beban) Komprehensif lain/ Income/(loss) other comprehensive	1.022	-	(36.417)	-	-	(35.395)
Laba /(rugi)						
komprehensif						
Income/(loss)						
comprehensive	(13.524)	(22.007)	(49.451)	502	70.850	(13.631)
Keperluan Non pengendali/ Non controlling interest	-	(26.897)	-	-	(16.390)	(43.287)
Laba bersih/net income	(13.524)	4.890	(49.451)	502	87.240	29.656

	31 Desember 2023/ December 31, 2023					
	Jasa Telekomunikasi	Jasa Teknologi Informasi	Layanan Infrastruktur Media	Jasa Periklanan Digital	Eliminasi	Total
Aset segmen/ Segment assets	249.045	22.514	57.677	2.078	(271.044)	60.270
Liabilitas segmen/ Segmen liabilities	6.277.557	10.645	112.449	1.804	(457.783)	5.944.672

31. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

31. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Desember 2022/ December 31, 2022					Total
	Jasa Telekomunikasi	Jasa Teknologi Informasi	Layanan Infrastruktur Media	Jasa Periklanan Digital	Eliminasi	
Pendapatan/ Revenues	9.451	4.823	26.414	7.162	-	47.850
Beban pokok/ Cost of revenue	(2.769)	(1.012)	(27.738)	(577)	-	(32.096)
Rugi bruto/ Gross loss	6.682	3.811	(1.324)	6.585	-	15.754
Beban usaha/ Operating expenses	(3.255)	1.197	27.100	7.436	-	32.478
Laba usaha/ Operating profit	9.937	2.615	(28.424)	(851)	-	(16.723)
Pendapatan (beban) - net/ Income (expense) - net	60.413	63.230	(16.221)	15	(6.280)	101.156
Pajak/tax	41	5	-	-	-	46
Laba/(Rugi) bersih						
Income/(loss) net	(50.517)	(60.621)	(12.202)	(866)	6.280	(117.926)
Penghasilan/(beban) Komprehensif lain/ Income/(loss) other comprehensive	(1.950)	-	4.360	-	-	2.409
Laba /(rugi) komprehensif						
Income/(loss) comprehensive	(52.467)	(60.621)	(7.843)	(866)	6.280	(115.517)
Kepentingan Non pengendali/ Non controlling interest	-	(2.481)	-	-	(2.593)	(5.074)
Laba bersih/net income	(52.467)	(58.140)	(7.843)	(866)	8.873	(110.442)

	31 Desember 2022/ December 31, 2022					Total
	Jasa Telekomunikasi	Jasa Teknologi Informasi	Layanan Infrastruktur Media	Jasa Periklanan Digital	Eliminasi	
Aset segmen/ Segment assets	308.127	1.724	30.951	951	(308.477)	33.275
Liabilitas segmen/ Segmen liabilities	6.317.872	12.876	103.450	1.660	(545.757)	5.890.102

31. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

a. Segmen Geografis

Tabel berikut menunjukkan distribusi dari seluruh pendapatan, laba bersih dan aset Grup berdasarkan geografis:

31. SEGMENT INFORMATION (continued)

a. Geographic Segment

The following table shows the distribution of all Revenues, net income and assets of the Group by geographical:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023					Total
	Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang	DKI Jakarta dan Jawa Barat	16 Provinsi (Jawa, Sumatera Kalimantan)	Seluruh Indonesia	Eliminasi	
Pendapatan/ Revenues	8.688	3.052	61.120	7.829	(123)	80.566
Beban pokok/ Cost of revenue	(5.766)	(2.106)	(57.754)	(1.201)	123	(66.704)
Rugi bruto/ Gross loss	2.922	945	3.366	6.628	-	13.862
Beban usaha/ Operating expenses	(2.667)	981	22.205	6.093	-	26.611
Laba usaha/ Operating profit	5.589	(35)	(18.838)	535	-	(12.749)
Pendapatan (beban) - net/ Income (expense) - net	20.070	21.955	(5.804)	5	(70.850)	(34.624)
Pajak/tax	66	17	-	28	-	111
Laba/(Rugi) bersih						
Income/(loss) net	(14.546)	(22.007)	(13.034)	502	70.850	21.764
Penghasilan/(beban) Komprehensif lain/ Income/(loss) other comprehensive	1.022	-	(36.417)	-	-	(35.395)
Laba /(rugi) komprehensif						
Income/(loss) comprehensive	(13.524)	(22.007)	(49.451)	502	70.850	(13.631)
Kepentingan Non pengendali/ Non controlling interest	-	(26.897)	-	-	(16.390)	(43.287)
Laba bersih/net income	(13.524)	4.890	(49.451)	502	87.240	29.656

	31 Desember 2023/ December 31, 2023					Total
	Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang	DKI Jakarta dan Jawa Barat Informasi	16 Provinsi (Jawa, Sumatera Kalimantan)	Seluruh Indonesia	Eliminasi	
Aset segmen/ Segment assets	249.045	22.514	57.677	2.078	(271.044)	60.270
Liabilitas segmen/ Segmen liabilities	6.277.557	10.645	112.449	1.804	(457.783)	5.944.672

31. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

31. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Desember 2022/ December 31, 2022					
	Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang	DKI Jakarta dan Jawa Barat Informasi	16 Provinsi (Jawa, Sumatera Kalimantan)	Seluruh Indonesia	Eliminasi	Total
Pendapatan/ Revenues	9.451	4.823	26.414	7.162	-	47.850
Beban pokok/ Cost of revenue	(2.769)	(1.012)	(27.738)	(577)	-	(32.096)
Rugi bruto/ Gross loss	6.682	3.811	(1.324)	6.585	-	15.754
Beban usaha/ Operating expenses	(3.255)	1.197	27.100	7.436	-	32.478
Laba usaha/ Operating profit	9.937	2.615	(28.424)	(851)	-	(16.723)
Pendapatan (beban) - net/ Income (expense) - net	60.413	63.230	(16.221)	15	(6.280)	101.156
Pajak/tax	41	5	-	-	-	46
Laba/(Rugi) bersih Income/(loss) net	(50.517)	(60.621)	(14.060)	(14.060)	(14.060)	(117.926)
Penghasilan/(beban) Komprehensif lain/ Income/(loss) other comprehensive	(1.950)	-	4.360	-	-	2.409
Laba /(rugi) komprehensif Income/(loss) comprehensive	(52.467)	(60.621)	(9.701)	(14.060)	(14.060)	(115.517)
Kepentingan Non pengendali/ Non controlling interest	-	(2.481)	-	-	(2.593)	(5.074)
Laba bersih/net income	(52.467)	(58.140)	(9.701)	(14.060)	(11.467)	(110.442)
	31 Desember 2022/ December 31, 2022					
	Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang	DKI Jakarta dan Jawa Barat Informasi	16 Provinsi (Jawa, Sumatera Kalimantan)	Seluruh Indonesia	Eliminasi	Total
Aset segmen/ Segment assets	308.127	1.724	30.951	951	(308.477)	33.275
Liabilitas segmen/ Segmen liabilities	6.317.872	12.876	103.450	1.660	(545.757)	5.890.102

31. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan pelanggan utama dari semua segmen usaha sebagai berikut :

	<u>Jasa Telekomunikasi</u>	<u>Teknologi Informasi</u>
Pelanggan Utama		
<i>Main customer</i>	PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada)	PT NTT Indonesia Technology

32. LISENSI JASA TELEKOMUNIKASI

a. Izin Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan bergerak Seluler

Pada tanggal 17 April 2015, Perusahaan memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak Seluler berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 186 tahun 2015 tentang "Izin Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak Seluler PT Bakrie Telecom Tbk".

Lisensi ini diberikan untuk menyelenggarakan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak seluler dengan Wilayah Penyelenggaraan Nasional. Izin ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh dilakukan setiap lima (5) tahun. Evaluasi terbaru dibuat pada tahun 2021.

b. Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP)

Pada tanggal 2 Maret 2007, Perusahaan memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) dengan wilayah layanan nasional berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 053/DIRJEN/2007 tentang "Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet PT Bakrie Telecom Tbk". Izin penyelenggaraan jasa ISP ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap lima (5) tahun. Evaluasi terbaru dibuat pada tahun 2021.

31. SEGMENT INFORMATION (continued)

The following table shows the main customers from all business segments as follows:

	<u>Infrastruktur Media</u>	<u>Periklanan Digital</u>
	VIVA Group dan ANTV	tvOne

32. TELECOMMUNICATION SERVICE LICENSE

a. License for Basic Telephony Services Through Cellular Mobile Network

On April 17, 2015, the Company obtained Operational License for Basic Telephony Services Through Cellular Mobile Network based on the Decree of Director General of Post and Information No. 186 year 2015 regarding "License for the Basic Telephony Services Through Cellular Mobile Network PT Bakrie Telecom Tbk".

This license was granted for Basic Telephony Services through cellular mobile network with national service area coverage. The license will be evaluated annually and will be fully evaluated every five (5) years. The most recent evaluation was conducted in 2021.

b. License for Operation of Internet Service Provider (ISP)

On March 2, 2007, the Company obtained a License for Operational Internet Service Provider with nationwide coverage, based on Decision Letter of the Director General Post and Telecommunication No. 053/DIRJEN/2007 regarding "License for Operation of Internet Service Provider PT Bakrie Telecom Tbk." The ISP license will be evaluated annually and will be fully evaluated every five (5) years. The most recent evaluation was conducted in 2021.

33. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN

Perusahaan memiliki perjanjian dan ikatan yang signifikan, sebagai berikut:

a. PT Bakrie Swasakti Utama (Pihak Berelasi)

Perusahaan menandatangani perjanjian sewa dengan PT Bakrie Swasakti Utama untuk sewa kantor dan lahan parkir untuk satu (1) tahun.

Perjanjian tersebut dapat diperbaharui kembali setelah tanggal perjanjian berakhir. Jumlah beban sewa setiap tahun disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian yang diungkapkan dalam (Catatan 25).

Pada tanggal 1 Oktober 2014, Perusahaan memperpanjang perjanjian sewa dengan PT Bakrie Swasakti Utama dari tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 yang dapat diperpanjang kembali setelah tanggal perjanjian berakhir. Harga sewa baru untuk luas area 6.559,99 m² adalah sebesar Rp471,9 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian pengalihan pengelolaan ruang usaha sektor utara Rasuna Office Park dari PT Provinces Indonesia ke PT Bakrie Swasakti Utama dari tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015. Biaya iuran pengelolaan per bulan yang harus dibayar Perusahaan adalah sebesar Rp30,25 ribu per meter dengan luas area 1.665 m² atau sebesar Rp50,4 juta per bulan (Catatan 25).

Perusahaan juga menandatangani pengalihan perjanjian pengelolaan ruang usaha sektor selatan Rasuna Office Park dari PT Provinces Indonesia ke PT Bakrie Swasakti Utama dari tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Biaya iuran pengelolaan per bulan yang harus dibayar Perusahaan adalah sebesar Rp30 ribu per meter dengan luas area 937 m² atau sebesar Rp28,3 juta per bulan (Catatan 25).

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

The Company had outstanding significant agreements and commitments, as follows:

a. PT Bakrie Swasakti Utama (Related Party)

The Company entered into a rental agreement with PT Bakrie Swasakti Utama for the lease of certain office and parking spaces with one (1) year term.

The agreement subject to renewal after the expiry date. The amount of the rental expense for every year presented in the consolidated financial statements is disclosed in (Note 25).

On October 1, 2014, the Company extended its rental agreement with PT Bakrie Swasakti Utama from September 1, 2014 until August 31, 2015 subject to renewal after the expiry date. The new rental per month amounted to Rp471,9 million for a total area of 6,559.99 m².

On December 31, 2013, the Company entered into an agreement to transfer building management of the northern sector of Rasuna Office Park from PT Provinces Indonesia to PT Bakrie Swasakti Utama from June 3, 2014 until January 2, 2015. Service charges per square meter amounted to Rp30.25 thousand for a total area of 1,665 m² or amounting to Rp50.4 million per month (Note 25).

The Company also entered into an agreement to transfer the building management of the southern sector Rasuna Office Park from PT Provinces Indonesia to PT Bakrie Swasakti Utama from March 1, 2014 until December 31, 2014. Service charges per meter amounted to Rp30 thousand for a total area of 937 m² amounting to Rp28.3 million per month (Note 25).

33. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)

a. PT Bakrie Swasakti Utama (Pihak Berelasi)
(lanjutan)

Pada tanggal 25 September 2014, Perusahaan memperpanjang perjanjian sewa dengan PT Bakrie Swasakti Utama dari tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 yang dapat diperpanjang kembali setelah tanggal perjanjian berakhir. Harga sewa baru untuk luas area 459,74 m² adalah sebesar Rp32,9 juta per bulan. Sampai dengan tanggal laporan ini, proses perpanjangan perjanjian sewa masih dalam proses penandatanganan.

34. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN UTANG

Pada tanggal 23 Oktober 2014, PT Netwave Multimedia (Netwave) mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan dengan register perkara No. 59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagai akibat dari tidak dibayarkannya utang jatuh tempo Perusahaan terhadap Netwave Rp4,7 miliar. Pada rapat kreditor tanggal 8 Desember 2014 yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilakukan pembahasan dan pemungutan suara (*voting*) kreditor atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Perusahaan dan sebagian besar kreditor konkuren Perusahaan atau sejumlah 94,56% kreditor konkuren telah memberikan suara setuju atas Rencana Perdamaian tersebut.

Pada tanggal 9 Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan PKPU oleh Netwave terhadap Perusahaan telah mengeluarkan keputusan yang mengesahkan (Homologasi) Perjanjian Perdamaian dalam PKPU antara Perusahaan dan para kreditornya dengan keputusan No. 59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN. Niaga. Jkt. Pst. Pada tanggal 23 Oktober 2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan keputusan No. 83 PK/Pdt. Sus-Pailit/2015 yang menguatkan keputusan homologasi Perjanjian Perdamaian dalam PKPU Perusahaan. Keputusan Pengadilan atas Perjanjian Perdamaian dalam PKPU Perusahaan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(continued)

a. PT Bakrie Swasakti Utama (Related Party)
(continued)

On September 25, 2014, the Company extended its rental agreement with PT Bakrie Swasakti Utama from September 1, 2014 until February 28, 2015, subject to renewal after expiry date. The new rental change amounted to Rp32.9 million per month for a total area of 459.74 m². As of the date of this report, the extension of the rental agreement is still in the process of signing.

34. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT

On October 23, 2014, PT Netwave Multimedia (Netwave) filed PKPU petition against the Company under case register No. 59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst as a result of non-payment of overdue payables to Netwave by the Company amounting to Rp4.7 billion. At the creditors meeting on December 8, 2014 held in the Commercial Court of the Central Jakarta District Court, discussions were held and creditors voted on the Amicable Settlement Plan proposed by the Company, with the majority, or 94.56% of the unsecured creditors of the Company voting in favor of the Amicable Settlement Plan.

On December 9, 2014, the judges of the Commercial Court in Central Jakarta District Court and the PKPU adjudicators of Netwave petition against the Company issued a decision officially approving in PKPU, the Amicable Settlement Agreement between the Company and its creditors by the ruling No. 59/Pdt. Sus/PKPU/2014/PN. Niaga. Jkt. Pst. On October 23, 2015, the Supreme Court of the Republic of Indonesia granted ruling No. 83 PK/Pdt. Sus-Pailit/2015 under which the homologation of the PKPU Settlement Agreement is strengthened. The Court ruling on the PKPU Settlement Agreement has had permanent legal enforce.

**34. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG** (lanjutan)

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam Perjanjian Perdamaian ini Perusahaan dan para kreditor dengan ini saling menyetujui hal-hal yang telah diatur didalam Rencana Perdamaian, antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan mempertimbangkan dan mendasarkan kepada keadaan kegiatan usaha Perusahaan saat ini, Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi antara Perusahaan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014, Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi antara Perusahaan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014, dan keadaan pasar, serta kedudukan para kreditor Perusahaan sehubungan dengan jaminan-jaminan yang dimiliki oleh kreditor separatis dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan jaminan-jaminan yang diberikan tersebut.

2. *Cash Waterfall.*

Perusahaan akan berusaha mengalokasikan Sisa Kas Operasional (di luar Utang Baru dan penerbitan Saham Baru) dari kegiatan usaha utama Perusahaan ke dalam suatu rekening Perusahaan dan akan dipergunakan dengan urutan skala prioritas sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian PKPU.

3. *Waiver of Other Obligations.*

Perjanjian Perdamaian ini tidak mengikat atau tidak berlaku terhadap pembayaran atau pelaksanaan kewajiban-kewajiban Perusahaan kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi antara Perusahaan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014 dan Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi antara Perusahaan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014 berikut seluruh perjanjian turutannya (apabila ada).

34. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(continued)

Furthermore, based on the aforementioned, in Amicable Settlement Agreement, the Company and the creditors mutually agree with the terms that have been set out in the Amicable Settlement Agreement, among others, as follows:

1. *Amicable Settlement Agreement was made in consideration of and based on the current condition of the Company's operations, the Agreement of Business Activity Merger of Telecommunication Network Implementation between the Company and PT Smartfren Telecom Tbk dated October 30, 2014, Agreement of Telecommunication Network Lease between the Company and PT Smartfren Telecom Tbk dated October 30, 2014, and the market condition, as well as the position of the creditors in connection with the guarantees held by secured creditors, and the terms and conditions relevant to the guarantees given.*

2. *Cash Waterfall.*

The Company will attempt to allocate the Remaining Amount of Cash Operations from the Company's main business activities (outside New Debt and the issuance of New Shares) in the accounts of the Company and which will be used in accordance with the order of priorities as required by the PKPU settlement agreement.

3. *Waiver of Other Obligations.*

The Amicable Settlement Agreement is not binding and does not apply to payments or implementation of the obligations of the Company to any parties related to the Agreement of Business Activity Merger of Telecommunication Network Implementation between the Company and PT Smartfren Telecom Tbk dated October 30, 2014 and Agreement of Telecommunication Network Lease Agreement between the Company and PT Smartfren Telecom Tbk dated October 30, 2014 following the entire agreement and its other related agreements (if any).

**34. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG** (lanjutan)

4. Seluruh bunga, penalti dan/atau denda yang telah timbul sampai dengan Tanggal Homologasi akibat Utang Perusahaan akan dihapuskan seluruhnya, kecuali diatur sebaliknya secara tegas dan khusus oleh Perusahaan dalam Perjanjian Perdamaian ini.
5. Terhadap tagihan-tagihan lain yang:
 - 1) belum teridentifikasi sampai Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi; atau
 - 2) belum teridentifikasi sampai Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi; atau
 - 3) yang baru teridentifikasi setelah Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi namun tagihan tersebut berasal dari atau timbul karena kondisi, perbuatan hukum, permulaan atau rangkaian kejadian, atau ketentuan hukum yang terdapat sebelum Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi yang terdapat putusan badan peradilan atau badan arbitrase yang berkekuatan hukum tetap yang diakui oleh hukum Indonesia maka tagihan-tagihan lain sebagaimana disebut di atas (disebut "Utang Diluar Verifikasi") akan tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
 - a) tagihan tersebut dapat diterima oleh Perusahaan namun harus sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan/PSAK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b) hanya ketika ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi dan tagihan diterima dan diakui kemudian oleh Perusahaan, maka tagihan tersebut akan dibayar Perusahaan mulai tahun ke-31 setelah Tanggal Homologasi.

Utang Usaha

- A. Utang Usaha Rp1 sampai dengan Rp3 miliar (utang kategori *Tranche A*), Perusahaan akan melakukan pembayaran tunai atas utang dengan ketentuan sebagai berikut:

34. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(continued)

4. All interest, penalties and/or fines related to the Company's Debts that have been incurred up to the Official Approval of Settlement Agreement Date will be entirely eliminated, except as otherwise expressly and specifically stated by the Company in the Amicable Settlement Agreement.
5. With regard to other outstanding bills that:
 - 1) have not been identified in the Amicable Settlement Agreement; or
 - 2) have not been identified in the Amicable Settlement Agreement; or
 - 3) those newly identified after the Amicable Settlement Agreement but that came from or arose out of conditions, legal acts, the beginning or a series of events, or laws that occurred before this Amicable Settlement Agreement obtained the binding of the court and arbitration body's decision as recognized by the laws of Indonesia the other outstanding bills as referred to above (referred as "Verification of Outside Debt") will be subject to the following conditions:
 - a) the outstanding bills may be accepted by the Company but must be in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia (Indonesian Financial Accounting Standards/PSAK) and the prevailing laws; and
 - b) only when the above conditions have been met and the outstanding bill is accepted and recognized later by the Company, then the bill will be paid by the Company starting in the 31st year after the Official Approval of Settlement Agreement Date.

Trade Payables

- A. For Trade Payables of Rp1 up to Rp3 billion (debt category *Tranche A*), the Company will make a cash payment on the payables under the following conditions:

**34. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG** (lanjutan)

Utang Usaha (lanjutan)

- a) Utang Usaha Rp1 sampai dengan Rp3 miliar, pembayaran akan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-84 setelah Tanggal Homologasi.
- b) Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Utang Usaha Rp1 sampai dengan Rp3 miliar (utang kategori *Tranche A*), maka sisa nilai utang yang tidak terbayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran utang pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai tanggal jatuh tempo terakhir.
- c) Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa utang sesuai dengan jadwal pada butir b) sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir, maka atas sisa utang tersebut akan dibayarkan paling lambat pada akhir tahun ke-15 setelah Tanggal Homologasi.

B. Utang Usaha diatas Rp3 miliar dalam mata uang selain Rupiah (utang kategori *Tranche C*) dan Utang Usaha di atas Rp3 miliar dalam mata uang Rupiah (utang kategori *Tranche D*)

1. Nilai Utang Usaha sampai dengan Rp3 miliar pertama akan dibayarkan sesuai ketentuan Perjanjian Perdamaian di atas.
2. 30% dari sisa Utang Usaha setelah dikurang nilai sesuai butir 1) akan dibayarkan secara tunai ("Porsi Tunai") dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.

34. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(continued)

Trade Payables (continued)

- a) For Trade Payables of Rp1 up to Rp3 billion, the payment will be paid in installments and will be paid no later than the 84th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.
- b) If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay Trade Payables of Rp1 to Rp3 billion (debt category *Tranche A*), then the payment of residual value of the payables remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with payable payments on the next due date, and this will continue until the final maturity date.
- c) If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the remaining amounts of payables in accordance with the schedule in point b) as at the final maturity date, then the remaining amounts of payables will be paid no later than the end of the 15th year after the Official Approval of Settlement Agreement Date.

B. Trade Payables above Rp3 billion in currencies other than Rupiah (debt category *Tranche C*) and Trade Payables above Rp3 billion in Indonesian Rupiah (debt category *Tranche D*)

1. Trade Payables up to Rp3 billion will be paid in accordance with the aforementioned Amicable Settlement Agreement.
2. Of the remaining amounts of Trade Payables, 30% after deduction of the amounts as mentioned in point 1) will be paid in cash with installments ("Cash Portion") and will be paid not later than the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.

**34. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG** (lanjutan)

Utang Usaha (lanjutan)

- Perusahaan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai utang kategori *Tranche C* sebesar 4% per tahun dan untuk Porsi Tunai utang kategori *Tranche D* sebesar 6% per tahun, yang akan dibayarkan dengan mengikuti jadwal pembayaran Porsi Tunai di atas.
- 70% dari sisa Utang Usaha setelah dikurang nilai sesuai butir 1) akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB-A) Perusahaan yang berjangka waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan Rp200/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas berikut perubahan dan/atau tambahannya ("UUPT").
- Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai beserta bunganya yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian di atas, maka sisa nilai Porsi Tunai dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya, dan demikian selanjutnya sampai tanggal jatuh tempo terakhir.
- Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunga yang belum dibayarkan pada jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas sampai dengan bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Porsi Tunai") maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu lima (5) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara prorata setiap tahunnya.

34. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(continued)

Trade Payables (continued)

- The Company will provide interest on Cash Portion of *Tranche C* category at 4% per year and for the Cash Portion of *Tranche D* category at 6% per year, which will be paid by following the above Cash Portion payment schedule.
- Of the remaining amounts of Trade Payables, 70% after deduction of the amounts, as mentioned in point 1) will be paid by Mandatory Convertible Bond (MCB-A) of the Company with a maturity of 10 years from the Effective Date at an exercise price of Rp200/share having regard to the provisions of the Capital Market Regulation and provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and its changes and/or enhancements ("UUPT").
- If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Cash Portion and its interest set out in the aforementioned Amicable Settlement Agreement, then payment of the residual value of Cash Portion and its interest that remain unpaid on any maturity date will be deferred and combined with the Cash Portion payment on the next due date, and this will continue until the final maturity date.
- If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the residual value of the Cash Portion and unpaid interest in accordance with the schedule referred to in point 5) above as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement ("Remaining Cash Portion") then the Remaining Cash Portion shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.

**34. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG** (lanjutan)

Utang Usaha (lanjutan)

7. Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai pada setiap saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada butir 6) di atas, maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Sisa Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).
8. Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 7) di atas, maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bonds* (MCB-B) Perusahaan yang berjangka waktu dua (2) tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
9. Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud pada butir 4) di atas, yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas.

Utang Tower Provider (Penyedia Menara)

Berikut adalah ketentuan restrukturisasi untuk Utang *Tower Provider* atas sewa tower yang telah jatuh tempo, belum dibayarkan, dan timbul sampai dengan tanggal 10 November 2014:

- A. Utang Rp1 sampai dengan Rp3 miliar (utang kategori Tranche A)
 - 1) Utang Rp1 sampai dengan Rp3 miliar pembayaran akan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-84 setelah Tanggal Homologasi.

34. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(continued)

Trade Payables (continued)

7. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion at any maturity date as referred to in point 6) above, then payment of the unpaid Remaining Cash Portion will be deferred and combined with the Remaining Cash Portion payments on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).*
8. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion at any maturity date as referred to in point 7) above, then the unpaid Remaining Cash Portion will be paid by Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*
9. *The Company does not provide interest on the principal amount of the 70% as referred to in point 4) above, which will be converted into shares in accordance with the above.*

Tower Provider Payables (Tower Provider)

The debt restructuring provisions on Tower Provider Payables for tower rentals that have matured, but are unpaid up to November 10, 2014:

- A. *Payables of Rp1 up to Rp3 billion (debt category of Tranche A)*
 - 1) *Payables Rp1 up to Rp3 billion the payment will be paid in installments and will be paid no later than the 84th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*

**34. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG** (lanjutan)

- 2) Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar utang sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Perdamaian (utang kategori *Tranche A*), maka sisa nilai utang yang tidak terbayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran utang pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai tanggal jatuh tempo terakhir.
- 3) Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa utang sesuai dengan jadwal pada butir 2) sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir, maka atas sisa utang tersebut akan dibayarkan paling lambat pada akhir tahun ke-15 setelah Tanggal Homologasi.

B. Utang diatas Rp3 miliar

- 1) Nilai utang sampai dengan Rp3 miliar pertama akan dibayarkan sesuai ketentuan Perjanjian Perdamaian di atas.
- 2) 30% dari sisa utang setelah dikurang nilai sesuai butir 1) di atas (utang kategori *Tranche D*), berikut dengan bunga sebesar 6% per tahun dari nilai tersebut akan dibayarkan secara tunai ("Porsi Tunai") dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.
- 3) 70% dari sisa utang setelah dikurangi nilai sesuai butir 1) di atas akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond (MCB-A)* Perusahaan yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp200/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.

34. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(continued)

- 2) *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement there are insufficient funds to pay payables as set forth in the Amicable Settlement Agreement, (debt category Tranche A), then payment of the residual value of the payables remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with the payable payments on the next due date, and this will continue until final maturity date.*
- 3) *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the remaining amounts of payables in accordance with the schedule as referred to in point 2) as at the final maturity date, then the remaining unpaid amounts of the payables will be paid no later than end of the 15th year after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*

B. Payables above Rp3 billion

- 1) *Payables up to Rp3 billion will be paid in accordance with the aforementioned Amicable Settlement Agreement.*
- 2) *Of the remaining amounts of payables, 30% after deduction of the amounts as mentioned in point 1) (debt category Tranche D), including its interest at 6% per year will be paid in cash in installments ("Cash Portion") and will be paid no later than the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*
- 3) *Of the remaining amounts of payables, 70% after deduction of the amounts as mentioned in point 1) above will be paid by Mandatory Convertible Bond (MCB-A) of the Company with a maturity of 10 years from the Effective Date at an exercise price of Rp200/ share having regard to the provisions of the Capital Market Regulation and provisions of UUPT.*

**34. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG** (lanjutan)

- 4) Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian di atas, maka sisa nilai Porsi Tunai yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir.
- 5) Jika setelah pengeluaran /pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunga sampai dengan bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Porsi Tunai") maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu lima (5) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara prorata setiap tahunnya.
- 6) Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya.

Dan digabungkan dengan pembayaran Sisa Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).

34. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(continued)

- 4) *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Cash Portion as set forth in the aforementioned Amicable Settlement Agreement, then payment of the residual value of Cash Portion remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with the Cash Portion payment on the next due date, and this will continue until the final maturity date.*
- 5) *If after spending/payments made based on the priority in accordance with Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the residual value of Cash Portion and its interest as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date ("Remaining Cash Portion") then the Remaining Cash Portion shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.*
- 6) *If after spending/ payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion at any maturity date as referred to in point 5) above, then payment of the unpaid Remaining Cash Portion will be deferred.*

And combined with Remaining Cash Portion payments on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).

**34. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG** (lanjutan)

7) Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai sampai dengan akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada butir 6), maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bonds* (MCB-B) Perusahaan yang berjangka waktu dua (2) tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.

8) Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud pada butir 3) di atas, yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas.

C. Sisa Masa Sewa

Berikut adalah ketentuan restrukturisasi untuk Utang Tower Provider atas nilai sewa untuk sisa masa sewa tower berdasarkan perjanjian sewa tower yang telah ada antara Perusahaan dengan masing-masing kreditor atas Utang Tower Provider yang dihitung sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan akhir masa sewa tower sesuai masing-masing perjanjian sewa tersebut:

1) 100% dari nilai sisa masa sewa akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB-A) berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan pada Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp200/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.

2) Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai yang akan ditukar menjadi MCB-A sesuai ketentuan di atas.

34. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(continued)

7) *If after spending/ payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion as at the end of the 5th year as referred to in point 6) above, then the Remaining Cash Portion will be paid by Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*

8) *The Company does not provide interest on the principal amount of 70% as referred to in point 4) above, which will be converted into shares in accordance with the above.*

C. The Remaining Lease Period

The debt restructuring provisions of Tower Provider Payables for the remaining term of the tower lease based on the existing tower lease agreements between the Company and each of the creditors on Tower Provider Payables calculated from November 10, 2014 through the end of the lease term in accordance with respective tower lease agreement are as follows:

1) *The total amount (100%) of the remaining term of the lease will be exchanged for Mandatory Convertible Bond (MCB-A) for a period of ten (10) years issued by the Company on the Effective Date at the conversion price of Rp200/share, having regard to the provisions of Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*

2) *The Company does not provide interest on the amount to be exchanged into MCB-A according to the above provisions.*

**34. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG** (lanjutan)

D. Penghentian Fasilitas Penyediaan Tower

Kreditor atas Utang *Tower Provider* dapat menghentikan layanan penggunaan tower yang disewa oleh Perusahaan akhir bulan Juni 2015, kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan dan kreditor atas Utang *Tower Provider* terkait.

**Utang Biaya Hak Penggunaan (BHP) dan
Universal Service Obligation (USO)**

1. Utang Pokok BHP dan USO adalah utang yang diakui Perusahaan secara tertulis sampai dengan tanggal 10 November 2014 ("Utang Pokok BHP"), terdiri atas:
 - a. Utang BHP Frekuensi Pita.
 - b. Utang BHP Frekuensi ISR.
 - c. Utang BHP Telekomunikasi.
 - d. Utang USO.
2. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atas Utang Pokok BHP, maka kelebihan pembayaran tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran cicilan Utang Pokok BHP berikutnya.
3. Pembayaran Utang Pokok BHP Frekuensi Pita, Utang BHP Frekuensi ISR, Utang BHP Frekuensi Telekomunikasi dan Utang USO akan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-10 setelah Tanggal Homologasi.
4. Jika setelah pengeluaran/ pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar utang yang diatur dalam butir 3) di atas, maka sisa utang yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran utang pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir. Apabila masih terdapat sisa utang yang belum dibayarkan setelah tahun ke-10 setelah Tanggal Homologasi maka sisa utang tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu lima (5) tahun berikutnya secara prorata setiap tahunnya.

34. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(continued)

D. Termination of Tower Provider Facilities

Creditors of *Tower Provider Payables* may terminate the usage service of leased tower by the Company by at the latest June 2015, unless otherwise determined by the Company and its creditors in relation to *Tower Provider Payables*.

**Payables on Fee of Right to Use (BHP) and
the Universal Service Obligation (USO)**

1. *BHP and USO Principal Payables* represent payables that are recognized by the Company in writing up to November 10, 2014 ("*BHP Principal Payables*"), consisting of:
 - a. *BHP Frequency Band Payables*.
 - b. *BHP Frequency ISR Payables*.
 - c. *BHP Telecommunication Payables*.
 - d. *USO Payables*.
2. In the event of excess payment of *BHP Principal Payables*, the excess will be included in the next repayment installments of *BHP Principal Payables*.
3. *Principals of BHP Frequency Band Payables, BHP Frequency ISR Payables, BHP Frequency Telecommunications Payables and USO Payables* will be paid in installments and will be paid no later than the 10th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.
4. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the *Amicable Settlement Agreement*, there are insufficient funds to pay the payables as referred to in point 3) above, then payables remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with payables payment on the next due date, and this will continue until final maturity date. If there are remaining payables after the 10th year after the Official Approval of Settlement Agreement Date then these remaining payables will be paid within a period of five (5) years on a *pro rata* basis each year.

**34. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG** (lanjutan)

5. Jika setelah pengeluaran/ pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar utang sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 4) di atas maka sisa utang yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran sisa utang pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).
6. Dalam hal terdapat penjaminan atas pembayaran Utang Pokok BHP dan penjaminan tersebut kemudian jatuh tempo dan diefektifkan/dicairkan sebelum jadwal pembayaran Utang Pokok BHP tersebut di atas berakhir, maka jadwal pembayaran tersebut tidak berlaku lagi kecuali masih terdapat sisa Utang Pokok BHP terkait yang jadwal pembayarannya tetap akan merujuk pada jadwal pembayaran Utang Pokok BHP sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian ini.

Utang Dana Hasil Wesel Senior

- A. Pembayaran Utang Dana Hasil Wesel Senior akan dilakukan oleh Perusahaan dengan cara sebagai berikut:
 1. 30% dari Utang Dana Hasil Wesel Senior (utang kategori *Tranche C*) akan dibayarkan secara tunai ("Porsi Tunai") dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.
 2. Perusahaan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai untuk utang kategori *Tranche C* sebesar 4%, yang akan dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas.

34. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(continued)

5. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the *Amicable Settlement Agreement*, there are insufficient funds to pay the payables based on schedule as referred in point 4), then payables remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with payables payment on the next due date, and this will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).
6. In the event of a guarantee given for payment of *BHP Principal Payables* and the guarantee then matures and is effected before the aforementioned *BHP Principal Payables* repayment schedule expires, the payment schedule is no longer valid unless related *BHP Principal Payables* remain that still refer to the *BHP Principal Payables* repayment schedule as stipulated in the *Amicable Settlement Agreement*.

Payables on Proceeds from Senior Notes

- A. *Payables on Proceeds from the Senior Notes* will be made by the Company in the following manner:
 1. Of *Payables on Proceeds from Senior Notes* (debt category *Tranche C*), 30% will be paid in cash ("*Cash Portion*") in installments and will be paid no later than the 66th month after the *Official Approval of Settlement Agreement Date*.
 2. The Company will provide interest at 4% on *Cash Portion* of debt category *Tranche C*, which will be paid in accordance with the payment schedule referred to in point 1) above.

**34. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG** (lanjutan)

3. 70% dari Utang Afiliasi akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB-A) Perusahaan yang berjangka waktu sepuluh (10) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dan dapat diperpanjang oleh Perusahaan dengan harga pelaksanaan konversi Rp200/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
4. Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai beserta bunganya yang diatur dalam butir 1) di atas, maka sisa nilai Porsi Tunai dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian seterusnya.
5. Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunganya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Porsi Tunai") maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara prorata setiap tahunnya.
6. Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai sampai dengan tanggal jatuh tempo sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas, maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).

34. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(continued)

3. *Of the Affiliate Payables, 70% will be paid by Mandatory Convertible Bond (MCB-A) of the Company with a maturity of ten (10) years from the Effective Date and may be extended by the Company at the conversion price of Rp200/share, having regard to the provisions of Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*
4. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Cash Portion and its interest as mentioned in point 1) above, then payment of the residual value of Cash Portion that remains unpaid on any maturity date will be deferred and combined with Cash Portion payment on the next due date, and this will continue until final maturity date.*
5. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the residual value of the Cash Portion and its interest as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date ("Remaining Cash Portion") then the Remaining Cash Portion shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.*
6. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion at any maturity date as referred to in point 5) above, then payment of the unpaid Remaining Cash Portion will be deferred and combined with the Remaining Cash Portion payments on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).*

**34. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG** (lanjutan)

7. Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai setelah akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada butir 6), maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/ *Mandatory Convertible Bonds* (MCB-B) Perusahaan yang berjangka waktu dua (2) tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
8. Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud pada butir 3) di atas, yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas.
9. Jika diperlukan, Perusahaan akan berusaha meminta atau melakukan upaya/tindakan yang diperlukan agar dilaksanakan penyelesaian/pembayaran atas Utang Dana Hasil Wesel Senior sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian ini, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan dan ketentuan, antara lain sebagai berikut:
 - a) Secara khusus meminta perhatian pengadilan bahwa, dalam rangka memenuhi ketentuan *Securities Acts* Amerika Serikat, diperkenankan untuk berpedoman pada pengecualian terhadap pendaftaran berdasarkan Pasal 3(a)(10) dari *Securities Acts* 1933 Amerika Serikat, dimana, Pasal 3(a)(10) mengizinkan suatu proses pengadilan di luar Amerika Serikat (dalam hal ini, proses PKPU Perusahaan) untuk melakukan suatu pertukaran Wesel Senior dengan pemegang Wesel Senior yang berada di Amerika Serikat jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

34. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(continued)

7. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the *Amicable Settlement Agreement*, there are insufficient funds to pay the *Remaining Cash Portion* as at the end of the 5th year as referred to in point 6) above, then the *Remaining Cash Portion* will be paid by *Mandatory Convertible Bonds (MCB-B)* of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the *Capital Market Regulation* and the provisions of *UUPT*.
8. The Company does not provide interest on the principal amount of 70% as referred to in point 3) above, which will be converted into shares in accordance with the above.
9. If necessary, the Company will attempt to solicit or make efforts/actions needed to be implemented for settlement/payment of *Payables on Proceeds from Senior Notes* in accordance with the provisions of the *Amicable Settlement Agreement*, including but not limited to the following acts and provisions, among others:
 - a) In particular call to the attention of the court that, in order to comply with the *United States Securities Acts*, it be allowed to be guided by the exceptions to the registration pursuant to Article 3(a)(10) of the 1933 *United States Securities Act*, whereby Article 3(a)(10) permits a court outside the United States (in this case, the PKPU process of the Company) to conduct an exchange of *Senior Notes* by the holders of such *Notes* who are in the United States providing they meet certain conditions.

**34. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG** (lanjutan)

- b) Atas Porsi Tunai dapat diterbitkan sebagai surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan dan ditawarkan kepada para pemegang Wesel Senior sebagai pertukaran (*exchange offer*) berdasarkan peraturan pasar modal yang berlaku, termasuk pengecualian pendaftaran yang sesuai berdasarkan *Securities Acts* Amerika Serikat. Surat berharga yang baru dapat memiliki ketentuan dan persyaratan tambahan sebagaimana akan disetujui oleh pemegang Wesel Senior, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Perjanjian Perdamaian ini.
- c) Apabila ada pemegang Wesel Senior yang tidak bersedia untuk melepaskan tagihan berdasarkan hukum manapun, maka mereka tidak berhak untuk menerima surat berharga baru.

Ketentuan ini secara khusus tidak mengurangi hak Perusahaan untuk meminta pengakuan atas proses PKPU ini berdasarkan Pasal 15 *Bankruptcy Code* Amerika Serikat atau setiap ketentuan lain dari hukum nasional manapun yang mengizinkan pengakuan atas proses pengadilan asing.

- d) Melakukan upaya yang wajar agar Pemegang Wesel Senior asing dapat dihubungi melalui sistem kliring. Namun demikian, jika ada Pemegang Wesel Senior asing yang tidak dapat dihubungi atau tidak memberikan dokumentasi yang diperlukan untuk menerima surat berharga baru dalam waktu enam (6) bulan sejak pemberitahuan, maka seluruh hak mereka akan gugur.

34. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(continued)

- b) *The Cash Portion may be exchanged for new securities issued by the Company and offered to holders of Senior Notes based on the prevailing capital market regulations, including the appropriate registration exemption under the United States Securities Acts, The new securities may have additional terms and conditions as shall be approved by the holders of the Senior Notes, and the provisions do not conflict with this Amicable Settlement Agreement.*

- c) *If there are any holders of Senior Notes who are not willing to relinquish any claim under the law, then they are not entitled to receive new securities.*

This provision specifically does not reduce the Company's right to request recognition of this PKPU process under Article 15 United States Bankruptcy Code or any other provision of any national law that allow the recognition of the foreign court.

- d) *Make a reasonable effort so that foreign holders of Senior Notes may be contacted through the clearing system. However, if there is a foreign holder of Senior Notes that cannot be contacted or does not provide the necessary documentation to receive new securities within six (6) months from the notification, then all their rights will be void.*

**34. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG** (lanjutan)

10. Untuk menghindari keragu-raguan:

- a) Utang Dana Hasil Wesel Senior adalah utang Perusahaan kepada BTPL sebesar USD380 juta berdasarkan *Intercompany Loan Agreement* dan *Supplemental Intercompany Loan Agreement* masing-masing tertanggal 7 Mei 2010 dan 27 Januari 2011 ("*Intercompany Loan Agreement*") dimana Perusahaan sebagai peminjam dan BTPL sebagai pemberi pinjaman.
- b) Dana Hasil Wesel Senior yang diperoleh Perusahaan berdasarkan *Intercompany Loan Agreement* merupakan dana hasil penerbitan Wesel Senior yang harus diberikan oleh BTPL dalam bentuk pinjaman kepada Perusahaan melalui *Intercompany Loan*, sesuai dengan ketentuan dalam *Offering Memorandum USD250 Million 11.5% Guaranteed Senior Notes Due 2015* dan *USD130 Million Senior Notes at 107%* yang diterbitkan oleh BTPL.
- c) Dengan di-homologasi-nya Perjanjian Perdamaian ini yang juga mencakup skema atau pola penyelesaian Utang Dana Hasil Wesel Senior oleh Perusahaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini.

Maka terhitung sejak Tanggal Homologasi tersebut, Perusahaan tidak lagi memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh perjanjian atau dokumen yang terkait dengan penerbitan Wesel Senior yang menjadi berakhir, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan seluruh jaminan yang ada dalam rangka penerbitan Wesel Senior, yaitu jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) yang diberikan oleh Perusahaan, jaminan yang diberikan oleh Para Penjamin, serta jaminan lainnya apabila ada.

Utang Afiliasi

Utang Afiliasi akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut:

34. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(continued)

10. For the avoidance of doubt:

- a) *Payables on Proceeds from Senior Notes are Payables of the Company to BTPL amounting to USD380 million based on the Intercompany Loan Agreement and Supplemental Intercompany Loan Agreement, dated May 7, 2010 and January 27, 2011, respectively, ("Intercompany Loan Agreement"), wherein the Company is the borrower and BTPL the lender.*
- b) *Proceeds from the Senior Notes were acquired by the Company based on the Intercompany Loan Agreement as the proceeds from the Senior Notes to be provided by BTPL in the form of loans to the Company through Intercompany Loan in accordance with the provisions of the Offering Memorandum, being USD250 million 11.5% Senior Guaranteed Notes Due 2015 and USD130 million Senior Notes at 107%, issued by BTPL.*
- c) *With the Amicable Settlement Agreement, which also includes a scheme or pattern of settlement of Payables on Proceeds from Senior Notes by the Company.*

Then starting from the Official Approval of Settlement Agreement Date, the Company no longer has an obligation to fulfill the entire agreements or documents associated with the issuance of the Senior Notes, which were automatically terminated, including but not limited to compliance with all existing collateral for issuance of the Senior Notes, which are Corporate Guarantee provided by the Company, the guarantee given by the Guarantor, as well as other guarantees, if any.

Affiliate Payables

Affiliate Payables will be paid under the following scheme:

**34. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG** (lanjutan)

Utang Afiliasi (lanjutan)

1. 100% dari Utang Afiliasi akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB-A) Perusahaan yang berjangka waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp200/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
2. Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas yang akan dikonversi menjadi MCB-A sesuai ketentuan di atas.

Utang dengan Jaminan (Utang Kategori Tranche B)

1. Terhadap Utang dengan Jaminan dalam Perjanjian Perdamaian ini yang diperhitungkan dan diakui adalah seluruh nilai utang pokoknya saja.
2. Seluruh jumlah Utang dengan Jaminan akan dibayarkan secara tunai dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.
3. Perusahaan akan memberikan bunga atas Utang dengan Jaminan sebesar 4% yang akan dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 2) di atas.
4. Jika setelah pengeluaran/ pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Utang dengan Jaminan beserta bunganya yang diatur dalam butir 2) dan 3), maka sisa nilai Utang dengan Jaminan dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran berikutnya pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian seterusnya.

34. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(continued)

Affiliate Payables (continued)

1. All the Affiliate Payables (100%) will be exchanged for the Mandatory Convertible Bond (MCB-A) of the Company with a maturity of 10 years from the Effective Date of conversion at an exercise price of Rp200/share having regard to the provisions of Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.
2. The Company does not provide interest on the amount of payables as referred to in point 1) to be exchanged into MCB-A according to the above provisions.

Payables with Collateral (Debt Category Tranche B)

1. Payables with Collateral in the Amicable Settlement Agreement are included and recognized only for their principal amounts.
2. The entire amounts of Payables with Collateral will be paid in cash by installments and will be paid no later than the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.
3. The Company will provide interest at 4% on Payables with Collateral, which will be paid in accordance with the payment schedule referred to in point 2) above.
4. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay Payables with Collateral and associated interest as referred in points 2) and 3), then payment of the residual value of Payables with Collateral and associated interest remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with payment on the next due date, and this will continue.

**34. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG** (lanjutan)

**Utang dengan Jaminan (Utang Kategori
Tranche B)** (lanjutan)

5. Jika setelah pengeluaran/ pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Utang dengan Jaminan dan bunga yang belum dibayarkan setelah bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Utang dengan Jaminan") maka Sisa Utang dengan Jaminan tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu lima (5) tahun secara prorata setiap tahunnya.
6. Jika setelah pengeluaran/ pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar, Sisa Utang dengan Jaminan pada saat jatuh tempo sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas, maka Sisa Utang dengan Jaminan yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Utang dengan Jaminan pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).
7. Jika setelah pengeluaran/ pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Utang dengan Jaminan, dan setelah akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada butir 6) di atas masih terdapat Sisa Utang dengan Jaminan yang belum terbayarkan, maka atas Sisa Utang dengan Jaminan tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bonds* (MCB-B) Perusahaan yang berjangka waktu dua (2) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.

34. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(continued)

**Payables with Collateral (Debt Category
Tranche B)** (continued)

5. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the *Amicable Settlement Agreement*, there are insufficient funds to pay the residual value of *Payables with Collateral* and associated interest as at the 66th month after the *Official Approval of Settlement Agreement Date* ("Remaining Payables With Collaterals") then the Remaining Payables with Collateral shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.
6. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the *Amicable Settlement Agreement*, there are insufficient funds to pay the Remaining Payables with Collateral at any maturity date as referred to in point 5) above, then payment of the unpaid Remaining Payables with Collateral will be deferred and combined with Remaining Payables with Collateral on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).
7. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the *Amicable Settlement Agreement*, there are insufficient funds to pay the Remaining Payables with Collateral as at the end of the 5th year as referred to in point 6) above, then the Remaining Payables with Collateral will be paid by *Mandatory Convertible Bonds (MCB-B)* of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the *Capital Market Regulation* and the provisions of *UUPT*. a period of two (2) years issued by the Company with the procedure and the minimum conversion price in accordance with the applicable *Capital Market regulations* and the provisions of the *UUPT*.

**34. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG** (lanjutan)

**Utang Akibat Derivatif (utang kategori
Tranche C)**

1. 30% dari sisa Utang Akibat Derivatif akan dibayarkan secara tunai ("Porsi Tunai") dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.
2. Perusahaan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai 4% per tahun yang akan dibayarkan dengan mengikuti jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas.
3. 70% dari sisa Utang Akibat Derivatif akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB-A) berjangka waktu sepuluh (10) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan pada Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp200/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
4. Jika setelah pengeluaran/ pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai beserta bunganya yang diatur dalam butir 1) dan 2) di atas, maka sisa nilai Porsi Tunai dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian seterusnya.
5. Jika setelah pengeluaran/ pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunga yang belum dibayarkan setelah bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Porsi Tunai") maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara prorata setiap tahunnya.

34. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(continued)

Derivatives Payables (debt category Tranche C)

1. Of remaining amount of Derivative Payables, 30% will be paid in cash ("Cash Portion") in installments and will be paid no later than the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.
2. The Company will provide interest at 4% on Cash Portion, which will be paid in accordance with the payment schedule referred to in point 1) above.
3. Of the Derivative Payables, 70% will be paid by Mandatory Convertible Bond (MCB-A) issued by the Company with a maturity of ten (10) years from the Effective Date at the conversion price of Rp200/share, having regard to the provisions of Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.
4. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Cash Portion and its interest as mentioned in points 1) and 2) above, then payment of the residual value of Cash Portion that remains unpaid on any maturity date will be deferred and combined with Cash Portion payment on the next due date, and this will continue until final maturity date.
5. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the residual value of the Cash Portion and its interest as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date ("Remaining Cash Portion") then the Remaining Cash Portion shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.

34. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN UTANG (lanjutan)

6. Jika setelah pengeluaran/ pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai pada setiap saat jatuh tempo sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas, maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Sisa Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).
7. Jika setelah pengeluaran/ pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai, setelah akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada butir 6) yang belum terbayarkan, maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB B) berjangka waktu 2 tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
8. Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud dalam butir 3) di atas yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas.

Utang Pembiayaan Kendaraan

1. Utang Pembiayaan Kendaraan termasuk bunganya akan dibayar sesuai ketentuan kontrak antara Perusahaan dengan kreditor atas Utang Pembiayaan Kendaraan yang telah ada sebelum Perjanjian Perdamaian ini.
2. Kelalaian atau kegagalan pelaksanaan kewajiban Perusahaan kepada kreditor atas Utang Pembiayaan Kendaraan berdasarkan kontrak yang telah ada sebelum Perjanjian Perdamaian ini yang menimbulkan akibat atau konsekuensi yang diatur dalam kontrak tersebut, tidak menyebabkan atau tidak dianggap telah terjadi kegagalan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini.

34. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT (continued)

6. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion at any maturity date as referred to in point 5) above, then payment of the unpaid Remaining Cash Portion will be deferred and combined with the Remaining Cash Portion payments on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).*
7. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion as at the end of the 5th year as referred to in point 6) above, then the Remaining Cash Portion will be paid by Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*
8. *The Company does not provide interest on the principal amount of 70% as referred to in point 3) above, which will be converted into shares in accordance with the above.*

Vehicles Finance Payables

1. *Vehicles Finance Payables and associated interest will be paid in accordance with the terms in the contract between the Company and creditors based on existing Vehicles Finance Payables that were entered into before this Amicable Settlement Agreement.*
2. *Negligence or failure in the implementation of the Company's obligations to creditors on Vehicles Finance Payables under existing contracts prior to the Amicable Settlement Agreement, arising from or due to consequences as stipulated in the contract, shall not cause or be deemed to have resulted in the failure of the implementation of the Amicable Settlement Agreement.*

**34. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN
UTANG** (lanjutan)

**Ketentuan-Ketentuan Lain Restrukturisasi,
antara lain sebagai berikut:**

1. Tidak ada pemberian jaminan kebendaan dan/atau jaminan perusahaan yang baru yang akan diberikan sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian yang dihomologasi, kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan.
2. Setiap Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bonds* (MCB) yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini yang tidak dimintakan konversi menjadi saham Perusahaan oleh kreditor terkait sampai dengan tanggal jatuh tempo MCB tersebut, maka MCB tersebut menjadi berakhir dan jika terdapat klaim atas nilai MCB tersebut oleh kreditor maka pembayarannya akan dilakukan mulai tahun ke-31 setelah Tanggal Homologasi.

Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian PKPU masih memerlukan proses lebih lanjut yang sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini masih berlangsung.

Pada tanggal 26 Juni 2016, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan untuk melakukan penambahan modal baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu melalui mekanisme penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

Pada tanggal 1 Maret 2017, PT Huawei Tech Investment telah mengkonversi Obligasi Wajib Konversi yang dimiliki sebesar Rp1.237.862.796.141 menjadi saham Perusahaan sebanyak 6.189.313.980 lembar saham.

Pada bulan Agustus 2016, Perusahaan menerbitkan sertifikat OWK bagi masing-masing kreditor yang berhak memperoleh OWK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

34. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT
(continued)

**Other Restructuring Provisions, among others,
are as follows:**

1. No new asset guarantees and/or corporate guarantees shall be given in connection with the Amicable Settlement Agreement, unless otherwise determined by the Company.
2. Each Mandatory Convertible Bonds (MCB) issued pursuant to this Amicable Settlement Agreement whose conversion into shares of the Company is not requested by creditors on its maturity date, shall then be automatically terminated and should a claim on the MCB be subsequently be made by creditors, the payment will be made after the 31st year following the Official Approval of Settlement Agreement Date.

The execution of this Amicable Settlement Agreement in PKPU is still subject to further process, which as of the completion date of the consolidated financial statements is still ongoing.

On June 26, 2016, the Company had approval from the General Meeting of Shareholders the Company to perform additional capital without right to order by OWK mechanism as stipulated on Amicable Settlement Agreement.

On March 1, 2017, Mandatory Convertible Bond owned by PT Huawei Tech Investment amounting to Rp1,237,862,796,141 has converted to shares of the Company of 6,189,313,980 shares.

In August 2016, the Company issued OWK certificates for each creditors which are entitled to obtain OWK as stipulated on Amicable Settlement Agreement.

35. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan posisi keuangan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2022 telah direklasifikasi untuk menyesuaikan penyajian laporan posisi keuangan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebagai berikut:

35. ACCOUNT RECLASSIFICATION

Several accounts in the statement of financial position for the year ended 31 December 2022 have been reclassified to adjust the presentation of the statement of financial position for the year ended 31 December 2023 as follows:

	<u>Dilaporkan sebelumnya/ before reclassification</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Setelah reklasifikasi/ After reclassification</u>
Laporan Posisi Keuangan konsolidasian/ Consolidated Statement of Financial Position			
Liabilitas jangka pendek/ current liabilities			
- Utang pihak berelas/ Due to related parties	47.272	(47.272)	-
- Liabilitas imbalan kerja/ Employee benefit liability	12.708	(12.708)	-
- Utang lain-lain/ Other payables	<u>179.945</u>	<u>(14.093)</u>	<u>165.852</u>
Liabilitas jangka panjang/ Non current liabilities			
- Utang pihak berelas/ Due to related parties	-	47.272	61.365
- Liabilitas imbalan kerja/ Employee benefit liability	<u>-</u>	<u>12.708</u>	<u>12.708</u>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/ Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income			
- Beban karyawan/ employee expenses	29.661	(16.164)	13.497
- Beban umum dan administrasi/ General and administrative expenses	19.322	(452)	18.870
- Beban pokok pendapatan/ Cost of revenues	<u>15.480</u>	<u>16.164</u>	<u>31.644</u>

36. KELANGSUNGAN USAHA

Pada tanggal 31 Desember 2023, Kelompok Usaha mencatat nilai aset sejumlah Rp60,27 miliar serta mengalami defisiensi modal sejumlah Rp5,88 triliun dan mencatat liabilitas sejumlah Rp5,94 triliun yang terbagi dalam utang yang telah diselesaikan melalui PKPU sejumlah Rp4,93 triliun (Catatan 16) dan utang jangka pendek sejumlah Rp805 miliar. Apabila Kelompok Usaha tidak mampu melaksanakan pembayaran porsi utang yang diselesaikan melalui PKPU sejumlah tersebut, maka di tahun 2026 utang pokok sejumlah Rp9,89 Triliun akan dikonversi menjadi kepemilikan kreditur di saham Perusahaan (Catatan 34).

Dengan maksud untuk tetap mempertahankan kelangsungan usaha dan menyelesaikan liabilitas tersebut di atas, Manajemen Kelompok Usaha memiliki rencana aksi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan negosiasi kepada para kreditur dan pemasok agar utang akrual bunga sejumlah tersebut dapat dihapuskan atau dikurangi.
- b. Bakrie & Brothers (BNBR) dapat menggunakan jasa layanan Outsource IT Manage Services dari PT Inovasi Teknologi Nusantara (entitas anak investasi secara langsung) dalam kelangsungan usahanya.
- c. Bakrie & Brothers (BNBR) dapat menggunakan jasa layanan dari PT Layanan Prima Digital (entitas anak investasi secara tidak langsung) dalam layanan Fixline dalam Gedung.
- d. VKTR dapat menggunakan jasa dari PT Layanan Prima Digital dalam layanan Contact Center Outsourcing dan juga layanan Broadcasting dari PT Viva Teknologi Integra (dahulu CAF merupakan entitas anak investasi secara tidak langsung) dalam pembuatan konten video promosi dan eksibisi perusahaan ataupun event tertentu.
- e. VIVA dapat menggunakan layanan dari PT Inovasi Teknologi Nusantara (entitas anak investasi secara langsung)dalam dalam Field Operation Managed Services untuk kelangsungan usahanya.

36. GOING CONCERN

As of December 31, 2023, the Group recorded the asset balance of Rp60,27 billion and is suffering a capital deficiency amounting to Rp5.88 trillion and recorded liabilities amounting to Rp5.94 trillion divided into debts that had been settled through PKPU of Rp4,93 trillion (Note 16) and short-term debt of Rp805 billion. If the Group is unable to pay this portion of the debt settled through PKPU, the principal debt amounting to Rp9.89 trillion will be converted into the creditor's ownership in the Company's shares in 2026 (Note 34).

By the intention of maintaining going concern and settling the above-mentioned liabilities, the Group's Management has the action plans are as follows:

- a. Conducting negotiations with creditors and suppliers regarding the interest accrued amounting as above mentioned for be written off or reduced.*
- b. Bakrie & Brothers (BNBR) can use Outsource IT Manage Services from PT Inovasi Teknologi Nusantara (a direct investment subsidiary) in the continuity of its business*
- c. Bakrie & Brothers (BNBR) can use services from PT Prima Digital Service (an indirect investment subsidiary) for Fixline services in buildings*
- d. VKTR can use services from PT Perusahaan Prima Digital in Contact Center Outsourcing services and also Broadcasting services from PT Viva Teknologi Integra (formerly CAF was an indirect investment subsidiary) in creating promotional video content and company exhibitions or certain events*
- e. VIVA can use services from PT Inovasi Teknologi Nusantara (a direct investment subsidiary) in Field Operation Managed Services for business continuity.*

36. KELANGSUNGAN USAHA (lanjutan)

- f. VIVA juga dapat menggunakan jasa layanan dari PT Viva Teknologi Integra dalam pembuatan konten untuk Conference ataupun Event yang diselenggarakan. Terhadap dukungan penggunaan jasa layanan yang dimiliki Entitas Anak BTEL tersebut diproyeksikan akan membawa dampak yang positif terhadap kondisi keuangan BTEL sehingga BTEL akan mampu membiayai operasionalnya kembali dan mampu menjaga keberlangsungan usahanya.
- g. Pada saat ini Pemegang Saham sedang dalam proses memfasilitasi kolaborasi bisnis Perseroan di bidang Teknologi dan Komunikasi dengan unit usaha dalam Kelompok Usaha Bakrie dalam hal ini PT Multi Kontrol Nusantara (MKN)
- h. Pelaksanaan penyelesaian kewajiban berdasarkan keputusan PKPU sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

Dengan rencana aksi tersebut di atas serta kinerja ITN dan LPD, suatu entitas anak masih memiliki kemampuan untuk beroperasi yang menghasilkan pendapatan, maka Manajemen Kelompok Usaha menyusun Laporan keuangan konsolidasian dengan asumsi bahwa Kelompok Usaha akan melanjutkan usahanya secara berkelanjutan.

36. GOING CONCERN (continued)

- f. VIVA can also use the services of PT Viva Teknologi Integra in creating content for conferences or events held. The support for the use of services owned by the BTEL Subsidiary is projected to have a positive impact on BTEL's financial condition so that BTEL will be able to finance its operations again and be able to maintain the continuity of its business
- g. Currently, Shareholders are in the process of facilitating the Company's business collaboration in the field of Technology and Communications with business units within the Bakrie Business Group, in this case PT Multi Control Nusantara (MKN)
- h. Implementation of obligation settlement based on PKPU ruling in accordance with the specified term.

By the action plans above mentioned as well as the performance of ITN and LPD, the subsidiaries that have the ability to generate revenue, the Group's Management prepares consolidated financial statements with the assumption that the Group will continue in going concern.